

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

REKAM JEJAK MASTERCHEF KEMENKES

34 TAHUN MENGABDI



KEMENKES RI

"Jangan pernah sedih ketika dimutasi. Itu bisa menambah ilmu. Berubah posisi dibutuhkan, ketika suatu saat diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu. Pak Untung sudah membuktikannya. Itu menjadi kelebihanannya."

Prof. DR. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM (K)
Menteri Kesehatan

KEMENKES RI

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

REKAM JEJAK MASTERCHEF KEMENKES

34 TAHUN MENGAJARI



Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

920

Ind

d

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes Rekam Jejak Masterchef Kemenkes 34 Tahun Mengabdikan.—Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2018

ISBN 978-602-416-460-7

1. Judul I. BIOGRAPHY

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

REKAM JEJAK MASTERCHEF KEMENKES

34 TAHUN MENGABDI

KEMENKES RI



REKAM JEJAK MASTERCHEF KEMENKES

Copy right © 2018, Kementerian Kesehatan RI

Penerbit : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Penanggung jawab : drg. Widyawati, MKM
(Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)

Ketua : Busroni, SIP
(Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat)

Sekretaris : Nani Indriana, SKM, MKM
(Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan)

Anggota : Faradina Ayu, S.I.Kom
Khalil Gibran Astorengga, ST
Indah Wulandari, Ss, M.Si
Didit Tri Kertapati, SH

Editor : A. Wahyu Kristianto, Rahadi Teguh Wiratama

Penulis : Siswanti Suryandari, Lintang Rowe,
Sugeng Sumaryadi

Desain : Dina Amalina

Illustrator : Haris Imron Armani, Dina Amalina

Kredit foto : Tim Liputan dan Dokumentasi Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat serta Satker di Lingkungan
Kerja Sekretariat Jenderal

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan semacam catatan biografi. Isinya mencakup kisah tentang perjalanan hidup dari seseorang yang meniti karir dari bawah. Bermula dari dokter PTT yang ditempatkan di wilayah pelosok ia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Itulah sedikit latar belakang sosok dr. Untung Untung Suseno Sutarjo M Kes. yang kini mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan untuk menarik pelajaran dari perjalanan dr. Untung. Suka dan duka sebagai orang bekerja di sektor kesehatan terekam dalam buku ini. Di dalamnya juga mencakup kiat dan upaya terobosan yang dilakukan di tengah-tengah rintangan dan keterbatasan yang dihadapi.

Perjalanannya sebagai seorang birokrat memang terbilang mulus. Apa lagi, proses perjalanan itu ia tempuh dari bawah. Pejabat eselon I ini sejak muda berpengalaman keluar-masuk hutan, menyusuri pantai dan menyeberangi sungai di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Terbiasa menghadapi tantangan yang berat dan selalu inovatif dalam menyiasati keterbatasan itulah yang menjadi intisari atau pesan yang ingin disampaikan buku ini ke khalayak.

Menjadi seorang birokrat dua dasawarsa yang lalu jelas berbeda dengan era reformasi dewasa ini. Tuntuan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis kini bukan merupakan musuh jajaran pemerintah, melainkan justru menjadi sumber energi yang memacu kinerja birokrasi. Ini

adalah gelombang sejarah yang tidak mungkin dihentikan. Tanpa terkecuali, Kementerian Kesehatan juga menghadapi arus baru ini.

Hukum besi sejarah memberikan pelajaran tentang sebuah kepastian: setiap era selalu berganti. Demikian pula generasi dr. Untung. Generasinya sebentar lagi akan diganti generasi baru yang lebih junior. Namun, layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sebagai perwujudan pesan konstitusi harus terus berjalan di tengah-tengah derasnya arus perubahan sosial.

Pengalaman dr. Untung dalam melayani masyarakat di wilayah terpencil bisa menjadi semacam inspirasi tentang kemauan dan sekaligus kepekaan sosial dari aparat negara terhadap lingkungannya. Kiat suksesnya di lapangan terletak pada kemampuannya "membaca" denyut kehidupan masyarakat. Kementerian Kesehatan sepertinya membutuhkan birokrat tipe ini dalam menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks.

Jakarta, 11 Oktober 2018

**Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI**

VI

KATA PENGANTAR

VIII

DAFTAR ISI

02

BAB I
DOKTER "KAMPUNG"
MASUK KOTA

- Bermula dari tempat parkir
- Mendobrak Kejumudan
- Katakan tidak pada korupsi
- Mampu menjaga hubungan

28

BAB II
TANGAN KANAN
YANG EFEKTIF

- Tak Gentar Hadapi DPR
- Memilih Jadi Administrator

44

BAB III
REVOLUSI MENTAL

- Ketika Perubahan harus terjadi
- Tanggalkan Baju Birokrat
- Gerakan Indonesia Melayani
- Berawal dari Morning Briefing
- Identitas Baru
- Lebih Baik Karena Perubahan
- Serbateknologi
- Para Pegiat Perubahan



72

BAB IV MENGEFEKTIFKAN BIROKRASI

- Tandatanganan digital
- Satu Data Kesehatan
- Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
- Program Legislasi Kesehatan Di Lingkungan Internal Kemenkes
- Fasilitasi Pengawasan Dan Penyidikan Bidang Kesehatan (Ppns)
- Monitoring Online
- Penguatan Regulasi
- Morning Briefing
- National Health Account

224

BAB VI

APA KATA MEREKA

- Hubungan Mencair Berkat Komunikasi Sekjen
- Pekerjaan Rumah Setelah Pensiun
- Pekerja Keras dan Penuh Komitmen
- Stunting yang Mempersatukan Dua Anak Manusia

98

BAB V

MEREKA BICARA

- Revolusi DAK Untuk Daerah
- Sekjen Harus Ada Solusi
- Lembut Tapi Tegas, Pengayom Dan Penjaga Ketertiban
- Pegawai Kemenkes Harus Sehat dan Profesional
- Visioner dan Paham "Untung" Rugi Diplomas Kesehatan
- Terus Memotivasi Agar Kami Terus Berdaya
- CARE (Clean, ACTION, responsible, empathy) Service
- Pusdatin Harus Jadi Lokomotif Kementerian Kesehatan
- Pemimpin Visioner dan Praktis
- Menyatukan Tim Untuk Menyuksesan JKN
- Kekuatan Pak Untung, Dia tidak Mau Berbisnis
- Mengawal Kesehatan Tamu Allah
- Kami di Seberang, tapi Kami juga Diperhatikan

242

PENUTUP

“

Menjadi seorang birokrat dua dasawarsa yang lalu jelas berbeda dengan era reformasi dewasa ini. Tuntunan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis kini bukan merupakan musuh jajaran pemerintah, melainkan justru menjadi sumber energi yang mengacu kinerja birokrasi ini.

BAB I

KEMENKES RI

“

Kembali ke kota kelahirannya, Untuk tidak dilirik, meski sudah berpengalaman sebagai kepala Puskesmas. Sama seperti yunior lain di masa itu, Untung harus memulai kerja dari nol.

KEMENKES RI

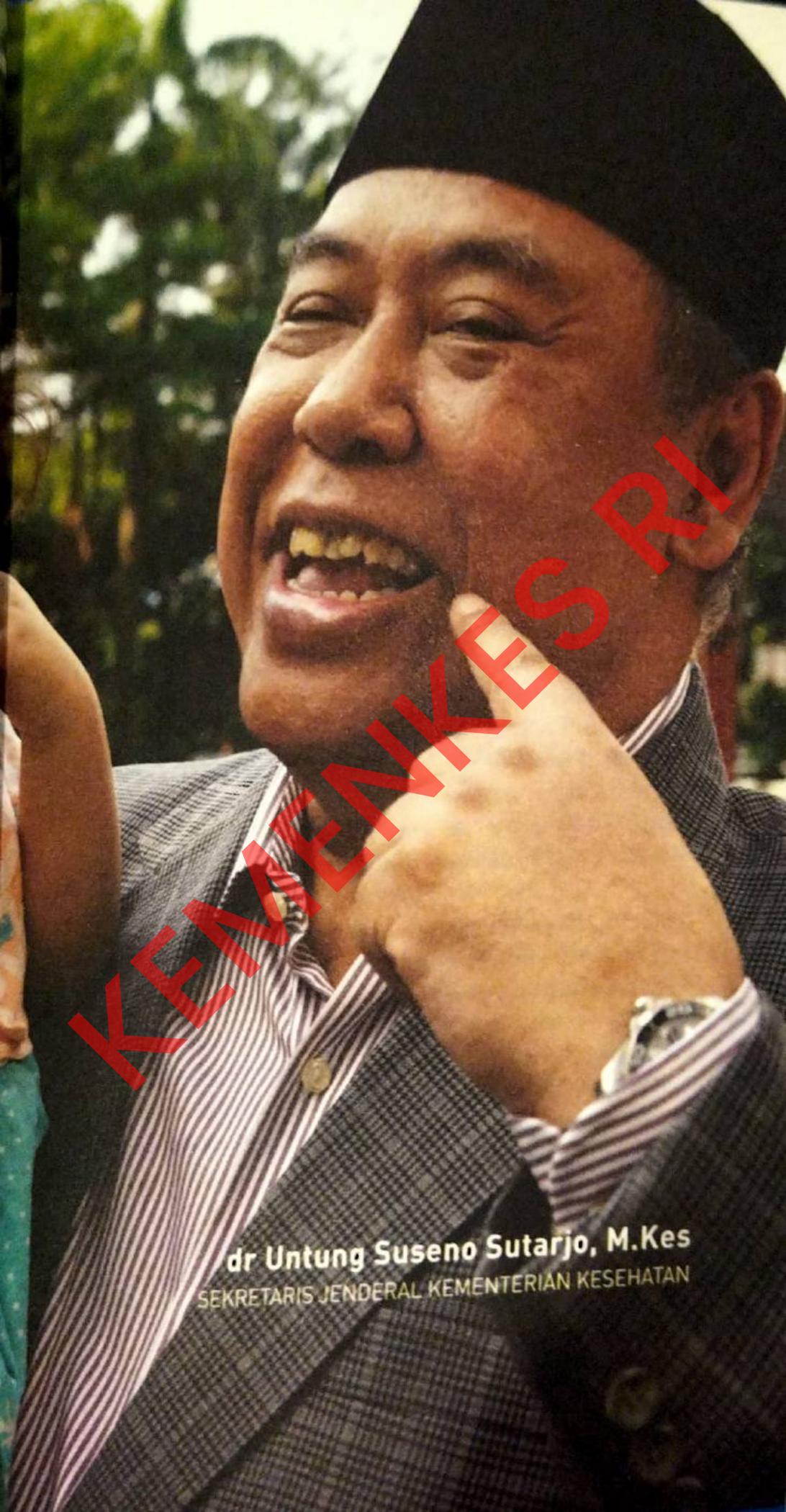
**DOKTER
"KAMPUNG"
MASUK KOTA**

KEMENTERIAN RI



DOKTER “KAMPUNG” MASUK KOTA

Kembali ke kota dimulai dari bawah.
Semua tidak tersedia diatas meja.



dr Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN



TAHUN 1990, seorang anak muda menjajal pekerjaan baru sebagai seorang staf Kementerian Kesehatan. Pria muda itu bernama Untung Suseno Sutarjo. Sebelumnya ia bertugas sebagai dokter umum di puskesmas di Kalimantan Barat.

Kembali ke kota kelahirannya, Untung tidak dilirik, meski sudah berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas. Sama seperti junior lain di masa itu, Untung harus memulai kerja dari nol.

"Jadi staf, saya harus mengerjakan semua pekerjaan. Mulai dari angkat komputer, menerima telepon, dan mengetik penugasan dari senior maupun pejabat di atas saya," papar dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes, saat disambangi di ruangan kerjanya, beberapa waktu lalu.

"Saya tidak mendapatkan informasi mengenai tugas saya, sehingga saya harus belajar sendiri dari arsip di kantor untuk mengetahui alur kerja," sambungnya.



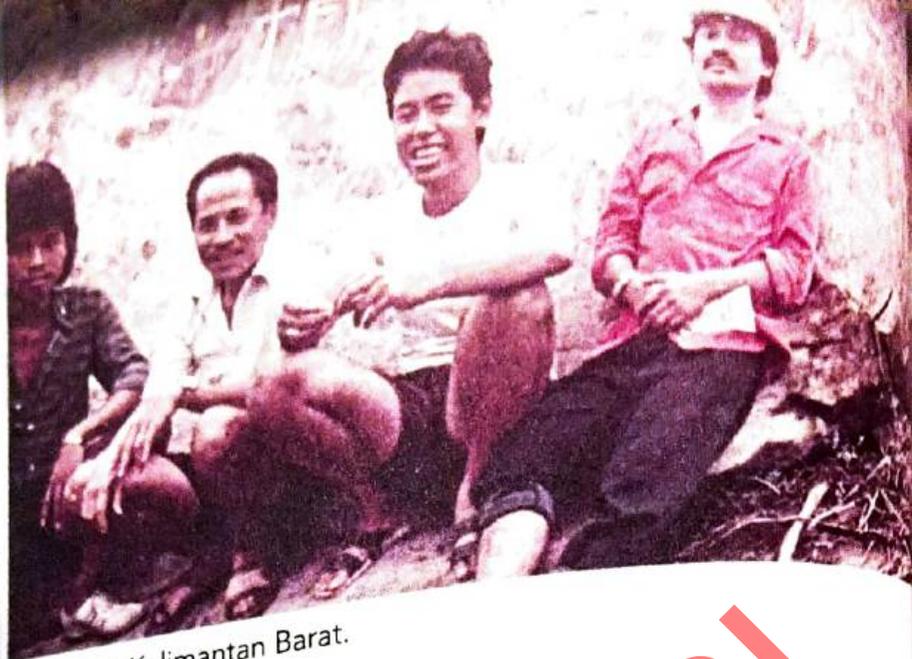
Serah terima jabatan Sekretaris Jenderal.

Untuk masuk ke Kementerian Kesehatan bukan perkara mudah. Untung mengaku harus menghadap pejabat eselon dua. Tanpa kenalan atau kerabat, hampir mustahil untuk masuk. Maklum saja di zaman itu, keputusan untuk menerima pegawai atau staf, meski posisinya jauh di bawah eselon 3 dan 4, tetap harus diketahui pejabat eselon dua. Untuk ditemui pun sangat sulit, layaknya seorang dewa.

"Sekarang, seorang staf kalau pindah tidak perlu atasan yang jauh disana sampai tahu, cukup bagian kepegawaian saja," tambahnya.

Ketika itu, Untung diterima menjadi staf di bagian PPL Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Sebagai orang baru dari kampung yang tidak tahu apa-apa dan tidak ada pula tempat bertanya. Untung mengakui dia tidak punya pengalaman dan ilmu untuk bekerja di direktorat itu. Tahun-tahun awal bekerja terasa sangat berat, karena merupakan daerah yang "basah" sehingga tidak ada yang ingin membagi atau membantu memberikan informasi tentang pekerjaannya.

Lahir di Jakarta 17 Oktober 1958, Untung menyelesaikan studi kedokterannya di Universitas Indonesia. Setamat dari kampus Salemba itu, ia bertugas di Kalimantan Barat, bersama isteri yang baru dinikasih sebulan sebelumnya, dr



Dokter terbang Kalimantan Barat.

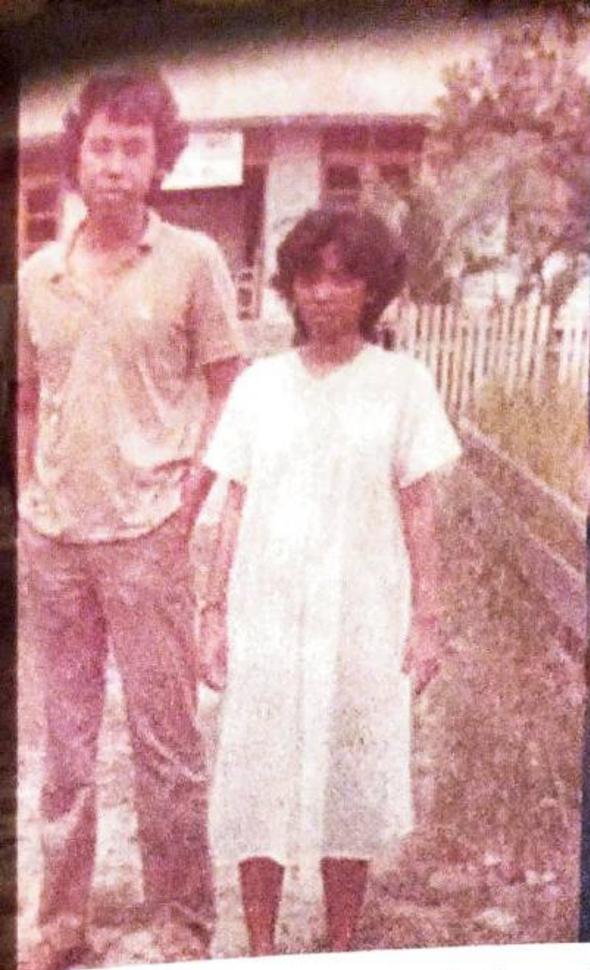
Lis Soerachmiati Mulya Soendoro, Setelah enam tahun mengabdikan di daerah, Untung pulang ke Jakarta. Tujuan awalnya, bersama Sang Istri untuk menjadi dokter spesialis.

Namun, nasib berbicara lain. Biaya yang besar untuk menjadi dokter spesialis, membuat pasangan suami istri itu harus membuat pilihan. Alhasil, sang istri yang akhirnya meneruskan pendidikan dan berhasil menyandang keahlian sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Sementara Untung memutuskan untuk mengambil jalur ke struktural.

Pilihan Untung terbukti benar. Ketekunan, kejelian dan jiwa inovatif Magister Kesehatan dari Universitas Gadjah Mada ini mampu membawanya mencapai puncak tertinggi karir seorang birokrat, yakni posisi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila F Moeloek SpM (K) mengaku tidak pernah kecewa dengan kerja tangan kanannya ini. "Pilihannya untuk menjadi birokrat di Kementerian Kesehatan sangat mulia, tidak lebih rendah dari pilihan seorang dokter untuk menjadi spesialis atau dokter yang bekerja di puskesmas."

Sejak 2014 silam, saat dipercaya menjadi Sekjen Kementerian Kesehatan, putra dari pasangan suami istri Imam Sutarjo dan Surilah Sutarjo ini, harus



Kiri: Dokter Puskesmas Paloh, Kanan: Dokter Muda dengan Sang Junior.

bertanggung jawab mengawal, mendorong, dan menjaga 14 eselon 2 di bawahnya. Di tangannya juga, kelangsungan 107 unit pelaksana teknis, mulai dari rumah sakit, balai laboratorium hingga bengkel, dipertaruhkan.

Dalam bekerja Untung mengaku tidak mau tanggung-tanggung. Prinsipnya semua selesai cepat dan tepat tanpa kurangi nilai keluaran. Berangkat dari rumahnya di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 06.00 WIB, ia sudah tiba di kantor setengah jam kemudian. Sebenarnya Untung mengaku ingin memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Namun, ia tak berdaya. Tamu sudah menunggu atau berkas telah menumpuk.

Dulu, ia pernah membawa berkas-berkas itu untuk dikerjakan di rumah. Namun, istri dan anak protes. Untung pun berusaha menyelesaikan semuanya di kantor tentunya dengan konsekuensi pulang malam. Hanya saja, tidak semua bisa ia bereskan di hari kerja. "Pada Sabtu dan Minggu, kadang anak buah memberi saya pekerjaan. Ya sudah, saya *kelarin* juga akhirnya berkas-



Kunjungan kerja ke puskesmas Paloh, Kalimantan Barat.

berkas itu di rumah," ungkap ayah dari Aganta Suseno Sutarjo S.Kom, MBA dan dr Agassi Suseno Sutarjo ini.

Setelah 28 tahun bekerja di Kementerian Kesehatan, banyak kenangan indah yang ia rasakan. Banyak pengalaman yang sudah ia tularkan, dan banyak canda dan tawa yang sudah ia lakukan bersama sejawat dan anak buahnya.

"Pak Untung selalu berpikir positif terhadap lawan bicaranya. Dia gampang diajak ngobrol," ungkap Subandi Sardjoko, teman diskusi Untung yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BERMULA DARI TEMPAT PARKIR

HARI pertama setelah dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, 29 Agustus 2014, dr Untung Suseno Sutarjo sadar harus banyak perubahan yang kudu ia lakukan. "Saya lihat banyak sumbatan, baik program, administrasi maupun soal lingkungan. Semua itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya."



Menyapa warga di sela-sela kunjungan kerja.

Salah satu yang di depan mata ialah fenomena ramainya lobi kantor Kementerian Kesehatan saat para karyawan datang dan pulang. Mereka antre untuk absen dengan menempelkan jari ke finger print. Semua kegiatan para karyawan di kantor ini harus dilakukan dengan cara antre. Selain absen, juga mengambil tas dan sepatu.

Tidak hanya lobi yang penuh, halaman kantor juga disesaki bus yang akan mengantar karyawan ke rumah mereka. Macet jadi pemandangan sehari-hari di kantor ini, pagi dan sore. Semua ingin tepat waktu. Datang tepat waktu, pulang juga.

Untung menyiasati satu per satu. Jika semula para karyawan itu membayar untuk mendapat jemputan dan antaran, Untung memutuskan bus dibayar kantor. Karyawan pun menyambut, karena bisa menghemat uang ongkos.

Cara itu terbukti bermanfaat. "Karena merasa terbantu tidak perlu membayar, mereka merasa mendapat perhatian. Mereka senang bekerja, dan mereka menurut pada aturan yang dibuat atasan," jelas Untung.



Mengunjungi tim Nusantara Sehat di Kalimantan Barat.

Soal absensi, mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini juga menerapkan kebijakan yang membuat anak buahnya bisa tersenyum. Jika sebelumnya mereka harus sudah absen sebelum pukul 07.00 WIB, telat satu detik tunjangan kinerja mereka dipotong. Aturan itu diubah. Untung memberi mereka toleransi satu jam, dan dihitung belum terlambat. Hati para karyawan pun makin berbunga.

Soal parkir bus juga diatur Untung. Ia melarang parkir bus dilakukan di halaman kantor Kementerian Kesehatan. Parkir bus harus dipindahkan ke kantor Percetakan negara. "Saya haruskan diparkir di gedung parkir," tegasnya..

Selain itu, Untung melakukan pengamatan di hari Sabtu dan Minggu, ditemukan banyak mobil yang dititipkan di halaman parkir, sehingga di hari kerja tidak bisa digunakan parkir oleh karyawan. Sehingga dibuat larangan menitipkan mobil di gedung parkir. Dengan ancaman bila melanggar akan diderek. Sebenarnya ini hal yang kecil, namun terbukti bermakna untuk mengentaskan masalah.

Alasan Untung, kebanyakan pegawai menggunakan mobil dinas. Dia tidak mau mobil negara itu rusak karena terus menerus dijemur di luar. "Saya juga mau mereka jalan kaki dari gedung parkir. Olahraga."

Di halaman kantor Kemenkes, Untung hanya memperbolehkan kendaraan milik tamu yang parkir. Itupun diatur secara ketat. Perempuan dan disabilitas mendapat kemudahan parkir dekat akses pintu. Sementara kaum pria mendapat parkir di sebelah kanan, paling jauh dari pintu masuk.

Masih mengenai parkir, ternyata lahan parkir masih penuh oleh tamu yang membutuhkan berbagai izin dari kementerian kesehatan. Pengurusan izin memakan waktu cukup panjang dan harus datang beberapa kali.

Untung pun bersiasat. Pengurusan izin bisa secara online, terlebih saat ini di era digital. "Jika mereka datang, beban kantor juga makin banyak, tempat parkir penuh, karena banyak pengunjung dan kendaraan numpuk. Setelah membereskan soal itu, kerja karyawan disini bisa agak tenang," tandas Untung.

Sebetulnya, semua masalah di kementerian Kesehatan mudah untuk ditangani, menurut Untung, asalkan menggunakan pendekatan yang benar. Ingat selalu kutipan dari Einstein, "pemecahan masalah tidak bisa dilakukan dengan pemikiran yang sama saat merumuskannya."

MENDOBRAK KEJUMUDAN

PENGALAMAN bekerja di puskesmas, di luar Pulau Jawa, membuat dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes memberi perhatian besar terhadap sarana kesehatan yang menjadi ujung tombak pemerintah. "Saya sudah berjanji, yang dulu tidak pas, kurang baik, akan saya perbaiki saat menjabat."

Banyak yang telah berubah menjadi baik tentunya, salah satu yang dulu tidak ada dan sekarang ada, pada saat Untung bertugas sebagai Kepala Biro Perencanaan dan anggaran, ialah dana bantuan operasional kesehatan, seperti BOS di sekolah. Dana ini sangat dibutuhkan puskesmas, karena puskesmas tidak pernah mempunyai dana operasional selain dana dari program. Akibatnya, puskesmas sulit melaksanakan tugas rutin yaitu promotif dan preventif.



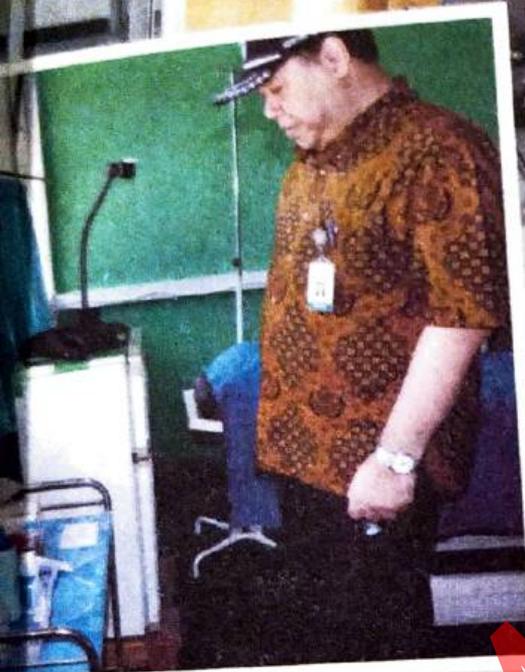
Kunjungan kerja ke Rumah Sakit Daerah.

Tidaklah mudah. Untung harus mengubah cara berpikir para pejabat di Kementerian kesehatan untuk mengerti pentingnya dana itu. Sampai-sampai harus menghadap ke Menteri Kesehatan untuk menjelaskannya.

Usahnya pun berbuah hasil. Ibu Menteri setuju. Para punggawa kesehatan di puskesmas pun bisa berlega hari. Mereka mendapat kucuran dana Rp100 juta-Rp250 juta per tahun untuk dana operasional. Tahun demi tahun, dana itu ditambah dan sekarang mencapai Rp300 juta-Rp400 juta per puskesmas per tahun.

"Dengan dana itu, mereka bisa menjangkau kampung-kampung terpencil untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah, dana operasional kesehatan yang dicairkan mulai 2010 membuat wajah puskesmas kita menjadi berbeda," lanjut mantan Kepala Biro Perencanaan dan anggaran Kementerian Kesehatan ini.

Jiwa administratur seorang Untung juga tergelitik, saat memperhatikan kinerja karyawannya. Ia pun mencapai kesimpulan bahwa kebanyakan karyawan Kementerian Kesehatan merupakan mantan orang lapangan, mereka banyak yang dahulu bertugas di puskesmas dan rumah sakit.



pindah masuk ke kantor. Kebiasaan mereka bekerja dulu belum bisa ditinggalkan. Kerja cepat, tapi *serabutan*. "Itu yang kita atur. Saya membawa mereka untuk melakukan perencanaan yang baik, membuat inovasi dan dianjurkan selalu menelurkan gagasan dan ide baru," tutur Untung.

Soal anggaran, ia mengaku tidak perlu menjadi pikiran. Dana tidak ada batasannya. Salah satu contoh, saat itu menelisik kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Untung mendapati untuk penyakit tertentu, anggaran yang disediakan jauh lebih kecil dari yang lain.

Saat ia bertanya, sang pejabat mengaku dananya kurang. Namun, Untung memecut dia dengan menyatakan yang penting penyakit itu hilang dari Indonesia, dana akan dikucurkan. Tapi, program yang dibuat harus benar-benar baik.

Untung juga tidak mau inefisiensi terjadi di lembaganya. Saat itu, ia melihat sistem informasi penyakit tuberculosis yang boros. Program berharga ratusan



Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

miliar rupiah itu tidak mempunyai sistem informasi yang baik, dimana hanya mencatat yang diobati secara program. Pasien di rumah sakit dan swasta belum tercatat. Padahal pasien yang berobat di rumah sakit juga harus masuk di data.

Alhasil, badan kesehatan dunia WHO menempatkan Indonesia juara kedua terbawah, karena menilai sistem administrasinya yang tidak beres. Sistem informasi tuberculosi hanya mencatat adanya 300.000 pasien yang berobat. Padahal berdasar perhitungan WHO jumlah penderita tuberculosi di Indonesia bisa mencapai 1 juta orang.

"Sebagai penanggung jawab data dan informasi, saya bisa masuk ke data rumah sakit dan puskesmas. Saya bongkar aturannya, sehingga program itu akhirnya bisa digunakan bersama. Sekarang, kita sudah mencatat penderita TB yang mendapat penanganan sudah lebih dari 700 ribu orang," tambah lulusan SMA Kolese Kanisius, Jakarta ini.

Dia pun makin yakin, sebagai kepala kantor tugasnya tidak hanya membuat anak buah bekerja dengan baik. Ada manajemen yang harus diperbaiki, juga



langkah-langkah untuk mengintegrasikan program-program yang ada. Itu penting sekali.

Untung mengajak para staf dan pejabat bekerja tahap demi tahap. Selalu mulai dari yang terkecil. Mulainya dari mengurai masalah yang kemudian diselesaikan sesuai prinsip manajemen. Aksi dijalankan setelah melakukan perencanaan dengan baik. Sesudah itu, tentu saja kontrol yang melekat.

Dalam banyak kasus, Untung mengaku harus memperbaiki lebih dulu keadaan yang membuat para pejabat dan staf tidak bisa bekerja. Masalah diretas satu demi satu.

"Satu contoh ketika seorang staf menyatakan masih adanya penyakit patek yang berkembang di masyarakat. Penyakit karena lingkungan yang buruk di wilayah miskin itu sebenarnya bisa hilang, mudah diobati," jelas Untung.

Dia pun mendorong dan membangkitkan semangat para staf di semua unit untuk bergerak. Soal anggaran, tidak ada masalah. "Saya ini kan pernah duduk di Biro Perencanaan. Saya tahu yang harus ada lebih dulu bukan

Orientasi P11111 dan Kegiatan
Saka Bhakti Husada Tingkat Nasional
Cibubur, 17 Oktober 2015



Bersama tim Saka Bhakti Husada di Cibubur.

anggarannya, tapi programnya. Bikin program dulu yang bermanfaat untuk masyarakat, karena uang bukan masalah," tandas Untung.

Selama satu tahun terakhir, Kementerian Kesehatan mendapat kurangan anggaran mencapai Rp59 triliun. Meski tidak sebesar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapat guyuran dua kali lipatnya, namun Kementerian Kesehatan bisa berbuat banyak.

"Banyak program-program kesehatan yang sudah dilakukan. Kami juga melakukan terobosan dalam hal dana alokasi khusus untuk pembangunan rumah sakit dan puskesmas," jelasnya.

Dulu, besaran DAK terserah Menteri Keuangan. Untung pun meminta bisa diikutikan dalam proses penganggaran DAK. Banyak rumah sakit dan puskesmas terbangun dengan cara itu.

Belum lama duduk di kursi Sekretaris Jenderal, mantan Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat ini juga terusik oleh hendak diterbitkannya soal aturan akreditasi rumah sakit. Ada keinginan bahwa rumah sakit harus mengantongi akreditasi internasional dan nasional.



Padahal, undang-undang hanya menyatakan rumah sakit hanya harus terakreditasi. "Aturan itu akan membuat banyak rumah sakit sibuk mengurus proses akreditasi sepanjang tahun, padahal mereka dibutuhkan untuk mengelola rumah sakit. Manajemen rumah sakit juga harus menyiapkan dana yang tidak kecil," tambahnya.

Untuk proses akreditasi internasional dan dalam negeri kalau keduanya harus dilaksanakan bersama dibutuhkan waktu tidak kurang dari 3-4 tahun. Kondisi itu akan membuat rumah sakit tidak bisa segera bekerja memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.



Penandatanganan kerja sama (MOU) dengan para Bupati.



Lokakarya PIS-PK di DI, Yogyakarta.



Penghargaan WTP oleh Wapres RI kepada Sekjen Kemkes.

Untung memutuskan rumah sakit cukup mendapat satu akreditasi. Bebas saja, lokal atau internasional. Efisiensi harus dilakukan, inefisiensi di rumah sakit harus dihilangkan.

Cerita yang sama juga terjadi atas kebijakan imunisasi meningitis yang harus dilakukan untuk calon haji dan jemaah umroh yang hendak ke Tanah Suci. Ketika itu, vaksin harus diadakan oleh Kementerian Kesehatan, karena imunisasi hanya bisa dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Meski Kita tahu semua dokter bisa menyuntik, aturan mengharuskan Kementerian Kesehatan yang melakukannya. Kemenkes juga menjadi satu-satunya pemberi vaksin jenis itu. Antrian warga yang minta divaksin pun



Penekanan bersama sirine pelatihan PPHI 2016.

mengular di sekitar Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kementerian Kesehatan juga harus mengeluarkan dana besar, mencapai Rp400 miliar per tahun untuk membeli vaksin. "Kita harus pro rakyat, harus empati, pelayanan masyarakat harus dipermudah dan jangan dimonopoli serta antrian harus dihilangkan," katanya sekarang imunisasi dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan dimana saja hanya saja International Certificate of Vaccination (ICV) harus dibeli.

Mantan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan ini menggebrak. Aturan dilonggarkan. Semua dokter dan semua rumah sakit boleh memberikan imunisasi meningitis. Mereka juga bebas membeli vaksin sendiri. Kemenkes hanya berwenang mengeluarkan sertifikat (ICV) saja.

Hasil kerja Kementerian Kesehatan dan petugas kesehatan ini sempat menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Pada suatu hari, Kepala Negara memanggil Menteri Kesehatan Prof Nila.

Presiden meminta apa yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan dan prestasi kementerian ini diumumkan ke publik. Prof. Nila dan Untung sepakat membentuk unit sendiri untuk melakukannya. "Unit ini tidak hanya



bekerja sebagai humas. Lebih dari humas, mereka harus membentuk citra baik Kementerian Kesehatan," tandas Untung.

KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI

PERTAMA kali datang ke kantor di Jalan HR Rasuna Said X-5, Kuningan, Jakarta Selatan, Menteri Kesehatan Prof. Dr dr Nila F Moeloek SpM (K) memanggil semua anak buahnya. Seluruh karyawan dari eselon 1 sampai 4 dikumpulkan di satu ruangan.

Kala itu, Prof Nila menegaskan selama dia menjadi nakhoda tidak boleh ada gratifikasi, karena itu bagian dari korupsi. Tidak hanya untuk para pejabat dan staf, Ibu Menteri juga menolak semua bentuk gratifikasi.

Ketegasan Sang Menteri, membuat Untung lebih bersemangat dalam bekerja. Ia pun ketat mengawasi aparat Kementerian Kesehatan. "Sejak Bu Nila, Alhamdulillah semua berjalan aman. Kalau pun ada yang ditangkap karena kasus korupsi, itu anggaran masa lalu. Sisa-sisa yang lama."

Sebenarnya Untung sendiri sudah berusaha menghilangkan praktik itu ketika dipercaya memegang jabatan Kepala Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada 2012. Saat itu, ia memasukkan kurikulum antikorupsi untuk peserta pelatihan dan mahasiswa.

Para mahasiswa, aku Untung, sudah banyak tahu bahwa korupsi itu buruk dan melanggar hukum. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa gratifikasi merupakan bagian dari korupsi.

"Ketika Anda mengirim makanan ke dosen dan itu membuat sang dosen tidak bisa berpikir obyektif terhadap Anda, itu gratifikasi. Itu korupsi," jelas Untung berkali-kali.

Kurikulum yang dibuat dan diajarkan mantan Direktur Bina Kesehatan kerja itu ternyata sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mengakui kurikulum itu bagus untuk terus diajarkan kepada calon tenaga kesehatan di Politeknik kesehatan.

Dalam posisi Sekretaris Jenderal dan guna mengejawantahkan keinginan Menteri Kesehatan menciptakan wilayah bebas korupsi dan melayani, Untung memelopori lahirnya moto "Jaga Diri, Jaga Teman, Jaga Kementerian Kesehatan". Jika satu orang korupsi, maka seluruh kementerian akan mendapat nama buruk. Moto inipun terus didengungkan setiap apel pada Senin pagi.

Hasilnya memang sudah bisa dinikmati saat ini. Dalam lima tahun terakhir predikat wajar tanpa pengecualian disematkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Kementerian Kesehatan.

Dengan memanfaatkan teknologi, Kementerian Kesehatan mampu mendapatkan pegawai yang taat hukum dan aturan. Dipelopori oleh Untung yang mengumpulkan sejumlah ahli saraf, ia meminta mereka untuk membuat piranti bernama *Executive Brain Assessment (EBA)*. Piranti ini merupakan tes identifikasi potensi otak individu yang dilakukan secara komputersasi. Berhasil.

Piranti ini kemudian digunakan pada proses rekrutmen pegawai. Dengan mengikuti tes, setiap orang bisa diketahui potensi, intelegensia, *passion*, termasuk kecenderungan untuk menyeleweng dalam tugas, alias koruptif, juga potensinya menjadi penganut radikalisme. Hasil tes akan membuat atasan bisa



Peringatan HLUN 2016 di Senayan Jakarta.

cepat mendapatkan orang dengan kriteria tertentu untuk jabatan yang sedang kosong.

Untung memelopori penggunaan EBA di Kementerian Kesehatan. Saat tahu kemanfaatan piranti itu, KPK mendukung hal yang sama dilakukan kementerian lain. "Saat ini, setiap kementerian sudah meminta tes serupa untuk para pejabat mereka," jelas Untung.

Pembenahan mental juga harus didukung lingkungan kerja yang kondusif. Di tangan Untung, gedung Kementerian Kesehatan ditata. Ruang kerja ditempatkan banyak kaca, mencitrakan keterbukaan dan transparansi.

Keamanan juga menjadi fokus utama pembenahan mental. Tamu dilarang masuk jauh ke ruangan kerja. Mereka cukup berada di lobi, ruang tamu dan ruang rapat terbuka. "Kami menghindarkan pertemuan antara pejabat di Kementerian



Gedung Kementerian Kesehatan

ini dengan orang tertentu hanya berduaan saja," jelas mantan Kepala Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ini.

MAMPU MENJAGA HUBUNGAN

SEBAGAI lembaga negara, Untung meyakini Kementerian Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan dengan badan-badan lain harus dilakukan dan berjalan harmonis.

Dengan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, komunikasi dijalankan Pak Sekjen ini dengan cara yang luwes, namun tegas. "Dengan DPR, kami sadar harus bisa menjaga komunikasi. Mereka yang menentukan anggaran kami," aku Untung.

Karena itu, saran baik dari DPR sangat diperhatikan. Dalam setiap rapat kerja, ada 42 anggota DPR yang harus dihadapi Untung. "Kalau ada yang marah, ya kami diam saja. Kami berusaha memahami kenapa marah. Kami harus mampu membuktikan bahwa kami benar. Sepanjang saran mereka bisa kita ikuti dan itu benar, kita ikuti. Kalau kita yakin benar, kita sampaikan dan terbukti mereka

bisa mengerti kok. Kalau belum apa-apa kami menentang, tentu hasilnya bisa berbeda sekali," tandas Untung.

Hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terjaga baik. Semua saran para auditor diikuti dan diperhatikan. "Meraka yang memeriksa kok. Kita tidak bisa meminta harus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Karena merekalah yang memeriksa. Dulu, pernah ada unit yang diperiksa *ngotot*, karena merasa benar. Tugas kami mencari kebenaran sesuai aturan. Ternyata setelah ada penjelasan ada titik temu, harus diakui banyak masukan dari BPK yang bermanfaat bagi kita," kisah Untung.

Yang paling berkesan ialah jalinan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat Kementerian Kesehatan berusaha menertibkan aset-aset lahannya, KPK menyambut dan membantu. Kala itu, Untung bermaksud mengambil kembali lahan milik rumah sakit jiwa di Bogor, yang sudah berbentuk lapangan golf. Lahan bisa jatuh ke tangan seorang pengusaha, yang menyewa lahan itu tapi enggan mengembalikannya.

Bersama pejabat dari Kementerian Kesehatan, KPK mendatangi sang pengusaha. "Hanya sekali datang, lahan akhirnya dikembalikan ke Kementerian Kesehatan," jelas mantan Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar ini

Kenangan manis, namun berakhir pahit, juga dirasakan Untung saat bersentuhan dengan Gubernur DKI Jakarta. Terkait dengan aset tanah dan gedung milik Kementerian Kesehatan yang ditempati Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Karena bersentuhan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, utusan dari Kementerian Kesehatan menemui gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah dijelaskan masalahnya, Ahok mengerti dan mendukung.

Namun, saat proses mengembalikan aset itu berlangsung, Ahok kalah dalam pilkada. Gubernur penggantinya ternyata mementahkan arahan pejabat sebelumnya. Ia meminta perkara itu ditunda. "Gedung itu dipinjam sejak 1970-an, dan lupa dikembalikan. Kami sedang menyiapkan jalur litigasi, ke pengadilan," tandas Pak Sekjen.

“

Ketika Anda mengirim makanan ke dosen dan itu membuat sang dosen tidak bisa berfikir terhadap Anda, itu gratifikasi. Itu korupsi,” jelas untung berkali kali.

KEMENKES RI

BAB II

KEMENKES RI

“
Kepada seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan, saya selalu mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan baik, giat dan bersih. Kerja kita mulia, luar biasa mulianya, karena kita berupaya menehatkan manusia. **Prof. DR. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM (K)**

**TANGAN
KANAN
YANG EFEKTIF**

KEMAJALISRI

TANGAN KANAN YANG EFEKTIF

Keputusan sang menteri untuk mempertahankan Untung sebagai Sekjen tidak meleset. Kerja keras, kerja efektif dan kerja bersih dilakukan sang sekjen hingga masa purnabaktinya tiba.

Prof. DR. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM (K)
MENTERI KESEHATAN



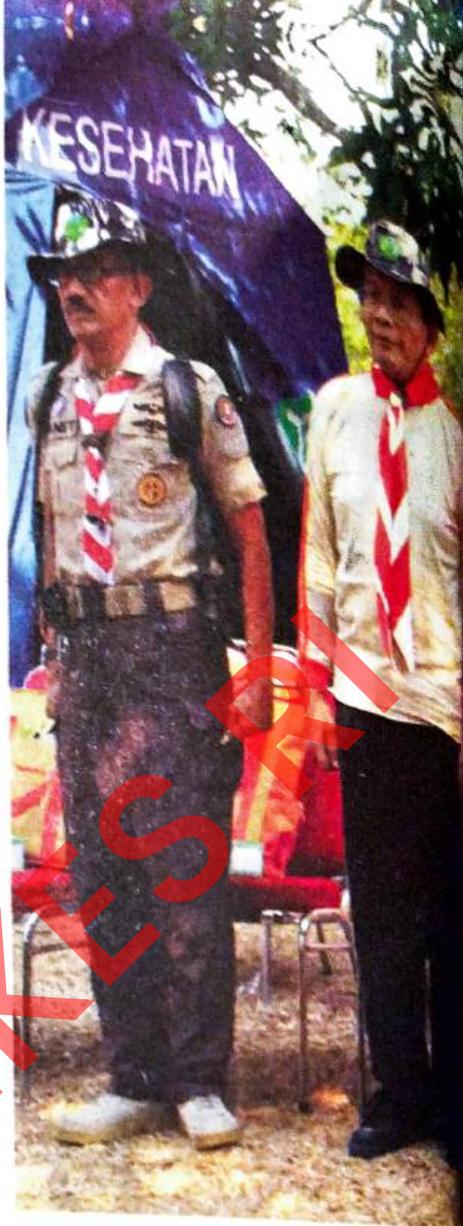
SAAT dilantik untuk menduduki kursi panas sebagai Menteri Kesehatan, Prof Dr dr Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM (K), Senin, 27 Oktober 2014, menyadari beban yang ia emban tidak ringan. Namun, dia tidak sendiri, karena pada hari yang sama ada 33 menteri yang juga diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menyandang beban yang kurang lebih sama.

Banyak jenis masalah kesehatan yang masih harus dibenahi di Tanah Air. Satu versi menyebutkan setidaknya ada tiga masalah yang harus dituntaskan segera, yakni soal kasus tuberculosis yang tidak pernah turun, soal *stunting* akibat gizi buruk dan kasus vaksinasi yang sering terbentur kendala.

Versi lain menyebutkan ada enam masalah utama kesehatan yang harus dibenahi. Dari mulai kematian ibu melahirkan, kematian bayi, balita dan remaja, serta gizi buruk. Selain itu ada soal meningkatnya penyakit menular, penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan jiwa.

Namun, ternyata di mata Presiden Joko Widodo masalah kesehatan lebih banyak lagi. Kepala Negara menyampaikan 10 pesan kesehatan saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional, pada 28 Februari 2017 di Jakarta. Pesan itu tidak hanya ditujukan kepada aparat pemerintahan dan petugas kesehatan, tapi juga untuk masyarakat.

Selain masalah kesehatan sendiri, seperti soal gizi, angka kematian ibu, penyakit menular hingga gerakan hidup sehat dan penghentian merokok,





Orientasi PHBS dan Kepramukaan bagi Pimpinan Saka Bhakti Husada.

Jokowi juga menggaris bawahi soal sinergitas antar kementerian, manajemen anggaran pusat dan daerah, serta reformasi birokrasi.

"Karena itu, kepada seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan, saya selalu mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan baik, giat dan bersih. Kerja kita mulia, luar biasa mulianya, karena kita berupaya menyetatkan manusia," ungkap Prof Nila, saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.

Berkali-kali dan berulang-ulang kalimat itu ia paparkan kepada jajaran Kementerian Kesehatan, di Jakarta dan di daerah. Hasilnya, Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengaku bisa berlega hati karena mendapat dukungan dari para pejabat dan karyawan di Kementerian Kesehatan, terutama Sekretaris Jenderal Kemenkes dr Untung



Bersama tim Flying Health Care di Asmat.

Suseno Sutarjo M Kes. Dalam banyak hal, terutama menyangkut kebijakan umum kementerian, Menkes kerap mendiskusikannya dengan Untung selaku Sekjen.

Menkes juga kerap mendiskusikan perencanaan anggaran kementerian dengan Untung. "Bersama Pak Untung, kami merencanakan anggaran. Kami rencanakan betul-betul, supaya tidak jadi permainan pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan semata," tuturnya.

Dia juga terus menerus menguatkan dan mengingatkan tangan kanannya itu untuk bekerja dan bertindak lurus. "Saya selalu mengatakan pada Pak Untung bahwa kita punya keluarga. Kita bukan kita sendiri. Kita juga berkewajiban menjaga nama baik Kementerian Kesehatan," tandasnya.

TAK GENTAR HADAPI DPR

KESAN mendalam Menteri Kesehatan terhadap Untung Suseno Sutarjo terjadi saat Sekjen Kementerian Kesehatan itu harus menghadapi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketegasannya sangat kentara ketika berbicara di depan para penghuni gedung megah di Senayan itu.

"Pak Sekjen memperlihatkan ketegasannya, saat ia harus mempertahankan prinsip soal aturan, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, dan upaya penyehatan masyarakat. Saya pernah melihat sendiri dia marah, saat hal-hal yang prinsipil itu diusik," ungkap mantan Utusan Khusus Presiden Republik



Indonesia untuk *Millenium Development Goals* (MDGs), pada periode 2010-2014 ini.

Ketegasan seorang Untung membuat Prof Nila merasa sangat beruntung. Untung memang sosok yang diandalkan oleh Kementerian. "Pak Untung itu menjadi barisan terdepan Kementerian Kesehatan saat harus menghadapi DPR. Kalau sekjen saya lunak. wah bisa repot. Untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Untung. Saya yakin orang yang baru bertemu dengannya akan langsung segan, karena melihat perawakan tubuhnya yang besar," tambah Bu Menteri, sambil tertawa.

Dukungan Untung, juga dirasakan Prof Nila, saat ia bermaksud mengintegrasikan semua bidang dan unit yang ada di Kementerian kesehatan. Awalnya, yang ia lakukan tidak lama setelah memimpin Kementerian Kesehatan itu terbukti tidak mendapat banyak halangan yang berarti.

"Saat itu, saya melihat kelemahan di Kemenkes ialah soal integrasi antarunit. Berdasar pengalaman yang saya dapat saat duduk di MDGs, visi kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan, dan itu terkait masalah sumber daya manusia. Kalau itu tidak terintegrasi dengan baik, hasilnya tidak akan jadi baik," ujar perempuan kelahiran Jakarta, 11 April 1949 itu.

Sekjen Kementerian Kesehatan menyambut gagasan itu dengan menggelar pertemuan antarinstansi di Bogor. Kementerian Kesehatan berbicara bersama



Ibu Menkes mengunjungi warga Asmat.

Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah kementerian lain.

Salah satu pokok bahasannya ialah upaya untuk menurunkan angka malnutrisi atau gizi buruk. Untuk itu, menurut Prof. Nila, perlu dilibatkan Kementerian Pertanian menyangkut soal ketahanan pangan. "Bagaimana jika terjadi kemarau panjang. Pertanian perlu dilibatkan untuk mengantisipasiinya."

Selain pasokan makanan, dia juga menyebut pentingnya keterlibatan perempuan, karena merekalah yang berperan mendidik anak untuk makan dengan baik. Kaum ibu juga perlu ketahanan pangan yang baik. Selain itu, ibu dan anak juga perlu lingkungan yang baik, sehingga asupan gizi anak dan ibu dapat tercukupi.

Prof. Nila Moeloek merasakan sokongan besar Untung Suseno saat ia menggagas para dokter muda yang diharuskan terjun ke daerah.

Prof. Nila juga merasakan sokongan besar Untung Suseno saat ia menggagas para dokter muda yang diharuskan terjun ke daerah. Langkah itu untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo yang meminta para dokter harus berada di pinggiran.

"Saya punya pengalaman saat menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs. Kami menggagas dan melaksanakan program Pencerah Nusantara, suatu gerakan inovasi sosial untuk layanan puskesmas," terang istri Prof. Faried Anfasa Moeloek, Menteri Kesehatan era Kabinet Reformasi Pembangunan ini.

Gayung bersambut. Program Nusantara Sehat bisa dirasakan masyarakat. Mereka tertolong karena bisa dengan mudah berobat dan mendapat edukasi soal kesehatan, sehingga perilaku kesehatan mereka pun berubah menjadi lebih baik.

Keberhasilan program itu membuat Prof. Nila dipanggil Presiden Joko Widodo pada Juli 2017 silam. Kepala Negara meminta Menteri Kesehatan tidak memendam keberhasilan program dan prestasi yang sudah diraih. "Itu harus dikeluarkan, dikomunikasikan kepada masyarakat," pesan Presiden.

Keinginan Presiden dijalankan Prof. Nila. Pelaksanaan program tersebut diumumkan kepada publik. Alhasil, peserta program Nusantara Sehat pun tidak



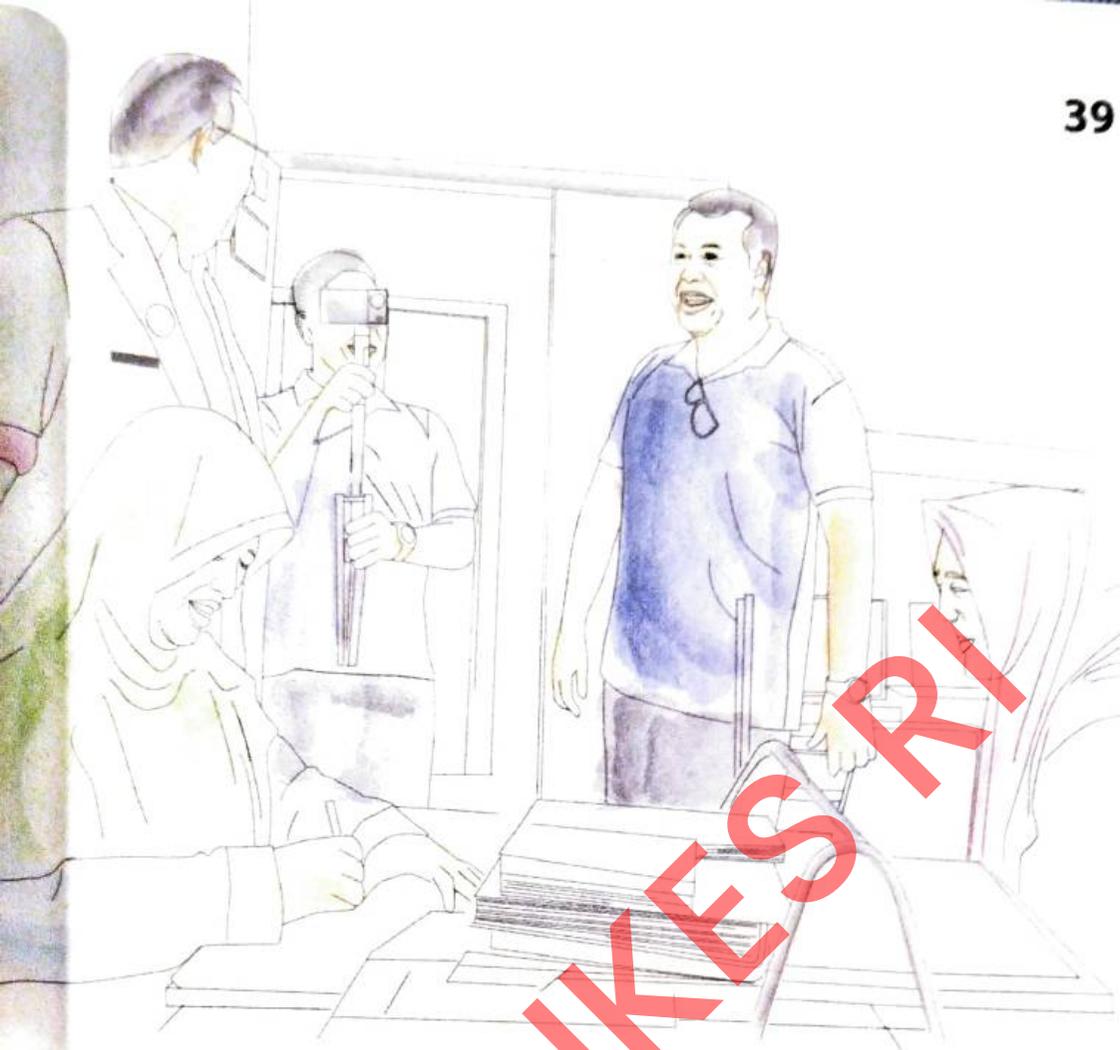
Puncak peringatan HKN ke-52 tahun 2016.

pemah surut. "Sampai sekarang sudah 10 gelombang dokter yang kami kirim untuk program ini ke daerah terpencil, perdesaan dan perbatasan. Urusan payung hukum program ini, Pak Sekjen yang menanganinya, termasuk saat harus menjelaskannya kepada DPR," tambah ibu tiga anak ini.

MEMILIH JADI ADMINISTRATUR

MESKI tidak terlalu akrab, Prof. Nila sudah mengenal Untung Suseno sebelum berkantor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pertemuan mereka terjadi di Rio de Janeiro, Brazil beberapa tahun yang lalu.

Ketika itu, Presiden melarang para menteri ke luar negeri. Prof. Nila diutus sebagai spesialis MDGs atau utusan khusus Presiden. Di dalam rombongan itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia. "Saat itulah interaksi pertama saya dengan Pak Untung. Saat datang ke Kemenkes, kami kembali bertemu," jelasnya.



Selain Untung, Prof. Nila juga bertemu dengan teman-teman lamanya, seperti Prof. Tjandra Yoga Aditama dan Prof. Akmal Taher. Saat itulah, ia merasa para pejabat dan staf di Kementerian Kesehatan sudah menjadi satu kesatuan. "Saya kenal beliau, dan para beliau juga mengenal saya. Saya berjanji tidak akan mengganti mereka," lanjutnya.

Namun, Prof. Nila meminta jika terjadi sesuatu, misalnya ada yang bertindak negatif, orang yang bersangkutan harus rela mundur diri atau pindah tempat. "Saya tekankan, kita sama-sama menjaga Kementerian Kesehatan ini, agar menjadi kementerian teknis yang hanya berkonsentrasi pada pembangunan kesehatan. Tidak boleh macam-macam," tegas Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia ini.

Keinginan sang menteri direspon positif. Kementerian Kesehatan menjadi salah satu kementerian yang menerapkan *e-governance* dalam setiap program dan



Kunjungan kerja Menkes dan Sekjen ke Kalimantan Barat

proyek yang digelar. "Dulu, maaf ya. Banyak pengusaha yang datang, mulai dari farmasi hingga alat-alat kesehatan. Kalau tergodanya, bisa saja kita naikkan harga. Namun, kami kukuh, tidak bisa, kami fokus pada pekerjaan," tegas Prof Nila.

Selama empat tahun bekerja sama dengan Untung Suseno, dokter lulusan Universitas Indonesia itu, mengakui wawasan sang Sekjen yang luas. Maklum saja, sebagai pejabat karir, Untung pernah menduduki posisi hampir di semua lini, termasuk di biro perencanaan dan staf ahli menteri.

Berkaca kepada kemampuan dan pengalaman Untung, Prof. Nila selalu berpesan kepada para stafnya untuk tidak takut menghadapi rotasi dan mutasi. "Jangan pernah sedih ketika dimutasi. Itu bisa menambah ilmu. Berubah posisi dibutuhkan, ketika suatu saat diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu. Pak Untung sudah membuktikannya. Itu menjadi kelebihanannya," paparnya.

Soal pilihan Untung menjadi birokrat dan tidak berkarier sebagai tenaga kesehatan, Prof. Nila bisa memakluminya. "Pilihan Pak Untung itu mulia. Sama seperti pilihan para dokter yang mengabdikan langsung ke masyarakat," kata Menkes.



Menkes ikut serta dengan karyawan kantin cara mencuci tangan

Prof. Nila menjelaskan ada tiga opsi yang bisa dipilih seorang dokter setelah lulus kuliah. Yang pertama melanjutkan studinya menjadi dokter spesialis, kedua bekerja di puskesmas dan ketiga mendalami administrasi dengan bekerja di dinas kesehatan atau pemerintahan.

Di mata Menkes ketiga opsi itu sama nilainya. "Tidak ada yang lebih rendah dari ketiganya. Saya lihat Pak Untung juga tidak memikirkan itu. Padahal, tidak tertutup kemungkinan dia bisa jadi spesialis, seperti istrinya, seorang dokter spesialis kulit. Apalagi Pak Untung juga punya pengalaman menjadi dokter di puskesmas," paparnya.

Dari paparannya tentang sosok dr. Untung, Menkes tampak mengapresiasi kinerjanya selama ini. Itu sebabnya, ketika Prof. Dr dr Nila Moeloek ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan, ia memilih untuk tidak mengganti dr. Untung sebagai Sekjen. Menteri membutuhkan dukungan dr. Untung untuk membawa institusi ini lebih maju.

Pilihan Menteri Nila untuk mempertahankan dr. Untung ternyata tidak meleset. Di tangan dr. Untung kebijakan-kebijakan yang digariskan Prof. Nila

“

Dengan Posisi Sekjen, Untung mampu menjalin hubungan dengan banyak orang dan bisa bekerja sama dengan WHO, memikirkan kesehatan secara global.

dapat diterjemahkan ke dalam implementasi. Kini, Kementerian Kesehatan tergolong instansi pemerintah yang banyak meraih prestasi.

Di sisi lain, dengan pilihannya menjadi seorang birokrat karir, Untung membuktikan bahwa dia bisa berkontribusi dalam pembangunan di sektor kesehatan, meski ia tidak lagi menjabat sebagai dokter yang langsung melayani masyarakat. Ia memilih melayani masyarakat dengan caranya sendiri.

Dengan wawasannya yang luas, ia akhirnya dipercaya menduduki posisi sekjen. “Dengan posisinya itu, ia mampu menjalin hubungan dengan banyak orang, termasuk di luar negeri. Pak Untung bisa bekerja sama dengan WHO, memikirkan kesehatan secara global. Saya, sebagai spesialis, hubungan saya sempit, fokus, hanya dengan dokter mata saja,” seloroh Menteri.

Meski merasa berat melepas Untung Suseno yang akan memasuki masa purnabaktinya, Menteri Kesehatan berharap sekjen yang akan menggantikannya juga seperti Untung. “Beliau mampu berada di depan untuk diikuti para pegawai lain di belakangnya. Ke depan, tugas kami masih banyak membangun rumah sakit dan puskesmas, sekaligus menjaga birokrasi yang efisien dan bagus,” pungkas Menteri.

ALAT PENYARING UDARA SEDERHANA



ALAT PENYARING UDARA SEDERHANA

KEMENKES RI

“
Soal pilihan Untung menjadi birokrat dan tidak berkarir sebagai tenaga kesehatan, Prof. Nila bisa memakluminya “Pilihan Pak Untung itu mulia. Sama seperti pilihan para dokter yang mengabdikan langsung ke masyarakat.”

KEMENKES RI

BAB III

KEMENKES RI

“

Celah gratifikasi dihindari mulai dari perubahan pelayanan publik. Pengurusan surat izin, seperti Surat Tanda Registrasi bagi dokter, misalnya, dilakukan secara online

KEMRI

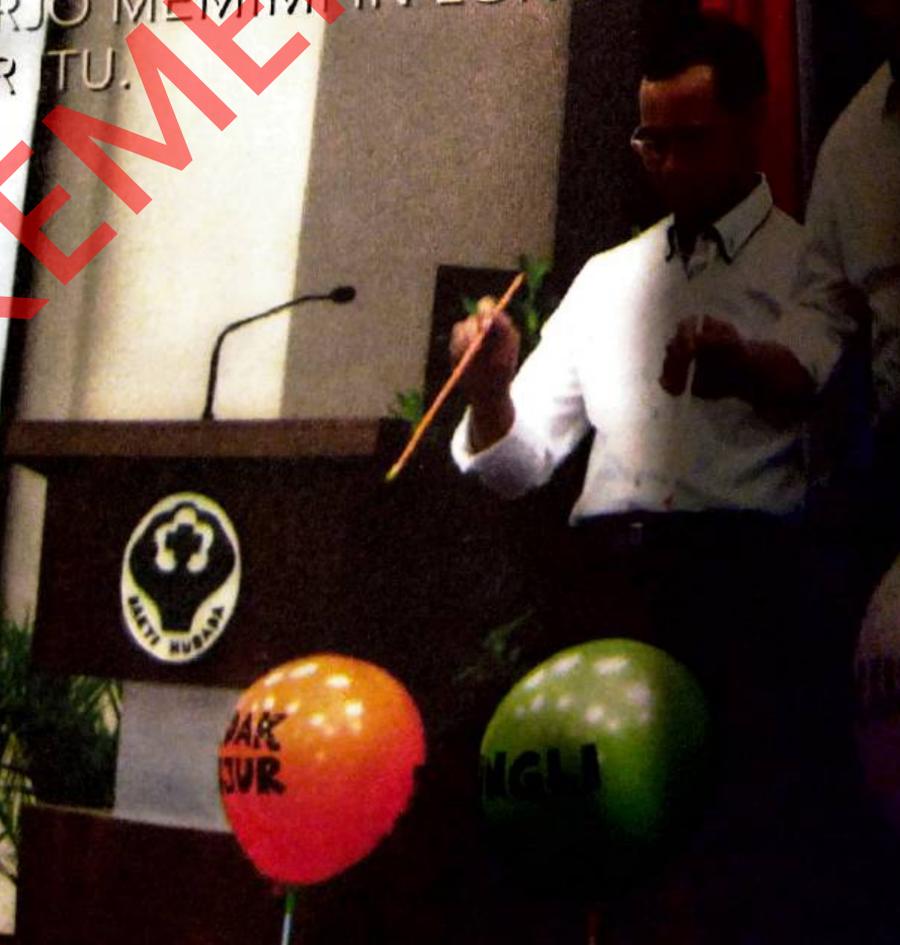
REVOLUSI MENTAL

KEMENKES RI

KETIKA PERUBAHAN HARUS TERJADI

KORUPTIF, INEFISIENSI DAN MINTA
DILAYANI MENJADI PENYAKIT DI
BANYAK KANTOR PEMERINTAH. DI
KEMENTERIAN KESEHATAN DUET
MENTERI PROF NILA F MOELOEK
DAN SEKJEN UJUNG SUSENO
SUTARJO MEMIMPIN LONCATAN
BESAR TU.

KEMENTERIAN KESEHATAN





KEMENKES RI

OTISME

GRATIFIKASI

SEHARI setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo bersama 33 menteri Kabinet Kerja lainnya, Prof Nila F Moeloek mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes. Pada 28 Oktober 2014, Keduanya menyepakati, Prof Nila harus berbicara di depan staf Kementerian Kesehatan.

Tidak hanya memperkenalkan diri, tapi juga menyuntikkan semangat kepada para anak buahnya. Tidak hanya soal kesehatan, tapi juga bagaimana birokrasi di Kementerian Kesehatan harus dijalankan di era Prof Nila memimpin kantor di Jalan HR Rasuna Said itu.

"Saat itu, saya meminta waktu beberapa menit untuk berbicara kepada Ibu Menteri. Saya tegaskan bahwa Ibu harus mengungkapkan kebijakan soal gratifikasi. No gratifikasi sejak hari pertama, apapun bentuknya," tutur Untung, begitu para koleganya memanggil pria ini.

Harapan Untung ternyata sama dengan keinginan Sang Menteri. Hal tersebut dijadikan momentum bagi Untung melakukan revolusi mental di tubuh Kemenkes.

"Dalam kepala saya, revolusi mental di Kementerian Kesehatan hanya punya dua tujuan saja. Yang pertama menghilangkan korupsi dan kedua memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," tutur Untung, suatu pagi, saat ditemui di ruang kerjanya.

Untung bukan pejabat yang asing dengan upaya menghilangkan korupsi. Saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada 2012, dia sudah memasukkan kurikulum antikorupsi untuk para peserta latihan dan mahasiswa.

"Tugas saya waktu itu ialah memberi penjelasan dan ketegasan bahwa gratifikasi merupakan bagian dari korupsi. Gratifikasi ialah korupsi," tegasnya.

Untung pun mulai menelisik akar masalah korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan di masa lalu. Biang masalah ialah banyaknya peraturan yang membuka peluang untuk dimanfaatkan sebagai ladang korupsi. Pembentukan

Pusat Kerjasama Luar Negeri

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Center for
International
Cooperation
Ministry of Health
the Republic
of Indonesia



Untung Suseno mendampingi Menkes meninjau ruang kerja gedung Sujudi.

pun dilakukan dengan menghilangkan/menghapus peraturan-peraturan yang tidak signifikan dan menghambat.

Sistem diperbaiki dan perubahan pun dilakukan. Aturan yang menegaskan jika terjadi kecurangan akan ditindak dengan tegas dan sanksi berat terus disuarakan. Bersih-bersih dilakukan mulai dari Unit Layanan Pengadaan yang menunjang kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kewajiban. Penerapannya mulai dari e-planning, e-money, e-spj, hingga e-anggaran.

"Perencanaan dibuat sesuai kebutuhan. Kami menegaskan kepada semua jajaran bahwa laporan keuangan Kementerian Keuangan harus mendapatkan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Tidak ada tawar menawar lagi," jelas Untung.

Dia mengakui untuk mengobarkan semangat antikorupsi tidak bisa hanya dengan kata-kata. Pimpinan harus menjadi contoh, tidak sekadar berkomitmen saja. Para pejabat eselon 1 dan 2 memberi contoh dengan tidak menerima gratifikasi saat melakukan kunjungan ke daerah. Aksi pimpinan inilah yang pasti akan ditiru oleh para anak buahnya.

Kerja keras, kerja nyata, dan kerja benar ini berbuah baik. Pada akhir 2017, Kementerian Kesehatan mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi. Tidak tanggung-tanggung, dua penghargaan sekaligus diberikan, yakni Lembaga dengan Implementasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Kewajiban Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik dan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik.

Sebagai pemimpin di barisan birokrasi, Untung sadar dirinya berhadapan dengan barisan birokrat. Budaya yang mereka anut selama ini ialah dilayani bukan melayani.

Gebrakan kedua dijalankan, yakni memberi pelayanan prima kepada masyarakat, kepada negara, untuk bangsa.

"Saya tegas-tegas meminta para pejabat, staf dan karyawan di Kementerian Kesehatan untuk memberi pelayanan, bukan meminta pelayanan. Menjadi pelayan, bukan orang yang minta dilayani, bukan birokrat atau atasan," tegas dokter lulusan Universitas Indonesia ini.

Pembenahan kantor di Jalan HR Rasuna Said itu dilakukan satu per satu. Mulai dari menciptakan kantor yang bersih, bersih secara kasat mata dan bersih dari praktik-praktik korupsi.

Celah gratifikasi dihindari mulai dari perubahan pelayanan publik. Pengurusan surat izin, seperti Surat Tanda Registrasi bagi dokter, misalnya, dilakukan secara online.

Calon dokter cukup mengirim persyaratan dan dokumen lewat internet, tanpa harus datang ke Jakarta dan menemui pegawai yang melayani urusan itu. Para dokter bisa mengecek pemrosesan dokumennya tanpa menguras waktu, biaya dan tenaga. Kini, waktu yang dibutuhkan paling lama tiga minggu, bukan tiga bulan seperti di masa lalu. Biaya pengurusan dokumen pun ditentukan secara transparan dan tenaga tidak banyak terbuang karena seluruh proses dilakukan dengan teknologi informasi.

Untuk urusan yang menuntut adanya temu muka, dirancanglah aturan pertemuan di ruang publik dan terpantau CCTV. Pelayanan publik Kemenkes pun semakin prima, tanpa ada udang di balik batu, tanpa potensi korupsi.

“ Untuk mewujudkan Kantor yang ramah lingkungan, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan konsep Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (Berhias).

Tidak hanya bersih-bersih, efektivitas kerja juga diperbaiki. Unit-unit pelayanan yang sebelumnya ada di lantai atas kantor, dipindahkan ke lantai dasar. Langkah ini membuat masyarakat lebih mudah menjangkau, sekaligus agar unit kerja lain tidak terganggu.

Untung juga berperan mendorong unit-unit terkait dengan rumah sakit agar lebih banyak turun ke lapangan. Mereka harus mendorong rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan agar lebih banyak melakukan reformasi birokrasi.

“Perubahan yang dilakukan Pak Untung dibuat untuk dilaksanakan oleh semua. Sekarang, perubahan besar sudah terjadi di tubuh Kementerian Kesehatan, lebih efisien, *green office*, penggunaan listrik berkurang, dan keamanan kantor terjaga,” ungkap Sundoyo SH, MKM, M. Hum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.

Tidak hanya menuntut kewajiban yang maksimal, di tangan Untung, pejabat, pegawai dan staf Kementerian Kesehatan juga mendapat haknya secara maksimal. Kesejahteraan pegawai terus ditingkatkan. Jenjang karier diperhatikan, terutama penempatan yang sesuai bidang dan kemampuan individu.



Untung Suseno mendampingi Menkes RI membuka pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA).

Untuk berangkat ke kantor, para pegawai juga tidak perlu mengeluarkan dana lebih, karena Kementerian Kesehatan menyediakan bus jemputan. Kesehatan mereka terjaga karena bisa kapan saja memeriksakan diri ke klinik pratama dan utama di kantor kementerian.

TANGGALKAN BAJU BIROKRAT

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, revolusi mental adalah gagasan yang dicetuskan Presiden pertama Indonesia Ir Soekarno. Sebagai pencetus dan pengonsepanya, revolusi mental mulai dikumandangkan Sang Bapak Bangsa itu pada 1957.

Saat itu, dalam olah pikir Bung Karno, revolusi nasional Indonesia mengalami kemandekan. Padahal, revolusi Indonesia yang sesungguhnya belum tercapai. Ada sejumlah faktor yang membuat kondisi itu terjadi. Di antaranya semangat dan jiwa revolusi rakyat serta pemimpinya yang menurun. Penyelewengan ekonomi, politik dan budaya pun terlihat kasat mata.

Pada 2014 lalu, Presiden Joko Widodo menilai reformasi yang diusung sejak 1998, saat kejatuhan Presiden Soeharto, terjadi hanya sebatas institusional. Karena itu, ditegaskan revolusi mental dengan menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* yang manusiawi. Dalam wacana revolusi mental tersirat keinginan untuk melakukan perubahan cepat dan radikal.

Aspek strategis revolusi mental diarahkan untuk kedaulatan, daya saing, dan persatuan bangsa. Revolusi mental ialah upaya bersama membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Gerakan Revolusi Mental dipayungi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Instruksi Presiden itu mengamanatkan 5 (lima) Gerakan Revolusi Mental yang harus dilaksanakan seluruh Kementerian dan Lembaga. Kelima gerakan itu ialah Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu.

Kementerian Kesehatan diberi penekanan pada dua amanat Gerakan Nasional Revolusi Mental, yakni Gerakan Indonesia Melayani dan Indonesia Bersih. "Di Kementerian Kesehatan, kami menerjemahkan dan mengejawantahkan revolusi mental lewat gerakan antikorupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dua tujuan itu kami wujudkan dengan melakukan banyak perubahan, mulai dari aturan, perilaku sehari-hari, hingga hubungan yang baik dan wajar dengan masyarakat," papar Untung.

Dalam banyak kesempatan, tangan kanan Menteri Kesehatan Prof Nila F Moeloek ini meminta para anak buahnya tidak melihat diri sebagai birokrat. "Jadilah pelayan masyarakat, sehingga bisa menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak menghalalkan pungutan liar."



Untung Suseno berpose ditengah para Dokter internisp Indonesia.

GERAKAN INDONESIA MELAYANI

Ketika mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung banyak memberi perhatian pada puskesmas dan dokter puskesmas. Biaya Operasi Kesehatan (BOK) pun digelontorkan setiap tahun, dengan jumlah yang terus meningkat demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai semangat gerakan Indonesia Melayani.

Gerakan Indonesia Melayani, ungkap Master Kesehatan Masyarakat dari Universitas Gadjah Mada ini, menekankan penciptaan etos kerja agar pekerjaan bisa dituntaskan dengan baik. Tolak ukurnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, melaksanakan percepatan reformasi birokrasi, serta pencapaian integritas nasional.

Untuk itu, gerakan ini butuh faktor-faktor pendukung, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN), peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif lewat *e-government* serta penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) ASN.



Selain itu juga peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, penyederhanaan pelayanan birokrasi, peningkatan penyediaan sarana, dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakkan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Gerakan Indonesia Bersih diwujudkan dengan upaya gerakan pembiasaan perilaku hidup bersih pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Fokus kegiatan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas, serta peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat. Fokus kegiatan lainnya ialah mengutamakan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Inpres No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental ditundaklanjuti dengan sasaran program melalui



Inspeksi pelayanan kesehatan di lokasi bencana.

Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Kemudian dilanjutkan oleh Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dengan merumuskan Program Prioritas Revolusi Mental dalam pembangunan nasional. Ada lima isu besar, yaitu Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik, Reformasi Birokrasi Pemerintahan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa, Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa, serta Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan.

Dari kelima program prioritas tersebut, Kementerian Kesehatan mendapatkan peran tiga program prioritas. Yang pertama terkait Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik. Penerapan di lapangan dilakukan melalui penegakan hukum yang berkualitas, penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

Peran kedua ialah Reformasi Birokrasi Pemerintah yang dilaksanakan lewat promosi layanan elektronik menuju *e-budgeting*, *e-reporting*, dan *complaint center*. RS Rujukan Nasional dan RS Rujukan Regional menerapkan integrasi data rekam medis, serta sistem rujukan pelayanan kesehatan online, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Peran terakhir ialah Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa yang diejawantahkan melalui Cinta Produk Dalam Negeri, pemanfaatan bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri.

Secara khusus prioritas nasional Revolusi Mental dalam pembangunan kesehatan difokuskan mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya praktis dalam keseharian. Di antaranya meningkatkan pelayanan kesehatan responsif dengan rumus cepat, tepat, dan bersahabat. Efektivitas upaya preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan penegakan etika kedokteran serta standar rumah sakit turut menjadi fokus kerja.

Kementerian Kesehatan juga menjalankan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Dasarnya ialah Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ada delapan program yang harus dijalankan, yakni Program Manajemen Perubahan, Program Sistem Pengawasan, Program Akuntabilitas Kinerja, Program Kelembagaan, Program Tata Laksana, Program Sistem Manajemen SDM ASN, Program Peraturan Perundang-undangan dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Manajemen Perubahan adalah program yang sangat terkait dengan Revolusi Mental. Program itu bertujuan mengubah mental model/perilaku aparatur Kementerian Kesehatan yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja baru yang positif.

Kementerian Kesehatan mengharmonisasikan konsep Revolusi Mental bidang kesehatan dengan kegiatan manajemen perubahan dalam program reformasi birokrasi. Keduanya menjadi satu kesatuan *outcome* dan dirumuskan sebagai Rencana Aksi Revolusi Mental di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan Revolusi Mental bidang kesehatan dirumuskan dengan mencermati nilai-nilai strategis Revolusi Mental, yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong.

Nilai Integritas diartikan sebagai sehat tanpa korupsi. Riilnya, Kementerian Kesehatan harus mampu menunjukkan diri kepada publik, bahwa dukungan dana besar untuk mewujudkan Indonesia Sehat bisa dilakukan tanpa korupsi.

"Korupsi bisa diwujudkan dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, sekecil apapun, bahkan untuk buah tangan saat seorang pejabat berkunjung ke daerah," ujar Untung.

Dalam praktik sehari-hari, Sehat tanpa Korupsi digaungkan lewat slogan Jaga Diri, Jaga Teman, dan Jaga Kementerian Kesehatan. Tiga poin tersebut diharapkan tertanam dalam benak para karyawan sehingga perilaku korupsi bisa di jauhi.

Etos kerja terwakili dengan jargon Sehat Melayani. Sehat adalah gerakan mendukung program Kementerian Kesehatan dengan menjaga dan meningkatkan kondisi sehat fisik maupun mental aparatur sipil negara. Jika para pelayan masyarakat dalam kondisi sehat, mereka dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Tujuan besarnya agar mereka bisa memberikan pelayanan memuaskan pada masyarakat.

Melayani adalah gerakan mendukung program Gerakan Indonesia Melayani dengan pendekatan Pelayanan Publik/Kesehatan yang Cepat, Tepat, dan Bersahabat. Cepat berarti memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat berupa pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur, dan bersahabat berarti melayani dengan ramah dan senyuman.

Revolusi mental bidang kesehatan yang terakhir ialah Gotong-Royong menuju Indonesia Sehat. Ini adalah upaya menggerakkan aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan peningkatan kualitas hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat.



Untung Suseno memotivasi Agent of Change (AOC) Kesehatan Kemenkes RI.

Pertanyaan besar yang seringkali dilontarkan, siapa yang bisa memotivasi pejabat dan pegawai untuk menginternalisasi nilai-nilai baik itu? "Agen perubahan. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kesehatan didorong untuk menjadi agen perubahan," tutur Untung.

Di lapangan, dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan masyarakat, rumah sakit didorong sebagai garda terdepan. Karena itu, internalisasi Revolusi Mental Bidang Kesehatan di rumah sakit vertikal merupakan bagian penting dari perubahan di Kementerian Kesehatan.

Implementasi revolusi mental dilakukan unit utama dan unit pelaksana teknis. Sebagai unit pelaksana teknis, ada 33 rumah sakit vertikal yang melakukan transformasi revolusi mental bidang pelayanan kesehatan. Aksi sudah mereka lakukan sejak 2017.

Pelaksanaan internalisasi Revolusi Mental di 33 rumah sakit dilaksanakan Pusat Analisis Determinan Kesehatan bersama Tim Manajemen Perubahan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Sejumlah kalangan profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi industri dan organisasi serta ahli administrasi publik juga dilibatkan.



Pasca memimpin Apel Siaga pelayanan kesehatan ASIAN GAMES di IRTI Jakarta Pusat.

Pada 2017, ada 10 rumah sakit vertikal yang melakukan internalisasi revolusi mental. Disusul setahun kemudian pada 10 rumah sakit lainnya, dan pada 2019 nanti ditargetkan 13 rumah sakit vertikal menyusul.

Sementara implementasi pada unit utama dilakukan dengan membangun kapasitas satuan kerja dan pertemuan koordinasi agen perubahan. Bentuknya jambore atau rembuk agen perubahan seluruh satuan kerja Kementerian Kesehatan.

BERAWAL DARI MORNING BRIEFING

Ketika Senin pagi tiba, kehadiran Untung Suseno Sutardjo seperti seorang motivator. Beliau tak bosan menyuntikkan semangat, motivasi, dan kebaikan-kebaikan kepada seluruh anak buahnya.

"Kebaikan tidak hanya sekadar bisa diucapkan. Kita bisa membawa perubahan, kebaikan dan menularkannya kepada orang lain, jika kita sendiri sudah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Untung membuka sedikit prinsip hidupnya.

Dokter yang pernah bertugas di salah satu puskesmas di Kalimantan Barat ini memastikan seorang atasan harus memberi contoh, sehingga perubahan



baik bisa segera terwujud. Perubahan bisa terwujud jika dimulai dari sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, dan dilakukan terus menerus.

Sekalipun penuh dengan suntikan semangat, *morning briefing* jauh dari kesan tegang. Justru suasananya familier, penuh canda, dan penuh tawa. Tapi, tujuan utamanya, yakni memompa kembali semangat para abdi negara. Etos kerja ditanamkan, rambu-rambu dalam bekerja secara baik disuarakan, dan memupuk pahala dunia akhirat terus dikumandangkan.

Melalui *morning briefing*, nilai egaliter sangat kental. Semua yang hadir, dari eselon empat hingga eselon satu bebas mengungkapkan pendapat. Tidak perlu rikuh, tidak harus ewuh pekewuh. Sama-sama bisa bersuara, saling menambahkan, dan saling mendukung, bahkan saling membantah kalau perlu.

"*Morning Briefing* juga berfungsi membangun komunikasi dan berbagi informasi antareselon. Dari situ lahir sistem yang mendukung praktik perwujudan layanan bersih, jujur, disiplin, tidak KKN, dan tidak melakukan pungli," jelas Untung.

Yel-yel penuh semangat dikumandangkan bersama sekaligus sebagai



Meninjau pelayanan kesehatan lapangan di Lombok

penyemangat ketika bertugas melayani masyarakat. Meski terlihat sederhana, yel-yel tersebut terbukti mampu mendorong perubahan yang bersumber dan dalam diri setiap orang. Mari kita dengar dengan batin kita yang terdalam : *Integritas! Sehat Tanpa Korupsi! Jaga Diri! Jaga Teman! Jaga Kementenan Kesehatan ! Etos Kerja! Sehat Melayani! Cepat, Tepat, Bersahabat! Gotong Royong! Indonesia Sehat! Gerakan Masyarakat hidup sehat... Indonesia Kuat...*

Untung yang bergabung dengan Kementerian Kesehatan sejak 1984 silam tak sekedar berteori, Beliau ini juga tidak mau terlambat untuk datang ke tempat kerja sekaligus memacu diri untuk selalu datang setengah jam lebih awal dari seharusnya.

Untuk memacu bawahannya disiplin dalam bekerja, Untung menerapkan perubahan sistem absensi manual menjadi elektronik. Cukup mengagetkan di awal, tapi hasilnya menggembirakan.

Seiring waktu, kesadaran dan kemauan aparatur di kantor Kementerian Kesehatan untuk berubah lebih baik pun tumbuh. Dari *morning briefing* dan dialog dari hati ke hati, akhirnya muncul sejumlah budaya kerja harian yang dibuat dan disepakati bersama.

Menurut jumlah jemari, terdapat lima budaya kerja harian, yakni 1 T atau minimal satu pekerjaan tuntas setiap hari, 2 K yang diartikan untuk berbuat minimal dua kebaikan setiap hari dan 3 S, senyum, sapa dan Salam. Selain itu, 4 M yang berarti hadir empat menit sebelum kegiatan dimulai, dan 5 R, akronim dari ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin.

Sebagai budaya, hasil olah pikir bersama, ada kesepakatan bersama untuk menaatinya. Kini, para pejabat, karyawan dan staf Kementerian Kesehatan memiliki tuntunan budaya yang dijalankan bersama.

IDENTITAS BARU

Logo merupakan identitas. Logo ibarat wajah, yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain, satu kantor dengan kantor lain, dan satu kementerian dengan kementerian lain.

Ketika revolusi mental digaungkan di kantor Kementerian Kesehatan, mata Untung Suseno Sutardjo pun tertuju pada logo Bhakti Husada. Logo ini sudah dipakai sejak 1984, saat Kementerian Kesehatan dipimpin Suwardjono Surjaningrat. Sejatinnya logo tersebut lambang upaya kesehatan Indonesia, bukan logo sebuah kementerian.

Tidak ada kata terlambat. Sekjen Kementerian Kesehatan sigap menginisiasi pembuatan logo dengan membentuk tim. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.03/VII/SK/093/2016 dibentuk tim pembentukan Logo Kementerian Kesehatan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 02.03/VII/SK/155/2016 tentang Pembentukan Tim Juri Sayembara Logo Kementerian Kesehatan.

Logo baru tidak didapat begitu saja. Sayembara digelar terbuka, dengan mengundang sejumlah desainer muda. Dari ratusan desain logo yang masuk, terpilih karya seorang desainer profesional, Kunto Baskoro. Pria muda kelahiran Jakarta ini merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung.

Logo baru menampilkan tiga bidang warna biru turquoise yang melambangkan 3 Pilar Program Indonesia Sehat, yaitu: Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Bidang warna hijau terang berbentuk hati melambangkan semangat universal yang tulus untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, ras, sosial, dan budaya. Inisial K, mewakili bentuk sederhana dari kata Kesehatan, makna verbal dari bidang lingkup kerja di Kementerian ini.

Lima ujung bidang yang membulat, mewakili nilai-nilai Kemenkes, yaitu: Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila. Garis busur panah mewakili target dan tujuan institusi Kemenkes RI yakni mewujudkan Indonesia Sehat. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pada dasarnya kesehatan merupakan hak semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab bersama.

Pilihan warna biru turquoise melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan Integritas. Warna hijau terang memberikan efek ramah, hangat, dan semangat dalam melayani. Sedangkan warna hitam melambangkan makna tegas dan formal, sebuah badan resmi negara yang membuat regulasi khususnya di bidang kesehatan.

Logo baru itu ditetapkan sebagai Logo Kementerian Kesehatan lewat Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/589/2016, tertanggal 14 November 2016.

LEBIH BAIK KARENA PERUBAHAN

"PERUBAHAN harus saya lakukan, saat melihat ruang lobi Kementerian Kesehatan selalu riuh rendah di pagi dan sore hari, ketika pegawai masuk dan pulang kerja. Hiruk pikuk kendaraan di halaman kantor juga sangat menyesak mata," papar Untung menceritakan kesan pertamanya ketika menjabat posisi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada 2014 lalu.

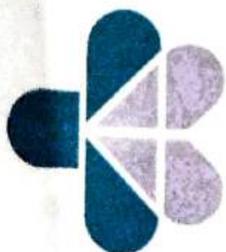
Beliau bertekad melakukan perubahan lingkungan kerja. Tangan dingin suami Lies Soerachmiati Mulya Soendoro ini, memang berhasil memberikan sentuhan perubahan. Gedung lama tampak baru, terasa lebih bersih, terbuka, hijau, dan tertib.

1. BENTUK LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

2. MAKNA LOGO



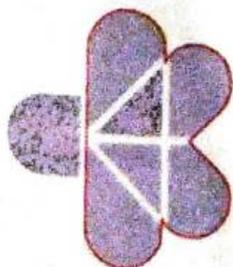
Tiga bidang warna Biru turquoise

Melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat: Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.



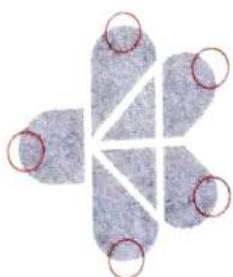
Bidang warna hijau terang berbentuk hati

Melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh warga negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, ras, sosial dan budaya.



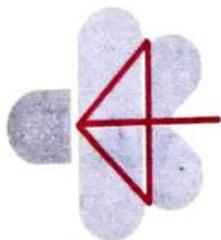
Inisial "K"

Mewakili bentuk sederhana singkatan dari kata "kesehatan", makna verbal dari bidang lingkup kerja Kemenkes RI.



Lima ujung bidang yang membulat

Mewakili nilai-nilai Kemenkes yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila



Garis busur panah

Mewakili target dan tujuan institusi Kementerian Kesehatan, yakni mewujudkan tema Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang Pada dasarnya kesehatan merupakan hak semua warga Negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab bersama.

PENGGUNAAN LOGO BESERTA TULISAN KEMENTERIAN KESEHATAN



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



KEMENKES RI

Warna Biru Turquoise:

Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.

Biru Turquoise

C:75 M:0 Y:45 K:0

Warna Hijau Terang:

Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.

Hijau Terang

C:20 M:0 Y:100 K:0

Warna Hitam (logotype):

Melambangkan makna tegas dan formal selaku badan resmi negara dalam pembuat regulasi khususnya di bidang kesehatan.

Hitam

C:0 M:0 Y:0 K:100

Banyak tanaman hidroponik yang menjadi hiasan penyejuk. Tanaman itu dipelihara dengan mengedepankan sistem ramah lingkungan. Air yang digunakan untuk menyiram berasal dari limbah air pendingin ruangan atau AC.

Masuk ke dalam kantor, suasana terasa terang dengan desain interior yang lebih modern dan hangat. Unit pelayanan terpadu bisa dijumpai di lantai satu, sehingga tidak ada lagi tamu-tamu yang naik turun lift hingga tersebar ke berbagai lantai. Semua bisa diselesaikan di satu lantai, lebih tertib, nyaman, aman, dan mudah dikontrol.

Bukan hanya itu, rentetan alur berkas perizinan yang masuk pun menjadi lebih mudah dipantau. Masyarakat yang mengurus izin bisa melihat prosesnya secara elektronik. Mereka bisa mengetahui sampai mana berkas yang diajukan, dan apa persyaratan yang kurang. Lebih penting lagi, lama pengajuan proses perizinan yang semula bisa berbulan-bulan berhasil dipangkas hingga rata-rata hanya dua minggu.

Untuk terus memperbaiki layanan, Kementerian Kesehatan juga telah membuka saluran pengaduan di nomor *hotline* atau *call center* 1500567. Keluhan juga bisa dilakukan di kanal media sosial.

Unit layanan terpadu ada di Gedung Sujudi, persis di samping lobi. Di dalam ruangan berpendingin udara itu terdapat deretan loket perizinan, serta kursi-kursi untuk menunggu yang tersusun rapi dan nyaman. Ada petugas yang akan bertanya, ramah memberi informasi, dan membantu mengambil kartu dari mesin.

Para tamu Kementerian Kesehatan kini mendapat perlakuan atau layanan istimewa. Tidak ada lagi yang kesulitan mencari tempat parkir hingga harus berputar-putar. Begitu masuk pintu gerbang, petugas akan menghampiri, memberi salam dan menanyakan keperluan. Tempat parkir di bagian depan gedung khusus untuk para tamu dan juga masyarakat yang mengurus perizinan di unit layanan terpadu. Pegawai Kementerian yang membawa kendaraan, bisa menggunakan tempat parkir yang ada di dalam gedung.

SERBATEKNOLOGI

UNTUNG Suseno Sutardjo mengubah sejumlah ruangan di lantai satu dan dua menjadi lebih ramah dan terbuka. Lobi, ruang tamu, dan ruang rapat dilengkapi CCTV, namun ramah terhadap publik.

"Saya tidak ingin ada pertemuan yang hanya berdua saja, antara pejabat di Kementerian Kesehatan dengan tamunya. Itu salah satu upaya menghindarkan mereka dari kemungkinan berkolusi," ujarnya.

Perubahan di Kementerian Kesehatan terus terjadi. Untuk menghindari KKN dan pungli, kini seluruh kebutuhan yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan tidak lagi dilakukan dengan tatap muka atau surat-menyurat. Kementerian Kesehatan telah mengakomodir aturan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Setiap lembaga, pengusaha yang terkait dengan pengadaan barang, bisa mengisi formulir secara elektronik. Begitu pula dengan e-planning. Cara ini menutup kemungkinan komunikasi orang per orang, sehingga praktik KKN dan pungli bisa dihindari.

LPSE dan e-planning yang dikelola Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan itu dilengkapi dengan *software* yang berfungsi sebagai elektronik monitoring dan evaluasi. Dengan cara ini semua bisa terpantau, baik itu perencanaan yang diajukan, disetujui, hingga apa saja yang sudah dilaksanakan dan terealisasi.

Elektronik monitoring juga berlaku pada surat pertanggungjawaban saat melakukan perjalanan dinas. Seluruh karyawan di Kementerian Kesehatan bisa langsung melaporkan secara elektronik, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih terkontrol, tertata, termonitor, dan yang jelas dari segi waktu lebih efektif.

PARA PEGIAT PERUBAHAN

SAAT memaparkan bahan kuliah pada 1989 silam, pakar manajemen dari Universitas of California, Los Angeles, Harold Koontz menyatakan kepemimpinan merupakan seni dan proses untuk memengaruhi orang-orang.



Meninjau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak bencana.

"Seorang pemimpin mengajak orang lain, yang akhirnya bersedia untuk mencapai tujuan kelompok, dengan kemauan dan antusiasme," tambah profesor kelahiran Findlay, Ohio ini.

Pria yang sudah menulis buku manajemen dan kepemimpinan sejak 1941 itu memastikan seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendiri. Kesadaran itu juga yang dirasakan Untung Suseno Sutardjo saat menjadi pemimpin birokrasi di tubuh Kementerian Kesehatan, sebagai sekretaris jenderal.

Perubahan yang harus diemban di era Revolusi Mental bukan hal yang mudah. Mengubah perilaku yang sudah berjalan bertahun-tahun membutuhkan agen

perubahan atau *agent of change* (AoC). Dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa menularkan dan menjembatani perubahan. Mereka harus mengerti visi serta misi dari gerakan perubahan itu sendiri.

Untuk itu di setiap unit di dalam Kementerian Kesehatan, dilakukan pelatihan agen-agen perubahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka berfungsi mengingatkan jika ada penyimpangan, menginformasikan prosedur yang benar, memotivasi, dan menularkan semangat perubahan yang sedang dilaksanakan.

Untuk membantu terwujudnya perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan membentuk layanan pengaduan gratifikasi, dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karyawan Kementerian Kesehatan dan masyarakat bisa mengirimkan pengaduan dengan spirit membuat semuanya menjadi lebih baik.

Peranan AoC dilakukan melalui pendekatan holistik dengan menetralkan suasana terlebih dahulu. Mereka melakukan pendekatan konsolidasi dan upaya transformasi berantai dengan menggunakan kelompok *support* melalui *consulting*, *training*, *coaching* dan *counseling*. Setelah itu melakukan pendekatan dengan kelompok yang gigih melawan. Pemilihan AoC dilakukan melalui proses pemilihan dan pembekalan materi sebelum dilakukan pengukuhan sebagai AoC Kementerian Kesehatan.

Setelah agen perubahan terpilih, langkah selanjutnya ialah melaksanakan kegiatan penguatan dan pembekalan peran AoC pada target-target revolusi mental. Tahapannya dimulai dari mencairkan suasana perubahan yang merupakan tahapan saat AoC mengenali kebutuhan perubahan dan mempersiapkan sebuah strategi untuk perubahan.

Yang berikutnya ialah *changing*, tahapan saat AoC bergerak menggerakkan perubahan, mencakup tindakan modifikasi aktual berupa tugas-tugas, struktur dan atau teknologi. Yang terakhir ialah *refreezing* sebagai tahapan final dari proses perubahan yang didesain untuk memelihara momentum suatu perubahan. Pada tahapan ini secara positif membekukan hasil-hasil yang diinginkan agar perubahan menjadi permanen.



Senam peregangan.

“

Perubahan yang harus diemban di era Revolusi Mental bukan hal yang mudah. Mengubah perilaku yang sudah berjalan bertahun-tahun membutuhkan agen perubahan atau *agen of change* (AoC). Dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa menularkan dan menjembatani perubahan. Mereka harus mengerti visi serta misi dari gerakan perubahan itu sendiri

BAB IV

KEMENKES RI

“

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada dokumen yang berupa laporan atau prosedur saja, namun bagaimana masyarakat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah Revolusi Mental yang sebenarnya dibidang aparatur.

KEMENTERIAN RI

MENGEFEKTIFKAN BIROKRASI

KEMENKESORI



MENGEFEKTIFKAN BIROKRASI

Setiap pemimpin menyadari dan mengakui bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak terelakkan -

Rhenald Kasali

KEMENKES RI





Paparan Menkes pada Raker Menkes dengan Komisi IX DPR RI.

MENGEFEKTIFKAN birokrasi tak semudah membalik telapak tangan. Butuh kemauan dan kerja keras dari semua pihak. Butuh kepemimpinan dengan pikiran terbuka yang mampu mengikuti perubahan, menjembatani dan mengkoordinasi kebijakan dan keputusan, serta mampu memotivasi terjadinya perubahan dalam sebuah organisasi, termasuk lingkungan Kementerian Kesehatan yang cakupan tugas dan wilayahnya luar biasa luas.

Untung Suseno Sutarjo selaku Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan mampu memerankan peran tersebut. Dia dinilai berhasil menjembatani, mengkoordinasi, membina, seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dan juga hubungan antarinstansi atau lembaga terkait.

Dia selalu menekankan pentingnya kerja efektif, efisien, dan transparan. "Jangan coba-coba datang ke Pak Sekjen tanpa membawa solusi dan inovasi," ujar Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Setyo Budi Hartono.

Seseram itukah? Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, mengatakan, meski serius sebenarnya Untung ramah, memiliki selera humor, dan berpikiran terbuka. "Dia mau mendengarkan masukan-masukan. Ego sektoral tidak muncul, sangat cair, sehingga berbagai hal dapat diselesaikan dengan baik. Program-program pun terimplementasi dengan baik," tutur Dede Yusuf.

Semangat yang dibawa Untung Suseno Sutarjo, memotivasi dan menular ke seluruh jajaran. Perubahan-perubahan mendasar terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berbagai program untuk mengefektifkan kinerja birokrasi berhasil diwujudkan. Sebut saja penerapan tanda tangan digital yang mendukung kecepatan pelaksanaan keputusan, terlaksananya Satu Data Kesehatan, digitalisasi monitoring, hingga Gerakan Nasional Sadar & Tertib Arsip.

TANDATANGAN DIGITAL

Dunia bergerak cepat, seiring dengan kemajuan teknologi. Kinerja yang efektif dan efisien menjadi lebih mudah termonitor. Teknologi mempersempit beragam alasan yang bisa menunda koordinasi tugas untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan. Apalagi, Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian dengan pelayanan publik yang dituntut kecepatan tinggi.

Untuk mengatasi berbagai kendala itu, Kementerian Kesehatan telah menerapkan solusi dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) yang menjadi bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penggunaan tandatangan digital mempersempit terlambatnya penandatanganan, pengiriman keputusan dan koordinasi tugas yang kerap menjadi alasan dalam birokrasi. Tandatangan digital juga memungkinkan transparansi serta akuntabilitas dilaksanakan dengan lebih cermat. Mirip dengan sidik jari, sistem ini memperjelas siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan atau pun keputusan.

Untuk menerapkan tandatangan digital, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSErE). Pada tahap awal, tandatangan digital akan diterapkan



Menteri Kesehatan bersama dengan para Pejabat Es. I.

dalam layanan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Ke depan, penggunaan tandatangan digital yang tersertifikasi akan diterapkan di lebih banyak produk pelayanan publik Kementerian Kesehatan.

Dengan diterapkannya tandatangan digital yang ditargetkan dimulai tahun ini, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan dua dari enam tujuan strategis *e-government*, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara holistik dengan memanfaatkan teknologi.

SATU DATA KESEHATAN

Penelitian yang dilakukan McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa keterbukaan data dapat membuka potensi nilai ekonomi. Di Amerika Serikat, keterbukaan data meningkatkan ekonomi hingga sebesar \$3-5 triliun setiap tahun. Angka itu meliputi 7 sektor, yaitu pendidikan, transportasi, produk konsumen, tenaga listrik, gas dan minyak, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan konsumen.

Secara garis besar, seperti diinformasikan *data.go.id*, hasil penelitian keterbukaan data bukan hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga sangat bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan pada akhirnya juga meningkatkan kinerja layanan publik.



Apa itu Satu Data Kesehatan? Satu Data merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antarinstansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Satu Data Indonesia dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

Data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan kesehatan. Untuk menjamin data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses dibutuhkan tata kelola data yang berpedoman pada prinsip satu standar, satu metadata, dan satu portal, serta tata kelola sistem pendukung.

Sekretaris Jenderal Kemenkes berulang kali memberi arahan pada setiap pertemuan yang berhubungan dengan sistem informasi yang melibatkan pemangku kepentingan Sistem Informasi Kesehatan dan Pengelola Sistem Informasi Kesehatan, baik di pusat mau pun daerah tentang pentingnya Satu Data Kesehatan. Dia menekankan pentingnya peranan Pusdatin sebagai lokomotif data dan informasi untuk mewujudkan Satu Data Kesehatan yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia.



Kampanye lingkungan sehat

Satu Data Kesehatan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi satu standar, satu metadata, dan satu portal. Satu standar meliputi penggunaan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama atau yang telah disepakati melalui konsensus. Satu metadata meliputi metadata yang melekat dan terdokumentasi berdasarkan format dan struktur metadata yang baku. Satu portal meliputi penggunaan satu alamat situs *website* untuk penyebarluasan data secara elektronik.

Secara garis besar, kebijakan Satu Data Kesehatan meliputi standardisasi pada semua simpul proses pengelolaan data, berbagi pakai data (*data sharing*) melalui interoperabilitas, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti.

Standardisasi pada semua simpul proses pengelolaan data mencakup standardisasi dataset, metadata, dan sistem pada simpul pengumpulan, pengolahan, dan analisis, serta penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. Berbagi pakai data (*data sharing*) melalui interoperabilitas yang mencakup berbagi pakai data pada sistem informasi layanan kesehatan

dan berbagi pakai data pada sistem informasi pelaporan serta monitoring dan evaluasi (Monev). Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti mencakup proses kliring data untuk memperoleh satu data dan penyediaan akses data melalui portal untuk berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan dilaksanakan untuk mewujudkan data yang berkualitas sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

Presiden Jokowi selalu mengatakan, negara yang maju pasti memiliki arsip yang baik. Kenyataannya memang seperti itu. Tidak mengherankan jika Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Untung Suseno Sutarno selalu menekankan pentingnya kerapian kearsipan.

"Tiga tahun lalu kearsipan kita terbaik nomor dua. Kemudian Pak Sekjen minta kita menjadi nomor satu, dan tahun lalu kami menjadi juara satu kearsipan kementerian terbaik yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)" ujar Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Desak Made Wismarini.

Untuk menjadi yang terbaik dalam mengelola kearsipan tidaklah mudah. Biro Umum Kemenkes melakukan beberapa studi tiru baik ke ANRI maupun PT KAI, salah satu BUMN yang memiliki sistem kearsipan yang baik.

Untuk dapat melakukan kearsipan yang baik memang tidak mudah. Penyelenggaraannya selain didukung sarana dan prasarana memadai, juga perlu komitmen seluruh pihak terutama para pimpinan. Komitmen tersebut dituangkan dalam pencaanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada tanggal 5 Mei 2017 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan Unit Utama Kementerian Kesehatan disaksikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/231/2017 tentang Pengelolaan

Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kementerian. Surat edaran Menteri Kesehatan tersebut dikuatkan kembali dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor AR.03.05/VII/547/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang pencaangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Lingkungan Unit Utama Kementerian Kesehatan. Komitmen tersebut juga diteruskan ke tingkat bawah melalui pencaangan GNSTA di Unit Utama masing-masing

Kementerian kesehatan juga telah beberapa kali menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. Arsip Statis tersebut terkait dengan SOTK Kementerian Kesehatan, hasil penelitian di bidang kesehatan dan juga file personal beberapa pejabat tinggi Kementerian Kesehatan.

Kearsipan Kementerian Kesehatan juga telah terakreditasi A (sangat baik) berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 350 Tahun 2017. Akreditasi itu berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Sertifikat akreditasi diserahkan oleh kepala ANRI kepada Menteri Kesehatan RI pada saat peresmian Gedung dr Soejoto sebagai *Records Center* Kementerian Kesehatan tanggal 12 Januari 2018.

Keberhasilan meraih Akreditasi Unit Kearsipan Kementerian dengan nilai A menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai referensi pengelolaan arsip bagi Kementerian dan Lembaga lain. Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 13 Maret 2018 Kementerian Kesehatan dengan tim ANRI menyelenggarakan Sosialisasi Akreditasi Kearsipan yang dihadiri oleh para Kepala Biro Kementerian dan Lembaga lainnya.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi Birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan.

"Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada dokumentasi yang berupa laporan atau prosedur saja, namun bagaimana masyarakat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah Revolusi Mental yang sebenarnya



Pemeriksaan kesehatan secara rutin.

di bidang aparatur," jelas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015 mengamanatkan agar disusun suatu Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara PANRB sebagai acuan K/L dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi masing-masing Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, maka pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan, dengan menekankan pada prioritas peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Suhandoyo, Kementerian Kesehatan saat ini sedang dalam tahapan ke empat yakni pelaksanaan rencana kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang berisikan target dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan birokrasi pemerintahan yang lebih baik, khususnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan



Kunjungan kerja kesehatan ke Kalimantan Barat.

bebas KKN, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dr Untung Suseno Sutarjo, M.Kes selaku Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Pelaksana Harian Reformasi Birokrasi Kemenkes banyak mendorong kemajuan yang dihasilkan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, dari mulai hal yang sederhana sampai tingkatan yang lebih kompleks, seperti misalnya kegiatan *morning briefing* yang dilakukan setiap minggu merupakan hal positif dalam rangka percepatan, penguatan dan evaluasi kegiatan agar dapat implementasikan di seluruh jajaran.

Adanya Tim Pokja RB Kemenkes, Tim Assessor, Tim Monev dan AoC Kemenkes yang di bentuk di setiap tingkatan organisasi membuahkan hasil dalam peningkatan kinerja organisasi yang didukung oleh peningkatan kinerja individu/pegawai. Sekretaris Jenderal menjadi lokomotif dengan *leadership* yang kuat dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.

Dalam rangka menjaga kinerja yang berkualitas tersebut, upaya peningkatan kesejahteraan terus didorong dan mendapat apresiasi dalam bentuk peningkatan besaran prosentase tunjangan kinerja pegawai dari semula 40% diawal kemudian beranjak menjadi 70% dan pada saat ini dalam proses persetujuan Presiden untuk mendapatkan apresiasi di 80% sehingga pegawai



terendah di Kementerian Kesehatan pada grading 5 (lima) mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja di kisaran sebesar Rp 3.134.250,00/bulan. "Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ini mendapat sambutan positif dari seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan hasil yang optimal," papar Suhandoyo.

Optimalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi kedepan tetap di dorong untuk mencapai hasil optimal yang menggambarkan posisi organisasi Kementerian Kesehatan yang berkinerja tinggi. Peletakan konsep dan kebijakan yang kuat oleh Sekretaris Jenderal tentunya beriringan dengan dukungan kuat dalam pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal.



INDONESIA SEHAT DENGAN

Peraturan Menteri Kesehatan dengan

di Lingkungan Kementerian



Harapan dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes kedepan, Kementerian Kesehatan menjadi Kementerian Model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersinergi dengan kebutuhan *stake holder*.

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN DI LINGKUNGAN INTERNAL KEMENKES

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan telah disusun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditujukan agar tata kelola pembentukan perundang undangan dapat terencana dan tersusun dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013, dinyatakan bagian yang memiliki tugas fungsi di bidang hukum pada unit eselon I atau bagian tata usaha di Inspektorat Jenderal harus menyusun program peraturan perundang undangan setiap tahun anggaran berdasarkan usulan unit kerja di lingkungan unit eselon I selain Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dan disampaikan ke Biro Hukum dan organisasi untuk disusun/dibentuk perundang undangan pada tahun berikutnya.

DEKATAN KELUARGA

ruh Pejabat Struktural Kesehatan



Selama ini pengusulan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan dari unit utama eselon I langsung mengusulkan ke Biro Hukum dan Organisasi untuk di proses penetapannya pada tahun berjalan tanpa melalui perencanaan pada tahun sebelumnya. Jumlah dan materi rancangan peraturan perundang undangan yang akan di bentuk pada tiap tahunnya kurang tertata terutama untuk menentukan yang prioritas di setiap tahunnya begitu pula perencanaan anggaran hanya menggunakan data perkiraan rata rata rincian jumlah penyusunan peraturan yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya.

Mencermati kondisi tersebut Sekretaris Jenderal memberi arahan agar disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui Program Legislasi Kesehatan (Prolegkes) setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan, sehingga terdapat Program Legislasi Kesehatan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang undangan di bidang kesehatan, serta Perencanaan anggaran untuk penyusunan pembentukan peraturan perundang undangan di bidang kesehatan, dan akan terjadi kepatuhan dan konsistensi



Kunjungan Sekjen Kemenkes ke Pelabuhan Merak.

dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang undangan setiap tahun dengan baik.

Dengan adanya program legislasi kesehatan maka akan terlihat berapa banyak peraturan yang akan dibuat, disinkronkan dan dicabut, program ini pula akan dapat dialokasikan pembiayaannya secara jelas dan akurat. Penetapan Prolegkes dengan Keputusan Menteri Kesehatan akan bermanfaat sebagai tolak ukur untuk penguatan perencanaan anggaran, penyusunan serta konsistensi dan kepatuhan dalam pembentukan peraturan perundang undangan di bidang kesehatan.

FASILITASI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN BIDANG KESEHATAN (PPNS)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) menyebutkan bahwa Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang



Meninjau salah satu ruang operasi Rumah Sakit.

khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Tenaga Pengawas memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Pada kurun waktu tahun 2016 dan 2017, Kementerian Kesehatan yang dikoordinir oleh Biro Hukum dan Organisasi dan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengirimkan 27 pegawai tahap pertama dan 26 pegawai pada tahap kedua yang terdiri dari pegawai Kementerian Kesehatan dan Dinas Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2018 telah dilakukan pengukuhan PPNS oleh Menteri Kesehatan kepada 30 orang PPNS pusat.



Peresmian Kantin sehat.

MONITORING ONLINE

PADA masa kepemimpinan Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo, Biro Keuangan dan BMN didorong melakukan berbagai terobosan dan inovasi penatalaksanaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset negara.

Untung selalu menekankan dan mengedepankan pelayanan manajemen yang cepat, tepat, dan efektif. Beranjak dari situ, Biro Keuangan dan BMN melakukan digitalisasi dalam hal monitoring penatalaksanaan keuangan serta pengelolaan BMN, penguatan regulasi, dan perbaikan sistem terkait pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa.

Biro Keuangan dan BMN menginisiasi pengembangan sistem Pemantauan Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran secara online. Inisiasi itu didasari dari permasalahan yang sebelumnya kerap muncul, yakni tidak semua unit usaha menyajikan data realisasi anggaran yang akurat dan lengkap, sehingga menyulitkan dalam hal pelaporan mau pun pengambilan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran selanjutnya.

Untuk memperbaiki hal tersebut Sekertaris Jenderal mendorong terbentuknya integrasi pelaporan realisasi anggaran melalui satu sumber. Untuk mewujudkan hal tersebut, Biro Keuangan dan BMN berkoordinasi dengan Kementerian

Pak Untung selalu menekankan dan mengedepankan pelayanan manajemen yang cepat, tepat, dan efektif.

Kuangan menggunakan data Online Monitoring SPAN sebagai data dasar yang kemudian secara otomatis diolah ke dalam aplikasi perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN.

Laporan realisasi keuangan yang didapat jadi bersifat *real time* dan komunikatif, sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan. Monitoring online pelaksanaan anggaran ini terbukti sangat membantu pengambilan kebijakan pelaksanaan anggaran dan program Kementerian Kesehatan.

Hal lain yang terkait dengan pemantauan penatalaksanaan keuangan secara online adalah pemantauan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan penyelesaian kerugian negara dilakukan karena permasalahan dalam penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK ataupun APIP yang berindikasi Kerugian Negara, belum berjalan dengan baik dan tidak termonitor kemajuan penyelesaiannya.

Menindaklanjuti permasalahan di atas diperlukan pemantauan penyelesaian kerugian negara secara terintegrasi dan berbasis web. dengan melakukan input dokumen tindak lanjut data kerugian negara sebagai progres tindaklanjut kerugian negara. Dengan sistem ini terpantau kondisi terkini kemajuan penyelesaian kerugian negara secara keseluruhan.

PENGUATAN REGULASI

Disamping penguatan back office dengan sistem online, untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan tatalaksana keuangan yang tertib dan akuntabel, diperlukan penguatan regulasi serta perbaikan business process pelaporan keuangan dan penatalaksanaannya.

Salah satu regulasi yang diterbitkan dalam penatalaksanaan keuangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan no.55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 99 tahun 2017. Selanjutnya Sesuai amanat Permenkes 55/2017 dibentuk Tim Penilai Usulan dan Tawaran Hibah Langsung sebagai bagian dari *one gate policy* untuk pengelolaan hibah langsung LN. Tim tersebut dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Diharapkan dengan terbitnya permenkes dan dibentuknya tim penilai, pengelolaan hibah langsung luar negeri menjadi tertib dan sistematis.

Selain dalam hal hibah luar negeri, perbaikan *business* proses juga dilaksanakan dalam penatalaksanaan keuangan Badan Layanan Umum. Antara lain dengan membentuk tim penilai Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/124/2018 tentang Tim penilai Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya tim penilai, maka ada landasan kuat untuk merekomendasikan atau menyetujui sebuah Satuan Kerja layak atau sudah tidak layak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

PENGEMBANGAN SIM BMN

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIM BMN) dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan yang kompleks, agar menghasilkan laporan BMN yang akuntabel.

Sistem pengelolaan BMN yang ada pada saat ini sudah menggunakan bantuan aplikasi-aplikasi, tetapi masih bersifat parsial dan semi-manual, sehingga



Sekjen menyerahkan piagam penghargaan BMN Award kepada Menkes.

berisiko terhadap keakuratan data BMN. Hal ini menyebabkan masih banyak permasalahan BMN yang belum terselesaikan, terjadinya tingkat kesalahan dalam proses administrasi BMN, dan koreksi berulang dalam Laporan BMN dan Laporan Keuangan, serta proses pengelolaan BMN yang kurang cepat.

Untuk itu diperlukan penggunaan teknologi informasi agar memudahkan pengawasan dan pemantauan pengelolaan BMN, sehingga dapat terpantau langsung kesalahan atau kesenjangan proses yang ada dan dapat segera diantisipasi. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BMN bersifat terintegrasi, *one source data*, berbasis web (sehingga dapat dipantau secara *realtime*), dan bersifat sebagai peringatan dini.

Dengan adanya SIM BMN akan sangat mengurangi risiko pelaporan keuangan yang tidak akuntabel dan juga risiko menurunnya opini BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes dari WTP, yang sudah 5 kali berturut-turut berhasil diraih.

MORNING BRIEFING

Disiplin menjadi salah satu sikap Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo yang diingat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setyo Budi Hartono. Setiap senin pagi, seluruh jajaran di bawah Sekjen harus mengikuti *morning briefing*.

Setiap kali acara *morning briefing*, Biro Keuangan selalu mendapat jatah untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam bentuk realisasi.

Dari laporan itu akan diketahui satuan kerja mana yang berada di posisi terendah. "Biasanya Pak Sekjen setelah tahu kondisinya, langsung mendorong satuan kerja yang masih di bawah untuk bisa bergerak ke atas. Harus *up..up..up*," ujarnya.

Saat ini realisasi keuangan di Setjen Kemenkes, menurut Setyo Budi sangat menggembirakan. Baru lepas semester I, realisasi anggaran sudah mencapai 95%. Namun di antara 12 satuan kerja di bawah Setjen Kemenkes, ada juga satker yang baru terealisasi 17%. Tapi ada juga satker yang posisinya mendongkrak.

Terkait penguatan regulasi dan sistem pelaporan keuangan dan tata laksana keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menggunakan sistem online, agar transparan, akuntabel, dan tertib. Masing-masing satuan kerja harus tahu tugas pokok masing-masing dalam pelaporan keuangan dan tata laksana keuangan.

"Pak Sekjen meminta agar semua satker itu bekerja on track sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. *Morning briefing* menjadi salah satu acara rutin untuk memonitor dan memotivasi satuan kerja di Kementerian Kesehatan," kenang Setyo Budi.

NATIONAL HEALTH ACCOUNT

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan berperan besar dalam pembaruan pembaruan penghitungan aliran belanja kesehatan. Akun Kesehatan Nasional atau *National Health Account (NHA)* disusun dengan

tujuan untuk mengukur besar total konsumsi serta jumlah dana yang diinvestasikan dalam struktur sektor medis dan peralatan dan penelitian non-komersial untuk mendapatkan layanan kesehatan di masa depan.

NHA memberikan gambaran belanja (pembiayaan) kesehatan secara menyeluruh yang akan sangat membantu pengambil keputusan dalam menjawab beberapa pertanyaan pokok pembiayaan kesehatan seperti *issue* kecukupan (*sufficiency*), pemerataan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), efektifitas (*effectiveness*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketersediaan informasi aliran belanja kesehatan yang dipotret secara sistematis dan **terbaharui** secara berkala dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan alokasi sumber daya kesehatan yang terbatas.

Mulai tahun 2016, Sekretaris Jenderal secara rutin mengalokasikan anggaran untuk penyusunan/produksi NHA dan peningkatan kapasitas tim guna mendorong proses institusionalisasi (*kelembagaan*), baik secara struktur (organisasi) maupun mekanisme pengumpulan data dari berbagai sumber.

Sebelum 2016, ketersediaan dokumen NHA sebagai potret pembiayaan kesehatan Indonesia sangat tergantung pada dukungan mitra pembangunan (donor) baik kapasitas personel maupun pendanaannya karena tidak ada unit khusus yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan. Namun, pada masa kepemimpinan **Sesjen Untung Suseno Sutarjo**, proses NHA secara bertahap didorong di dalam tupoksi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di bawah Sekretariat Jenderal.

Beberapa upaya pelebagaan yang telah dilakukan mencakup pembuatan SK Menkes No. HK.01.07/Menkes/128/2017 tentang Tim NHA, Koordinasi dengan OJK dan mendorong proses terlaksananya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka penyusunan NHA/PHA/DHA.

Kebijakan itu berhasil melahirkan data terbaru dalam bentuk *full figures report* NHA tahun 2010 - 2015 dan Finalisasi *full figures* NHA tahun 2016 serta Data Belanja Kesehatan Kemenkes tahun 2017. Dari situ lahirah

Policy Brief yang membahas pentingnya penguatan fungsi promotif dan preventif untuk mengendalikan laju Inflasi Belanja Kesehatan di Indonesia.

TANTANGAN

Meskipun setiap tahun Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan dokumen NHA yang menelusuri belanja kesehatan dari berbagai sumber, namun beberapa kendala masih dihadapi, di antaranya:

- **Kelembagaan**

Proses institusionalisasi (kelembagaan) baik secara struktur (organisasi) maupun mekanisme pengumpulan data dari berbagai sumber masih membutuhkan penguatan. Hal ini untuk mendukung ketersediaan dokumen NHA, sebagai potret pembiayaan kesehatan Indonesia di mata dunia.

- **Data inflow**

Dokumen yang dihasilkan memiliki gap waktu dua tahun ($t-2$) dari seharusnya satu tahun ($t-1$). Hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan data, seperti data belanja K/L yang baru dapat diakses setelah hasil audit keuangan selesai dilakukan sekitar bulan Juli.

- **Analisis Data**

Mekanisme penelusuran belanja kesehatan di non publik seperti di perusahaan swasta, BUMN, rumah tangga, donor dan LNPRT memerlukan dukungan lebih dalam bentuk studi yang akan membutuhkan sumber daya yang tidak kecil.

PERENCANAAN

Ada dua hal yang harus dilakukan ke depan terkait dengan NHA:

- Produksi NHA dengan kualitas data yang lebih baik dan tepat waktu. Diseminasi hasil NHA akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dalam produksi NHA.
- Mendorong pemanfaatan data NHA dalam perbaikan kebijakan, terutama untuk penguatan program JKN dan promotif preventif. Pemanfaatan NHA untuk perbaikan kebijakan pembiayaan kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional.



Taker Menkes dengan Komisi IX DPR RI tentang Persetujuan Anggaran.

“

Setiap kali acara *morning briefing*, Biro Keuangan selalu mendapatkan jatah untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam bentuk realisasi.

KEMENKES RI

BAB V

KEMENKES RI

“

Uji kompetensi yang wajib dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menyangkut kepemimpinan, kemampuan dan wawasan, serta integritas.

KEMENKES RI

**MEREKA
BICARA**

KEMENTERIAN KESRI



REVOLUSI DAK UNTUK DAERAH

KEMENKES RI

Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENKES



BAYU TEJA Muliawan langsung tersenyum saat ditanya tentang sosok Sekjen Untung Suseno. Ia kemudian menceritakan sosok pimpinannya itu sebagai orang yang konsisten dan tegas dalam mengelola perencanaan dan anggaran Kementerian Kesehatan. Menurut Bayu, karena anggaran Pemerintah terbatas, Pak Sekjen selalu mengingatkan agar dalam merencanakan anggaran harus cerdas. "saya minta Roren melihat dengan cermat, jika ada anggaran yang tidak tepat harus berani "cut", dan alihkan ke kegiatan yang lebih prioritas, baik prioritas nasional maupun kemenkes" kata Bayu menuturkan arahan pimpinannya di setiap kesempatan. Untuk itu Biro Perencanaan dan Anggaran menerjemahkan instruksi itu dengan membuat program dan baru dicarikan anggarannya. Bukan sebaliknya bagi-bagi duit baru ditentukan programnya.

Di bawah pimpinan Sekjen, semua Satker diminta untuk taat dan konsisten dengan prosedur yang ada. "jangan ada kepentingan pribadi, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan" demikian Bayu menceritakan kembali arahan Pak Untung. Menurut Pak Bayu, pak Untung juga tegas dan mengawal betul agar tidak terjadi potensi yang menyebabkan kasus-kasus korupsi. Karena beliau konsisten untuk patuh pada aturan yang ada, agar tidak ada kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum.

Apalagi sejak tahun 2016 anggaran kesehatan naik cukup signifikan menjadi 5% dari APBN ini sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan. Dari seluruh anggaran kesehatan sebesar 44% untuk menjamin masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Naiknya anggaran harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurut Bayu, yang membekas dari Pak Sekjen adalah norma yang harus dipegang Roren dalam mengawal perencanaan dan anggaran Kemenkes. Pertama, utamakan anggaran untuk kegiatan prioritas. Kedua, lihat kembali uraian anggaran kegiatan yang bisa diefisiensi. Ketiga, Integrasikan kegiatan agar tidak tumpang tindih.

Di mata Bayu, Pak Sekjen selalu ingin arahannya segera ditindaklanjuti cepat oleh bawahannya. "beliau ingin kerjakan nggak mau pakai lama, harus cepat, tuntas, dan segera laporkan ke beliau kemajuannya, jika ada kesulitan segera sampaikan ke beliau sehingga pak Sekjen bisa bantu" kata Bayu menceritakan maunya Pak Untung.

Pak Sekjen mendorong kami untuk melihat celah celah yang ada agar program program prioritas kemenkes berjalan dengan baik.

Hal lain yang menjadi perhatian pak Sekjen adalah pelaksanaan PIS-PK. Sejak tahun 2016, PIS PK menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kesehatan. "Jika pendekatan keluarga dijalankan dengan baik dan benar maka banyak masalah kesehatan yang dapat diselesaikan, karena PIS-PK merupakan wujud integrasi yang nyata" kata Pak Untung sebagaimana yang disampaikan oleh pak Bayu.

Untuk mengawal keberhasilan program kesehatan di wilayah provinsi, maka masing-masing eselon I punya daerah binaanya. Menurut pak Bayu, Binwil merupakan sebuah inovasi yang dihadirkan untuk mengawal tiga gerakan nasional, dengan pendekatan keluarga sehat. Lebih jauh Pak Bayu berharap model Binwil juga secara sistematis dilakukan oleh provinsi dalam membina wilayah kab/kota. Melalui model Binwil diharapkan Unit Kerja Kemenkes secara massif mengawal pelaksanaan PIS-PK di daerah.

Inovasi lainnya di Biro Perencanaan ini adalah digitalisasi proses perencanaan dan anggaran yang dikenal aplikasi *e-renggar*. Melalui aplikasi *e-renggar*, pembahasan perencanaan lebih efektif efisien. Aplikasi *e-renggar* juga mampu secara cepat mengetahui prioritas alokasi anggaran tertentu melalui pencarian pintar. Dalam aplikasi *e-renggar* juga terdapat aplikasi *e-performane* yang mampu melihat secara cepat akuntabilitas setiap entitas di Kemenkes. Adanya *e-performance* telah diapresiasi KemenPAN & RB menjadikan nilai SAKIP Kemenkes naik secara bermakna.



Pak Sekjen bila sudah memberi instruksi, akan dikawal sampai selesai sehingga kita harus mengawal semua program yang disarankan agar terimplementasi dengan baik.

"Kami juga mendapatkkan penghargaan dari Bappenas berupa inovasi terbaik untuk proses evaluasi perencanaan dan anggaran. Bayu melihat keberhasilan yang dicapai Biro Perencanaan dan Anggaran ini berkat dukungan Sekjen yang memiliki jaringan dan hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya cukup baik.

Pak Sekjen bila sudah memberi instruksi, akan dikawal sampai selesai sehingga kita harus mengawal semua program yang disarankan agar terimplementasi dengan baik. Apalagi setiap tahun DAK semakin besar mengalir ke daerah, dan selalu ada sub bidang baru yang dibiayai DAK. Apabila sebelumnya hanya ada dana alokasi khusus fisik reguler, dan dana alokasi khusus non fisik, maka sekarang ini telah berkembang dengan adanya dana alokasi khusus fisik afirmasi dan penugasan.

Untuk tahun ini dan 2019 ada program gerakan nasional yakni penurunan prevalensi angka *stunting*, pengendalian penyakit Tuberkolusis dan cakupan imunisasi, yang dibiayai dari DAK. Selain itu untuk kebutuhan operasional setiap puskesmas memiliki dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang nilainya naik setiap tahunnya. Anggaran BOK ini di setiap puskesmas berbeda terutama menyangkut letak geografis.



Sekjen semangati tim Nusantara Sehat di Kalbar.

Sisi menarik dari keberhasilan komunikasi Sekjen Kemenkes dengan lembaga-lembaga negara, tiga program nasional yang digelar oleh Kementerian Kesehatan itu direspons positif oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan seluruh anggota Dewan ikut mensosialisasikan tiga tema nasional bidang kesehatan itu. "Pemerintah dan DPR sama-sama mengecek di lapangan, mengawasi, memonitor dan mensosialisasikan bersama. Ini hal yang bagus. Sebab DPR itu mulai dari ketua hingga seluruh anggota Komisi IX bergerak turun ke lapangan," tambahnya. Di tengah padatnya tugas, Bayu menilai Sekjen Untung selaku atasannya langsung, merupakan sosok yang komunikatif dan *easy going*.

Terlebih lagi sebagai seorang pemimpin selalu mendengarkan paparan atau laporan dari anak buahnya. "Kalau saya dipanggil ke ruangnya, selalu ditanya menurutmu bagaimana? Setelah itu saya menjelaskan apa yang hendak dilakukan. Bapak selalu mendengar sampai tuntas dan barulah dikemukakan apa yang diinginkan. Pokoknya simpel, *enggak bertele-tele*. Ketemu sekitar lima sampai sepuluh menit sudah harus bisa paham. Kita juga mudah berkomunikasi dan mudah ditemui. Dan terpenting semua program yang beliau instruksikan selalu dikawal sampai selesai. Sampai tuntas. Jadi beliau ini selalu memiliki solusi apapun itu," pungkasnya.



BERTEMU SEKJEN HARUS ADA SOLUSI

KEMENKESRI

Drs Setyo Budi Hartono MM
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG-MILIK NEGARA



"JANGAN sekali-kali datang ke Pak Sekjen jangan bicara masalah. Boleh bicara masalah, tetapi harus ada solusinya. Inovasinya apa?" kata Kepala Biro Keuangan dan Milik Negara Kementerian Kesehatan, Setyo Budi Hartono menanggapi kesan pertama saat mengenal Sekjen Untung Suseno Sutarjo.

Setyo Budi teringat saat rakor kepegawaian yang diikutinya. Sekjen Untung menyampaikan arahan bahwa setiap masalah harus ada solusi berupa inovasi-inovasi.

Hal-hal semacam itu menjadi perhatian Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), selaku biro di bawah Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan. Setiap kali acara *morning briefing* pada Senin pagi, Biro Keuangan dan BMN selalu mendapat jatah untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam bentuk realisasi penyerapan anggaran.

Dari laporan itu akan terlihat satuan kerja mana yang berada di posisi terendah. "Biasanya Pak Sekjen setelah tahu kondisinya, beliau langsung mendorong satuan kerja yang masih di bawah untuk bisa bergerak ke atas. Harus *up..up..up*," ujarnya.

Saat ini realisasi keuangan di Setjen Kemenkes, menurut Setyo Budi sangat mengembirakan. Baru lepas semester I, realisasi anggaran sudah mencapai 95%. Namun di antara 12 satuan kerja di bawah Setjen Kemenkes, ada juga satker yang real posisinya realisasinya mendongkrak.

Terkait penguatan regulasi dan sistem pelaporan keuangan dan tata laksana keuangan, Biro Keuangan dan BMN menggunakan sistem online, agar transparan, akuntabel, dan tertib. Dan masing-masing satuan kerja harus tahu tugas pokok masing-masing dalam pelaporan keuangan dan tata laksana keuangan. "Pak Sekjen meminta agar semua satker itu bekerja *on track* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," jelasnya.

Selain masalah ketertiban dalam pengelolaan keuangan, Sekjen juga mengharapkan pengembangan sistem manajemen informasi barang milik negara. "Kita tahu anggaran Kementerian Kesehatan terbesar kelima di antara 86 kementerian dan lembaga. Di dalamnya itu ada anggaran belanja barang.



Sekjen menerima penghargaan BMN dari Menkeu dan Jakarta

belanja mengikat seperti gaji, honor, dan insentif, serta belanja modal.

Untuk belanja modal ini aset Kementerian Kesehatan mengalami peningkatan sekitar Rp5 triliun. "Aset Kementerian Kesehatan memang luar biasa banyak. Pak Sekjen ingin tahu mana aset bermasalah dan mana aset yang tidak bermasalah serta pemanfaatannya. Posisi *locus*-nya di mana, dan sebagainya. Maka itu kita reinventaris lagi."

SISTEM INOVASI BARANG MILIK NEGARA

Untuk memudahkan pencarian dan pelacakan aset ini, Setyo Budi membangun sistem inovasi pengelolaan barang milik negara. Sistem ini sangat membantu, efisien dan efektif. Pasalnya di Kementerian Kesehatan terdapat 418 satker, dan selama ini pelaporan keuangan dilakukan secara semi manual. Baru 38 satker yang bisa terakses secara online.

"Setelah dilantik menjadi Kepala Biro Keuangan dan BMN, saya diminta harus bisa membuat laporan terkait aset dengan kondisinya (bermasalah atau tidak), dan dimana lokasinya. Ternyata hasilnya tidak maksimal karena belum seluruhnya bisa terakses secara online. Intinya beliau tidak *happy* dengan hasilnya," ujar Setyo Budi.

Untuk itulah lahir sistem Pengelolaan BMN di Kementerian Kesehatan melalui Sistem Informasi Manajemen secara online dan terintegrasi seluruh satker. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pernah memberikan opini *disclaimer* tepatnya pada tahun 2010 dan 2011, dikarenakan pengelolaan aset yang sangat buruk.

Kemudian pada tahun 2012 mendapatkan predikat WDP atau Wajar Dengan Pengecualian. Barulah pada tahun 2013 hingga 2017, laporan keuangan Kementerian Kesehatan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian berkelanjutan lima tahun, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi Kementerian Kesehatan.

Prestasi yang diraih Kementerian Kesehatan ini menjadi hal penting, karena seluruh satuan kerja telah bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Inovasi sistem online ini lebih efisien karena satker dan eselon I bisa melihat mana saja aset bermasalah dan berapa taksiran harga. Apabila ada masalah hukum, maka Biro Hukum dan Organisasi yang akan menyelesaikan dengan cara mediator. Bila tidak ada solusi, maka akan diserahkan ke ranah hukum hingga menunggu keputusan tetap.

Dalam jangka pendek, Setyo Budi sudah mengintegrasikan aset yang meliputi pengelolaan BMN tanah dan bangunan, Rumah Negara serta kendaraan bermotor. Kemudian untuk jangka menengah, targetnya adalah aset alat kesehatan, meubeler, mesin pengolah data, aset tak berwujud, dan lain-lain.

Bagi Setyo Budi, sosok Untung Suseno Sutarjo adalah sosok yang tegas, *thought*, keras, dan berkomitmen tinggi. "Beliau cepat mengambil keputusan," kata Setyo Budi yang mengenal Untung Suseno Sutarjo saat sama-sama berada di Biro Perencanaan pada tahun 2008. "Saya kemudian menjadi Direktur RS Mata Cicendo Bandung pada tahun 2014, dan kembali ke Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 sampai sekarang, dan langsung di bawah Sekretariat Jenderal."

Diakuinya bahwa banyak orang yang tidak paham bila atasannya sedang marah. "Sewaktu raker kepegawaian, Pak Untung sempat bicara "Anda tahu *enggak* kalau saya sedang marah?" Pasti tidak tahu. Kalau saya

Biasanya Pak Sekjen setelah tahu kondisinya, beliau langsung mendorong satuan kerja yang masih di bawah untuk bisa bergerak ke atas. Harus *up..up... up.*" ujarnya.

menjawab *Whatsapp* Anda hanya kalimat "oke" itu artinya saya marah. Ya intinya seperti itu, kalau menghadap Pak Sekjen ada masalah harus ada solusinya. Bukan hanya ada curhatan masalah saja," pungkasnya.

Pada masa kepemimpinan dr. Untung Suseno Sutarjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Biro Keuangan dan BMN melalui arahan dan dukungan beliau melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam keuangan, pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset negara.

Sekjen Untung Suseno Sutarjo selalu mengedepankan pelayanan manajemen yang cepat, tepat, dan efektif memacu Biro Keuangan dan BMN untuk melakukan digitalisasi, dalam hal monitoring penatalaksanaan keuangan serta pengelolaan BMN, penguatan regulasi dan perbaikan sistem terkait dengan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan juga penatalaksanaan keuangan.

INTEGRASI PELAPORAN

Biro Keuangan dan BMN menginisiasi mengembangkan sistem pemantauan realisasi dan pelaksanaan anggaran secara online. Hal ini didasari dari permasalahan sebelumnya, yaitu tidak semua unit utama menyajikan data

realisasi anggaran yang akurat dan lengkap, sehingga menyulitkan dalam hal pelaporan maupun mengambil kebijakan pelaksanaan anggaran selanjutnya. Untuk memperbaiki hal tersebut, atas dorongan Sekretaris Jenderal dilakukan integrasi pelaporan realisasi anggaran melalui satu sumber.

Biro Keuangan dan BMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, menggunakan data Online Monitoring SPAN (OMSPAN) sebagai data dasar, yang kemudian secara otomatis diolah ke dalam aplikasi perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN. Laporan realisasi keuangan yang di dapat bersifat *real time* dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan. *Monitoring online* pelaksanaan anggaran ini sangat membantu dalam hal pengambilan kebijakan pelaksanaan anggaran dan program di Kementerian Kesehatan.

Hal lain yang terkait dengan pemantauan penatalaksanaan keuangan secara online adalah pemantauan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan penyelesaian kerugian negara dilakukan karena permasalahan dalam penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK ataupun APIP yang berindikasi Kerugian Negara, belum berjalan dengan baik dan tidak termonitor kemajuan penyelesaiannya.

Dari beberapa jenis Kerugian Negara yaitu, kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Non Bendahara dan Pihak Ketiga, penyelesaian tindak lanjut terhadap Kerugian Negara tersebut masih banyak yang belum tuntas dilihat dari rendahnya tingkat pembayaran angsuran maupun pelunasan.

Di samping penguatan *back office* dengan sistem *online*, dalam rangka pelaporan keuangan dan tata laksana keuangan yang tertib dan akuntabel, diperlukan penguatan regulasi serta perbaikan *business process* pelaporan keuangan dan penatalaksanaannya. Salah satu regulasi yang diterbitkan

Selain dalam hal hibah luar negeri, perbaikan *business proses* juga dilaksanakan dalam penatalaksanaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Antara lain dengan membentuk Tim Penilai Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Pak Sekjen bersama Kabiro Keuangan memperlihatkan piagam BMN.

di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/124/2018 tentang Tim penilai Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya Tim Penilai, maka ada landasan yang kuat untuk merekomendasikan atau menyetujui sebuah Satuan Kerja layak atau sudah tidak layak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam penatalaksanaan keuangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 55 tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor. 99 tahun 2017.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 55 tahun 2017, dibentuk Tim Penilai Usulan dan Tawaran Hibah Langsung sebagai bagian dari *one gate policy* untuk pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri. Tim tersebut dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Diharapkan dengan terbitnya Permenkes dan dibentuknya Tim Penilai, pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri menjadi tertib dan sistematis.



Pak Sekjen meminta agar semua satker itu bekerja on track sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanggungjawaban keuangan negara dan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Kesehatan dijadikan *Pilot Project* Penerapan, penilaian, dan Review Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bersama 15 (Lima Belas) Kementerian/Lembaga Lainnya. Adapun langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut (1) penetapan Tim Penilaian PIPK dan Penyusun Rancangan Pengendalian Intern, (2) penyusunan rancangan pengendalian, baik untuk pengendalian transaksi keuangan maupun penyusunan rancangan pengendalian untuk penyusunan konsolidasi laporan keuangan, dan (3) implementasi dan penilaian PIPK dalam penyusunan Laporan Keuangan mulai dari tingkat unit akuntansi satuan kerja sampai dengan unit pelaporan tingkat kementerian.

PENGUATAN DAN PERCEPATAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

SELAIN dua hal diatas, Pak Sekjen juga selalu mendorong upaya percepatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan., dengan mengusulkan beberapa inovasi yg harus dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN. Hal in sangat penting dilakukan mengingat proses pengadaan barang dan jasa adalah hal yang strategis yang sangat diperlukan untuk melaksanakan program prioritas di Kementerian Kesehatan, seperti



Sekjen tes fungsi alat kesehatan.

pengadaan obat-obatan, pengadaan program makanan tambahan, dan pengadaan alat kesehatan

Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai *pilot project* pelaksanaan katalog elektronik di tingkat Kementerian dan Lembaga. Sehubungan hal tersebut, Biro Keuangan dan BMN menginisiasi persiapan katalog sektoral yang meliputi bidang sektoral bidang kesehatan yaitu obat, alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan serta Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM). Inovasi lain yang didorong oleh Biro Keuangan dan BMN dibawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa adalah pendanaan program-program Kementerian Kesehatan dengan skema pembiayaan KPBU. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pada tahun 2018 ini, telah dimulai skema pembiayaan KPBU di lingkungan UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan yaitu Tower A dan Tower B RS Kanker Dharmais. Program-program sejenis akan didorong untuk menggunakan skema KPBU untuk mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah.

LEMBUT
TAPI TEGAS,
PENGAYOM
DAN PENJAGA
KETERTIBAN

Sundoyo Sh, Mkm, M Hum
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN



SENIN, 10 April 2017, Sundoyo SH, MKM, M Hum dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan. Tidak lama setelah itu, ia dipanggil ke ruangan Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr Untung Suseno Sutarjo M Kes.

"Pak Untung bertanya pada saya, benarkah banyak aset milik Kementerian Kesehatan yang dikuasai pihak lain tidak bisa ditertibkan? Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi diskusi menarik yang kami lakukan hari itu," tutur Sundoyo.

Salah satu aset yang menjadi pembicaraan paling panas ialah lahan di Jalan dr Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tanah seluas 18,7 hektare itu dikuasai pihak lain.

Sejak 1935, penguasa lahan membangun dan mengoperasikan Bogor Golf Club. BGC pun tercatat sebagai lapangan golf tertua kedua di Indonesia, setelah Jakarta Golf Club yang mulai beroperasi pada 1872. Kementerian Kesehatan tidak pernah mendapatkan apa-apa atas penggunaan lahan itu. Pun ketika pada 1994, Kemenkes memiliki bukti kepemilikan dengan diterbitkannya sertifikat lahan yang berada di depan Rumah Sakit Dr Marzoeki Mahdi itu, kondisi tidak berubah.

Upaya menarik kembali lahan itu dilakukan lewat pengadilan. Proses peradilan berlangsung mulai 2007. Keputusan inkrah pun terbit pada 2011 yang menyatakan lahan itu milik Kementerian kesehatan. Namun, manajemen BGC bergeming. Orang kuat yang duduk di dalam perusahaan itu tidak mau mundur.

"Pak Sekjen tidak percaya, aset milik kementerian sudah 30 tahun dikuasai orang lain dan tidak bisa diambil kembali. Padahal, dari semua sisi, kita menang, ada sertifikat, ada keputusan pengadilan," kisah Sundoyo.

Untung pun menegaskan aset yang menjadi bagian dari Rumah Sakit Dr Marzoeki Mahdi itu harus kembali ke Kemenkes. Ia memberikan arahan detail kepada pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, untuk melakukan tindakan tahap demi tahap. Yang pertama, Sundoyo harus menemui empat kepala biro

Tanah yang di Jl.Semeru Bogor yang dikuasai oleh BGC sudah inkraacht berdasarkan putusan pengadilan. Untuk itu saya tugaskan kepada saudara agar tanah tersebut dapat segera dieksekusi.

hukum yang bertugas sebelumnya. Satu per satu ditemui untuk membicarakan masalah itu.

Keempat mantan pejabat itu mengaku sudah berusaha mengurus lahan tersebut saat menjabat, namun mentok. Pola yang mereka lakukan sama dari kepala biro yang pertama hingga keempat.

Setelah menang di pengadilan, mereka menyurati manajemen Bogor Golf Club. Setelah itu, kedua belah pihak bertemu dan negoisasi. Hasilnya selalu deadlock. Kementerian Kesehatan kemudian mengajukan permintaan eksekusi. Lagi-lagi, tidak menunjukkan hasil, karena BGC melawan saat eksekusi berlangsung. BGC juga tidak bertindak sembarangan. Mereka merasa kuat karena juga mengantongi sertifikat untuk lahan seluas 1.300 meter persegi, pada sebagian lahan 18,7 hektare tersebut.

Gugatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan atas penerbitan sertifikat itu mentok. Keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung memenangkan manajemen BGC. "Ketika saya melaporkan itu ke Pak Untung, beliau dengan cerdik bertanya, apakah tindakan BGC itu ada pidananya? Dari dulu mereka juga tidak menyewa," lanjut Sundoyo.

Dengan pertanyaan itu, Untung meminta pemegang gelar magister Administrasi Kesehatan dari Universitas Indonesia itu menemui Komisi Pemberantasan Korupsi. Awalnya sekadar berkonsultasi. Tak dinyana, kedatangan Sundoyo ke KPK mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Deputi Pencegahan KPK menyatakan penguasaan lahan secara tidak sah itu bisa dipidana. KPK juga siap memberi dukungan penuh untuk Kementerian Kesehatan.

Kembali berkonsultasi dengan Untung Suseno, Sundoyo mendapat izin untuk melanjutkan 'perjuangan'. Master Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada itu menemui manajemen BGC, dengan meminta pendampingan dari petugas KPK. "Saya datang. Tidak berpanjang lebar saya katakan ini tanah negara, ada sertifikat dan ada keputusan pengadilan. Anda serahkan tanah ini kepada kami atau kasus ini saya serahkan ke KPK," ancam pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kemenkes ini.

Manajemen BGC pun tidak berdaya. Rabu, 8 November 2017, lahan itu diserahkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara atas lahan seluas 1.300 meter persegi yang sudah disertifikatkan BGC, Sundoyo juga tidak goyah. "Meski menang di pengadilan, saya bilang saya tidak peduli. Hukum bisa begitu, tapi secara faktual lahan itu milik negara. Saya tetap akan meminta KPK mengawal kami."

Manajemen BGC lagi lagi menyerah. Bahkan ketika diajak bersama-sama menghadap ke Badan Pertanahan Negara, mereka pasrah. Setelah pengukuran, lahan yang sudah disebar menjadi 5 sertifikat itu disatukan kembali, menjadi lahan negara lagi.

Sundoyo bisa berlega hati. Namun, sang komandan di belakangnya Untung Suseno mengingatkan dia bahwa masih banyak tugas yang harus mereka selesaikan. "Pak Untung itu cerdas. Pikirannya banyak menerobos ke bidang-bidang lain di luar disiplin ilmu yang beliau kuasai, termasuk di bidang hukum. Arahannya luar biasa bagi kami," tandas Sundoyo.

Perjuangan merebut kembali lahan negara memang belum selesai. Sejumlah aset masih dikuasai pihak lain, di antaranya rumah dinas



RUJUKAN LEGISLASI DPR RI





laboratorium kesehatan di Palembang, Sumatra Selatan, politeknik kesehatan di Bandung dan Surabaya, serta rumah dinas Rumah Sakit Dr Marzoeeki Mahdi di Bogor.



"Upaya menertibkan kembali aset-aset itu sudah memasuki jalur legitasi, proses sidang di pengadilan. Saya dan Pak Untung optimistis aset-aset itu bisa dikembalikan ke negara," sambung pria yang setelah lulus kuliah langsung meniti karier di Kementerian Kesehatan ini.

LINDUNGI TENAGA KESEHATAN

PADA era 2015-2016, dunia kedokteran diguncang dengan adanya temuan gelontoran dana dari industri farmasi untuk tenaga kesehatan yang nilainya mencapai ratusan miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menelaah masalah ini mengindikasikan praktik itu sebagai gratifikasi.



Kepala Biro Hukum menandatangani dokumen tanah Kemenkes di Bogor.

Kementerian Kesehatan memberi perhatian besar atas masalah itu. Pertimbangannya jika dibiarkan fenomena itu akan menjadi bola liar dan akhirnya menjerat banyak tenaga kesehatan berhadapan dengan hukum. "Kami harus menjelaskan kepada KPK bahwa di belakang semua itu ada masalah sponsorship yang diberikan industri farmasi untuk para dokter. Itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dokter," ujar Sundoyo.

Rembukan di tubuh Kementerian Kesehatan pun dilakukan. Dipimpin Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo dicapai kesepakatan untuk menjelaskan masalah itu ke KPK.

Dokter dan dokter gigi berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuannya dengan mengikuti seminar, workshop, sehingga mendapat satuan kredit profesi. Dalam satu tahun, mereka wajib mendapatkan 20 kredit.

Dalam satu tahun, rata-rata seorang dokter harus mengikuti 10 seminar. Jika setiap seminar mensyaratkan pembayaran Rp3 juta, maka dia harus



Menkes bersama KPK menandatangani kesepakatan anti *Fraud* dengan KPK.

mengeluarkan Rp30 juta. "Jumlah dokter saat itu mencapai 126 ribu orang. Karena mahal dan negara tidak mampu memfasilitasinya, *sponsorship* dari perusahaan farmasi tidak mungkin ditolak," lanjut Sundoyo.

Dengan penjelasan yang rinci, tim dari Kementerian Kesehatan mampu melunakkan KPK. Alhasil, KPK mengizinkan *sponsorship*, namun harus diatur sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hubungan baik antara Kementerian Kesehatan dan aparat penegak hukum terus dijaga di era Untung Suseno duduk sebagai Sekjen. Dalam urusan Jaminan Kesehatan Nasional, misalnya, Sekjen Kemenkes juga menggandeng KPK.

"Pak Untung menginisiasi adanya *memorandum of understanding* antara BPJS, Kemenkes dan KPK. Memang, seolah-olah tindakan itu dibuat Kemenkes untuk melindungi rumah sakit dan dokter. Tapi Pak Sekjen menegaskan itu adalah upaya kita untuk mengawal kebijakan, sehingga bisa berjalan baik," ungkap Sundoyo.

Pak Untung, lanjutnya, sangat antisipatif, sehingga menaruh perhatian besar pada persoalan deteksi dini, pencegahan. Hubungan kementerian dengan



aparatus penegak hukum terjaga baik. Salah satu buktinya terjadi ketika Kemenkes digugat pihak ketiga atas aset Rumah Sakit Fatmawati. Seorang warga mengklaim sebagian lahan di rumah sakit itu milik keluarganya.

Pak Untung meminta bantuan Kejaksaan Agung. Hasilnya, warga yang biasanya selalu marah dan tidak terkendali, bisa dijinakkan. Dia diam dan tidak berulah lagi. Kejadian lain yang nyaris menyeret tenaga kesehatan ialah peredaran vaksin palsu yang diproduksi sepasang suami istri warga Bekasi, awal 2017. Untung meminta Biro Hukum berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. "Pak Untung minta jangan sampai ada tenaga kesehatan yang tidak salah berurusan dengan hukum. Harus kita kawal," cerita Sundoyo.

Untung di mata Sundoyo juga merupakan seorang yang sangat antisipatif. Dalam proses lahirnya UU Tenaga Kesehatan, misalnya, tanpa pemikiran Untung yang cerdas, maka penyediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil akan sulit terpenuhi.

Sundoyo bercerita, saat DPR membahas UU Kesehatan, pada waktu hampir bersamaan, mereka juga sudah memparipurnakan UU Aparatur Sipil Negera

dan UU Otonomi Daerah. Setelah diketok palu, UU ASN mengatur bahwa aparat sipil negara hanya dua, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Aturan itu akan menutup peluang bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembangunan kesehatan dari daerah pinggiran, sesuai amanat dan keinginan Presiden Joko Widodo. Karena UU sudah diketok, dengan cerdas Pak Untung mengusulkan klausul memasukkan tenaga dengan penugasan khusus ke dalam UU Kesehatan," jelasnya.

Masalah pun terpecahkan. Kementerian Kesehatan pun dengan leluasa mampu mengirim tenaga kesehatan lewat program Nusantara Sehat. Sampai saat ini, sudah 10 tahapan yang dikirim, dengan setiap tahapannya mencapai 400-600 dokter. Mereka pun mengisi kekurangan tenaga kesehatan di pedalaman, kepulauan, daerah terpencil, dan perdesaan. "Bayangkan jika Pak Untung tidak memasukkan klausul itu, kita sulit melakukan penetrasi kesehatan ke daerah-daerah," ujar Sundoyo.

Kejelian Untung dalam bidang perundang-undangan kembali teruji saat DPR menggulirkan rancangan UU soal badan karantina. Di mata badan legislatif, karantina hendak dibuat sebagai satu badan, yang isinya berupa karantina kesehatan, hewan, tumbuhan dan ikan.

Untung sempat meradang dengan keinginan itu. Soal karantina kesehatan tidak bisa disatukan ke dalam badan karantina. Proses cegal tangkal akan bermasalah. Kebijakan itu akan membuat benturan karena ada dua pengambil kebijakan, yakni kepala badan dan menteri kesehatan.

Kekukuhan Untung membuahkan hasil. "Akhirnya karantina kesehatan tidak digabungkan ke dalam badan karantina. Hal-hal prinsip seperti itu, sangat dipegang teguh Pak Untung," tegas Sundoyo.

KERAS DEMI KEMENKES

JUMAT sore, seorang staf datang ke ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo. Dia bercerita bahwa ada bantuan dari luar negeri yang berbentuk barang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.



"Pengurusan barang itu supaya bisa keluar dari pelabuhan butuh waktu. Padahal, dari hari ke hari, sewa parkir kontainer harus dibayar dan harganya cukup mahal bisa sampai ratusan juta rupiah," cerita Sundoyo.

Mendengar keluhan itu, Untung justru tenang-tenang saja. Dia seperti tidak berempati dengan pengakuan sang staf. Namun, di balik semua itu, ternyata Untung waspada. Dia tidak mudah masuk perangkap dan diperdaya oleh anak buahnya itu. Taktis, ia menyatakan pengurusan barang bantuan di pelabuhan adalah tugas dan fungsi sang staf. "Kamu juga sudah bertahun-tahun mengerjakan soal itu," ungkap Untung, seperti ditirukan Sundoyo.

Bukannya menghibur pegawai itu, pria berbadan besar dan bersuara bariton itu justru mengeluarkan ancaman. "Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, kamu akan saya pecat, karena ini bisa merugikan negara. Sampai Senin nanti sudah harus ada solusinya," tandas Untung.

Sang staf tidak berkulit. Dia mundur dari hadapan Untung. Ancaman sang atasan terbukti manjur. Bukan pada Senin, tapi Sabtu, sehari setelah menemui Untung, ia menelpon. "Sudah bisa beres Pak.. Senin barangnya bisa keluar," tuturnya.

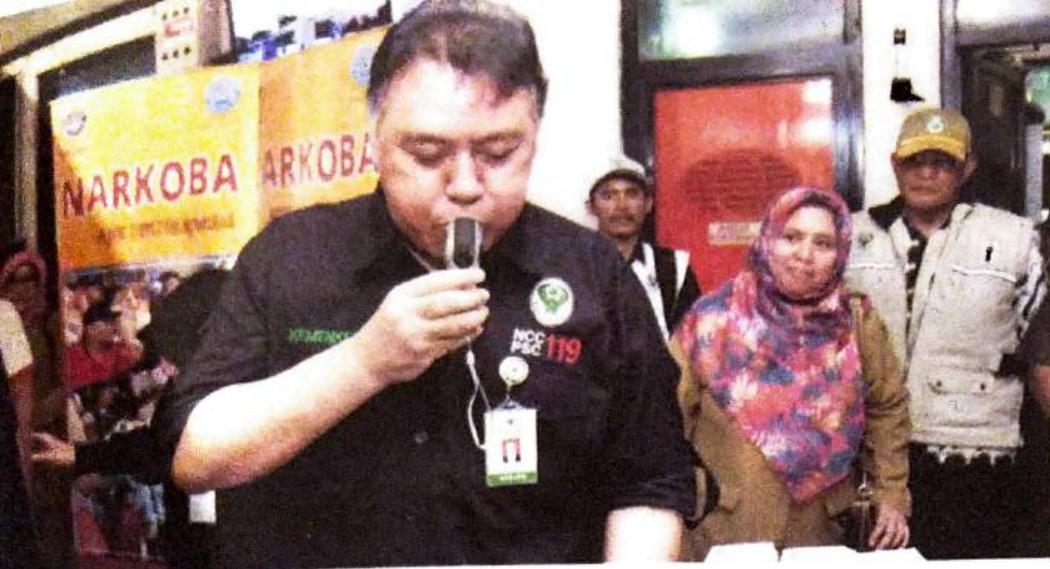
Sosok Untung di mata Sundoyo dan banyak pegawai lain di Kementerian Kesehatan, *nyaris* lengkap. Dia bisa seperti seorang bapak yang lembut, tapi bisa juga tegas dan keras. Dia juga bisa menjadi motivator, tapi kadangkala penuh hardik dan ancaman. "Bapak memang penuh toleransi. Tapi jika ada masalah yang harus ditangani dengan ketegasan, beliau juga sangat tegas," ungkap Sundoyo.

Cerita lain dikisahkan Sundoyo tentang bagaimana arahan Untung untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tubuh Kementerian Kesehatan. Suatu hari, Untung menunjuk keharusan vaksin meningitis bagi terhadap calon jemaah haji dan jemaah umroh yang hendak masuk ke Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Kesehatan hanya mengizinkan suntik meningitis dilakukan di sejumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan.

"Pak Untung mengatakan kemampuan KKP sangat terbatas, sehingga antrian pasti akan sangat panjang. Yang pertama dia mengaku sangat kasihan terhadap warga yang hendak pergi ke Arab Saudi, dan yang kedua kondisi itu bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan," tutur Sundoyo.

Dia tidak mau kondisi itu berlarut-larut. Sundoyo diminta menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengizinkan vaksin meningitis bisa dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan, sepanjang memenuhi persyaratan.

Berkat kejelian Untung, saat ini sejumlah rumah sakit sudah bisa melakukannya. Beban beberapa Kantor Kesehatan Pelabuhan pun berkurang. "Alhamdulillah, prosedur dan pelayanan di KKP Kelas I Tanjung Priok sangat bagus dan memuaskan. Secara total, saya hanya butuh waktu 17 menit untuk mendapatkan vaksinasi meningitis, sejak masuk ruangan sampai keluar ruangan KKP," cerita Tri Budiarta, seorang warga, saat berkunjung ke KKP Tanjung Priok, 28 Februari lalu, sebelum dia menunaikan ibadah umroh.



Sekjen melakukan tes kadar alkohol.

Persentuhan sebenarnya antara Untung dan Sundoyo, tentu saja terjadi saat Kementerian Kesehatan harus menyusun peraturan menteri. Sebelum pembenahan yang dilakukan keduanya, jumlah Peraturan Menteri Kesehatan yang diterbitkan setiap tahun melebihi 100 risalah.

Namun, di lapangan, ternyata tidak semua Permenkes itu bisa terlaksana dengan baik. "Pak Untung menyatakan kondisi itu terjadi karena para penyusun Permenkes hanya berada di belakang meja. Saat menyusun, mereka tidak memikirkan implementasi aturan itu di lapangan, padahal geografis Indonesia sangat beragam, dengan tingkat kerentanan yang berbeda," jelas Sundoyo.

Suatu peraturan bisa berlaku dengan lancar di Jakarta, tapi tidak di Papua. Lokalitas, kearifan lokal, sangat penting untuk menjadi pertimbangannya. "Bapak selalu minta, jika membuat aturan, singkirkan dulu ego program masing-masing bagian. Jika mengedepankan ego program, maka akan banyak program yang harus dibuat," kisah Sundoyo.

Karena itu, Untung selalu berbicara soal simplifikasi. Mana yang bisa digabung, ya digabung. Yang sudah benar-benar tidak bisa digabung, bar dibuat peraturan sendiri. "Dengan penegasan itu, jika sebelum 2014, peraturan menteri bisa mencapai 100-120, di masa Pak Untung berkurang jauh, tinggal 60-70 peraturan menteri per tahunnya. Banyak penghematan biaya yang bisa dilakukan dengan simplifikasi ala Pak Untung," tandas Sundoyo.

**PEGAWAI
KEMENKES
HARUS
SEHAT DAN
PROFESIONAL**

KEMENKES RI

drg Murti Utami MPH
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN KESEHATAN





Pimpinan yang mampu membaca karakter bawahannya dan bijak memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam menyelesaikan masalah.

MASALAH kepegawaian menjadi hal krusial di Kementerian Kesehatan. Terlebih lagi Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Inilah yang menjadi perhatian Sekjen Untung dalam mengatur kepegawaian di Kementerian Kesehatan, agar memiliki performa yang baik dan profesional. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, drg Murti Utami MPH mengatakan bahwa manajemen ASN ini menjadi hal penting. Untuk itulah perubahan *mindset* kerja menjadi hal utama.

"Sekjen sebagai koordinator mengharapkan agar manajemen SDM lebih baik, inovatif, dan kerja lebih baik. Bagaimana sebagai pelayan publik bisa melayani masyarakat lebih baik. Pak Sekjen menekankan hal itu," kata Murti Utami yang akrab dipanggil Ami itu.

Salah satu tugas yang telah diselesaikan di Biro Kepegawaian adalah menyelesaikan surat keputusan pengangkatan atau kenaikan jabatan. "Selama dua tahun ini SK-SK itu sudah selesai sebelum batas waktu yang ditentukan yakni sebelum 1 April dan 1 Oktober. Jadi kami telah bekerja tepat waktu," jelasnya.

Tentunya dalam manajemen kepegawaian ini, Biro Kepegawaian juga menerapkan teknologi aplikasi untuk sistem informasi dan pelayanan administrasi kepegawaian. Biro Kepegawaian juga sedang mengembangkan

manajemen karier dari eselon satu hingga eselon empat. "Tantangan baru yang diberikan Sekjen kepada saya adalah mempersiapkan kandidat-kandidat yang punya kompetensi bagus harus dipromosikan naik jabatan lebih tinggi. Caranya dimulai dengan uji kompetensi. Tahun 2017 telah dilakukan uji kompetensi sebanyak 561 dan tahun 2018 sebanyak 400 uji kompetensi untuk eselon dua sampai dengan eselon empat," terangnya.

Proses seleksi pun dilakukan terbuka dan uji kompetensi berlangsung bagus dan lancar. Biro Kepegawaian telah melakukan pemetaan untuk kompetensi ini agar tidak terjadi gap dalam keberlangsungan jenjang karier ASN di Kementerian Kesehatan. Sikap kepemimpinan juga menjadi bagian dari uji kompetensi tersebut. Ami menyebutkan dengan adanya pemetaan kompetensi yang dimiliki Kementerian Kesehatan, memudahkan untuk melihat kompetensi seluruh pegawai. "Uji kompetensi ini berlaku dari eselon I sampai staf. Nantinya promosi rotasi dan mutasi ini akan lebih mudah karena kami memiliki data base uji kompetensi. Pendataan kompetensi ini memudahkan pegawai dirotasi, mutasi sesuai dengan kemampuannya."

Uji kompetensi yang wajib dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menyangkut kepemimpinan, kemampuan dan wawasan, serta integritas.

"Konsentrasi Sekjen selain administrasi adalah kesehatan para pegawai. Para pegawai wajib melakukan *medical check up*. Kalau dulu hanya eselon I dan II, sekarang sampai eselon IV. Itu setiap tahun. Tahun depan *medical check up* untuk UPT dan pegawai rumah sakit pemerintah," jelas Ami.

Pemikiran Sekjen cukup sederhana yakni semua pegawai harus sehat lahir dan batin. *Medical check up* ini sekaligus untuk pemetaan kesehatan pegawai di lingkup Kementerian Kesehatan. Apabila ada tanda-tanda pegawai sakit sudah bisa diantisipasi. "Dengan adanya *medical check up* setiap tahun, diharapkan saat pegawai tersebut dapat bekerja lebih maksimal dan pegawai yang akan memasuki masa pensiun, kondisinya tetap sehat."

Ami melihat bahwa Sekjen sebagai koordinator mampu membangun komunikasi yang baik. Seminggu sekali selalu diadakan *morning briefing*



Bersama Menkes menerima perwakilan Badan di kantor Kemenkes

setiap hari Senin selama 30 menit, mulai jam 7 pagi dengan membahas isu-isu terkini. Hal lain yang juga menjadi perhatian Sekjen adalah peningkatan leadership Eselon II, III, dan IV di bawah kepemimpinannya. Dalam Rakor Staf Purnipurna Sekjen kerap memberikan materi menjadi kepemimpinan yang professional dan amanah.

Konsep dan pemikiran Sekjen ini mengantarkan Sekjen Untung menjadi pejabat madya terbaik 2017. Kementerian Kesehatan dua kali berturut-turut mendapatkan BKN Award pada 2016 dan 2017 untuk pengelolaan kepegawaian terbaik.

Saat ini Biro Kepegawaian mendapatkan amanah dalam pemberian penghargaan Menteri Kesehatan harus berbeda dengan tahun sebelumnya. "Bersama Sekjen sudah kami rapatkan bagaimana rumusan untuk tokoh-tokoh yang layak menerima penghargaan Menteri Kesehatan. Pada

prinsipnya penghargaan Menteri Kesehatan adalah penghargaan bergengsi, kandidat yang tepat tidak mudah didapat. Sekarang ini penilaiannya dengan pola baru bekerja sama dengan Harian Umum Kompas. Kami seleksi ketat selama dua sampai tiga tahun, sosok yang layak mendapatkan penghargaan. Banyak kriterianya," jelas Ami.

POLEMIK PENGANGKATAN PTT

Sejak 2015 Pemerintah telah melaksanakan moratorium penerimaan/pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu berdampak terjadinya kekosongan pegawai khususnya tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di daerah. Sebagian besar tenaga kesehatan yang bekerja di daerah, termasuk di dalamnya daerah terpencil dan sangat terpencil adalah bidan dengan jumlah sekitar 79 ribu. Dan hampir 70% dari jumlah tersebut adalah pegawai tidak tetap. PTT Kementerian Kesehatan yang masih aktif bertugas di seluruh wilayah Indonesia per 1 September 2015 sejumlah 44.328 orang, dengan rincian 1.446 dokter, 721 dokter gigi, dan 42.161 bidan.

Pada saat drg Murti Utami MPH atau akrab dipanggil Ami dilantik sebagai Kabiro Kepegawaian Kementerian Kesehatan pada 2016. Salah satu tugasnya adalah mengangkat 44.328 PTT ini sebagai calon PNS. "Saat saya menghadap ke Pak Sekjen dan siap untuk memaparkan program saya, tiba-tiba Pak Sekjen bilang bu Ami, saya hanya minta kepada ibu bagaimana caranya agar mereka ini (PTT Kemenkes) diangkat sebagai CPNS. Saya langsung melongo dan menenangkan pikiran. Sebanyak itu harus jadi PNS?" kata Ami mengingat kejadian pertama saat dia menjabat sebagai Kabiro Kepegawaian.

Ia kemudian memikirkan bagaimanapun caranya? Sebab anggaran yang ada di Biro Kepegawaian tidak pernah ada untuk pelaksanaan pengangkatan PTT ini. Akhirnya dalam rapat internal di Biro Kepegawaian, program-program yang sudah disusun rapi harus dipilah-pilah mana yang menjadi prioritas dan tidak. "Dari penyisiran program ini, kami bisa mengumpulkan anggaran Rp18 Miliar untuk proses seleksi 44.328 PTT sebagai CPNS ini," ungkapnya.

Diakui bahwa masalah PTT ini sudah cukup lama. Tidak sekali dua kali terutama para bidan berunjuk rasa agar diangkat sebagai PNS. Apabila bidan-bidan itu terutama di desa terpencil tidak diangkat, maka dikhawatirkan

bidan-bidan desa ini bekerja di kota. Kekhawatiran Kementerian Kesehatan beralasan karena di desa-desa bisa terjadi kekosongan tenaga bidan, khususnya di daerah terpencil, sangat terpencil, serta daerah tertinggal dan perbatasan kepulauan.

"Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian mengajukan permohonan kepada Kementerian PAN-RB pada Januari 2015, agar dokter, dokter gigi dan bidan PTT yang masih aktif agar diangkat sebagai CPNS daerah. Jumlah PTT yang diajukan Biro Kepegawaian sebanyak 44.328 orang. Kementerian PAN-RB pada akhirnya menyetujui pengangkatan PPT Kementerian Kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. Sosialisasi pengangkatan PTT menjadi CPNS dilaksanakan di Jakarta, Surabaya dan Makassar. Dalam pelaksanaan, tidak sedikit daerah yang keberatan dengan usulan itu. "Alasannya pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk mengusulkan orang baru di luar PTT Kementerian Kesehatan yang masih aktif bekerja," kata Ami.

Pada saat sosialisasi Sekjen Kementerian Kesehatan terlihat tenang dengan menghadapi peserta daerah yang merasa keberatan. Pak Sekjen menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mengangkat tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 200 ribu, tersebar di seluruh Indonesia. Namun saat ini yang menjadi skala prioritas adalah PTT Kementerian Kesehatan yang berjumlah 44.328 orang.

Pada tahap selanjutnya dilaksanakan nota kesepahaman antara Sekjen Kementerian Kesehatan dengan 477 bupati/walikota, dan tiga gubernur tentang pengadaan PNS di lingkungan Pemda dari PTT Kementerian Kesehatan. Dalam penandatanganan nota kesepahaman itu, ternyata ada dua kabupaten menolak mengangkat PTT Kementerian Kesehatan sebagai PNS daerah, yakni Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Ngada. "Kami terus melakukan komunikasi dengan kedua bupati, hasilnya tetap sama. Ada 175 orang di kedua kabupaten itu yang tidak dapat diusahakan sebagai PNS daerah," terangnya.

Akhirnya para PTT yang dapat diusahakan untuk direlokasikan ke daerah yang membutuhkan bidan di antaranya ke Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Urusan PTT tidak selesai sampai di situ. Sejumlah bidan melaporkan



Mendampingi Menkes dalam penyerahan piagam penghargaan kepada Bupati.

adanya indikasi pungutan dalam pengangkatan PTT sebagai PNS daerah. "Sekjen langsung menelpon Saber Pungli untuk meminta penindakan oleh oknum pemerintah daerah yang terindikasi melakukan pungli," tambahnya.

Pelaksanaan ujian pada 19-24 Juli 2016, Kementerian Kesehatan melaksanakan TKD untuk 43.310 orang. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa orang tidak bisa mengikuti ujian. "Saat itu ada peserta tidak bisa datang ke lokasi tes karena cuaca buruk, tidak ada kapal yang berlayar. Ada juga peserta tes tidak bisa mengikuti tes karena sinyal telekomunikasi sangat jelek. "Ada yang pecah ketuban. Ada yang kecelakaan saat menuju lokasi tes. Atas dasar itu Sekjen Kementerian Kesehatan meminta ujian TKD dilaksanakan dua gelombang agar semua peserta bisa mengikuti. Pada 21 Februari Kementerian Kesehatan mengumumkan seluruh PTT Kementerian Kesehatan yang mengikuti seleksi CPNS pada 18-24 Juli dan 11 Agustus 2016 dinyatakan lulus semua.

Tahapan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2017. Dari 43.310 PTT Kementerian Kesehatan yang dapat diangkat sebagai CPNS hanya 39.090 PTT. Semua PTT ini berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 4.220 PTT berusia di atas 35 tahun. "Sekjen terus berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB agar PTT yang belum diangkat sebagai CPNS bisa segera diangkat," jelas Ami.

Kementerian Kesehatan akhirnya menemukan celah pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 23 ayat (2) dan (3), yang menyebutkan bahwa diperbolehkan mengangkat CPNS setinggi-tingginya 40 tahun selama ada penetapan Presiden. "Setelah diverifikasi didapat 4.153 PTT dengan usia setinggi-tingginya 40 tahun, terhitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PTT, untuk dapat diangkat sebagai CPNS Daerah melalui Keputusan Presiden tentang jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun."

Sampai saat ini Keppres masih berproses dan diharapkan PTT Kementerian Kesehatan di atas 35 tahun, dan setinggi-tingginya 40 tahun bisa diangkat menjadi CPNS, untuk pemenuhan tenaga kesehatan di daerah.

Pelajaran yang diperoleh dari kepemimpinan Sekjen Untung bahwa, " Beliau sangat mengetahui karakter dan kemampuan bawahannya." Ani merasa sangat terkesan bagaimana Sekjen Untung memberikan kewenangan dan kepercayaan kepadanya untuk menyelesaikan permasalahan. Selama pelaksanaan pengangkatan PTT menjadi CPNS ini. Kesempatan ini sangat berharga karena di bawah kepemimpinan Sekjen Untung, Ani mendapatkan kemampuan *leadership* yang lebih baik.



**VISIONER
DAN PAHAM
"UNTUNG"
RUGI DIPLOMASI
KESEHATAN**

Acep Somantri Sip, Mba
KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI



ACEP Somantri mengenal Sekjen Untung Suseno Sutarjo pada tahun 2008. Namun baru tahun 2016, Acep berada di institusi Kementerian Kesehatan, dan langsung di lingkup kerja Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan. " Saya mengenal beliau saat masih bertugas di Jenewa dalam sidang *World Health Assembly* (WHA). Waktu itu Pak Untung sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Saya melihat Pak Untung cocok untuk berdiplomasi di bidang kesehatan.

"Orangnya berani, *tough* dalam bernegosiasi. Dan sejak menjabat sebagai Sekjen, beliau semakin matang," ujar Acep.

Secara pribadi, lanjutnya Untung adalah sosok pemimpin dan menjadi panutan semua pegawai di lingkup Kementerian Kesehatan. " Pak Untung itu seorang pribadi muslim yang taat salat lima waktu. Ini menjadi motivasi bagi yang jarang atau tidak salat, sekarang jadi rajin salat. Beliau sosoknya sederhana, humble dan tegas dalam hal prinsip."

Acep mencontohkan sikap tegas itu apabila menemukan kasus abu-abu atau mengambang, ketegasan Sekjen sangat diperlukan. Diakuinya Sekjen memberikan perhatian besar terhadap isu-isu yang ada di Biro Kerja Sama Luar Negeri. Sekjen selalu memberikan arahan yang jelas termasuk masukan- masukan.

"Pak Sekjen itu sangat tahu persis visi dan misi di Kementerian Kesehatan. Arahnya strategis dalam diplomasi kesehatan," ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan peran Indonesia menjawab tantangan kesehatan global dengan memiliki kemampuan menangani isu kesehatan global dan mampu menegosiasikan rezim kesehatan global dan perjanjian-perjanjian internasional bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan mengembangkan Diplomasi Kesehatan dalam wujud kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Pada tahun 2010, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes ikut merintis terbentuknya Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Satuan Kerja setingkat Eselon II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ MENKES/ PER/ VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Pusat Kerjasama Luar Negeri berada di bawah koordinasi

“
Harus ada aksi konkrit setelah ada MOU kerja sama dengan negara lain sehingga mendukung pembangunan Indonesia Sehat “Untung Suseno Sutarjo”
17 Oktober 2017.

Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI, yang tugas pokoknya mengelola diplomasi kesehatan.

Acep menjelaskan bahwa beliau juga yang berjasa ikut membidani lahirnya Biro Kerja Sama Luar Negeri. Ini sangat baik. Keberadaan Biro ini sangat baik untuk menjadi wadah diplomasi di bidang kesehatan dengan negara lain.

Sebagai orang baru di jajaran Kementerian Kesehatan, Acep banyak belajar dari Pak Untung mengenai arah dan target yang harus dicapai oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri. Dalam hubungan diplomasi dengan negara lain, menurut Acep, Sekjen sangat memahami arah yang akan diambil. “Setiap ajakan kerja sama dengan negara lain, Pak Sekjen bisa langsung tahu bagaimana arah kerja sama ini. Untung ruginya dan sebagainya. Dia visioner sehingga penting bagi bawahannya untuk bergerak cepat,” terang Acep.

Sejauh ini segala keputusan yang diambil, implementasi di lapangan selalu berhasil. Namun apabila ada target yang belum tercapai, Sekjen Untung tidak mencari-cari kesalahannya dimana. “Tapi beliau bertanggungjawab dan cepat mencari solusinya. Semuanya telah diperhitungkan dengan cepat,” kata Acep yang selama ini berkariier di Kementerian Luar Negeri.



Sekjen memimpin kunjungan delegasi kesehatan ke London

Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, dalam rangka menjawab tantangan tersebut diatas maka hasil yang diharapkan satuan kerja Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki peran penting sebagai entry point pelaksanaan Diplomasi Kesehatan dengan pendekatan multitrack : baik di forum Multilateral, Regional, dan Bilateral melalui kebijakan satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan Diplomasi Kesehatan, Sekretaris Jenderal memiliki peran yang penting untuk melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain menyusun posisi sektor kesehatan untuk semua forum perundingan/ forum internasional, memfasilitasi dan menyelesaikan perjanjian-perjanjian, merumuskan dan menetapkan pedoman, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Kesehatan guna dapat berperan aktif memimpin atau memberikan masukan kebijakan dalam forum internasional/forum perundingan.

Kebijakan strategis Sekretaris Jenderal secara nyata dituangkan dalam Kerja Sama Kesehatan Bilateral. Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes menilai Kerja Sama Bilateral merupakan kerja sama yang paling nyata/terlihat (*visible*) dan terukur manfaatnya dapat dirasakan oleh Unit Teknis dan UPT Kemenkes. Unit Teknis dan UPT Kemenkes tidak sepenuhnya memahami prosedur kerja sama dengan pihak/institusi asing dan hal-hal apa saja yang bisa dikerjasamakan guna mengambil manfaat bagi peningkatan Pembangunan Kesehatan di Indonesia.

GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA

Global Health Security Agenda (GHSA) merupakan inisiatif global yang diluncurkan pada bulan Februari 2014. Inisiatif tersebut muncul sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat global terhadap kemungkinan munculnya berbagai jenis penyakit baru dan pandemi yang diakibatkan oleh dampak negatif perubahan iklim, meningkatnya lalu lintas barang, jasa, manusia dan hewan lintas negara serta praktek-praktek pertanian, peternakan dan industri yang dinilai tidak lagi alamiah dan ramah lingkungan.

GHSA bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon cepat berbagai ancaman penyakit infeksi di tingkat global, baik yang terjadi secara alamiah maupun karena adanya unsur kesengajaan ataupun musibah. GHSA melibatkan *multi-stakeholders*, bersifat multi-sektoral serta di dukung badan-badan dunia di bawah PBB, antara lain: *World Health Organisation* (WHO), *Food and Agriculture Organisation* (FAO), dan *World Organisation for Animal Health* (OIE).

Melalui kemitraan dengan 53 negara, dengan organisasi internasional, dan para pemangku kepentingan non-pemerintah, GHSA memfasilitasi upaya kolaborasi dan peningkatan kapasitas negara, yang dilakukan sejalan dengan *International Health Regulation* (IHR) WHO, *Performance of Veterinary Services* (PVS) OIE, dan *framework* keamanan kesehatan global terkait lainnya.

GHSA membentuk *Steering Group* sebagai motor penggerak kegiatan GHSA. *Steering group* beranggotakan sepuluh negara yaitu Amerika Serikat, Chile,



Membahas isu-isu kesehatan dalam kunjungan kerja di London

Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kanada, Kenya, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Keketuaan *Steering Group* dilaksanakan melalui mekanisme Troika (3 negara secara bergantian). Troika pertama terdiri dari Amerika Serikat (memimpin pada 2014), Finlandia (2015), dan Indonesia (2016).

Selain menjadi Ketua Troika GHSA pada tahun 2016, Indonesia juga menjadi *lead country* untuk *Action Package Zoonotic Disease (Prevent-2)* dan menjadi *contributing country* untuk *Action Package Anti Microbial Resistance (Prevent-1)*, *Real-Time Surveillance (Detect-2)*, dan *Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response (Respond-2)*.

Di tingkat nasional, penanganan GHSA dilakukan oleh 25 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Kesehatan sebagai Ketua Umum.

PEMBENTUKAN TIM NEGOSIASI PERUNDINGAN

Indonesia mempunyai potensi SDM yang besar. Potensi tersebut perlu ditangani dan ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menghasilkan SDM



Kesehatan yang berkualitas dan kompetitif di pasar global. Di era Globalisasi, seorang Nakes tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis kesehatan yang tinggi, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, mempunyai kompetensi bahasa asing yang baik, serta fleksibilitas untuk bekerja di lingkungan Internasional yang multi kultur.

Bersamaan dengan diimplementasikannya JKN, Indonesia memerlukan dukungan

investasi cukup besar untuk meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, memperkuat sistem kesehatan, serta pembangunan infrastruktur kesehatan. Dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar serta potensi ekonomi yang cenderung terus meningkat, Indonesia merupakan negara yang menarik bagi para investor di sektor kesehatan.

Dalam hal mengantisipasi makin cepatnya proses liberalisasi perdagangan barang dan jasa kesehatan di tingkat global, Kementerian Kesehatan merespon terhadap tantangan globalisasi dimaksud dan menilai sedikitnya terdapat tiga tahapan kesiapan sektor kesehatan yang harus dilakukan, diantaranya :

- 1) Meningkatkan standar kompetensi Nakes Indonesia agar dapat memberikan pelayanan masyarakat yang prima, membangun 'trust' masyarakat terhadap kualitas nakes Indonesia sekaligus berdaya saing tinggi dipasar regional maupun global.
- 2) Mempercepat proses pemerataan distribusi nakes diseluruh wilayah Indonesia untuk membatasi peluang masuknya nakes asing ke Indonesia.

- 3) Mereview regulasi dan kebijakan yang ada, menyusun strategi dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika yang terjadi di tingkat global. Pembinaan yang fasilitatif kepada sektor swasta bidang kesehatan, khususnya industri obat dan alkes atau industri rumah sakit guna meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya dalam rangka menjawab tantangan globalisasi.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melakukan kompetisi perdagangan bebas barang dan jasa kesehatan, Menteri Kesehatan menugaskan Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanganan Bidang Ekonomi serta Perdagangan Barang dan Jasa Kesehatan (TK PBE- PBJK) yang beranggotakan lintas unit utama Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan terkait untuk merumuskan posisi Indonesia dalam perdagangan bebas barang dan jasa kesehatan, melalui satu pintu dan terpadu, untuk multitrack negotiation di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

Tim Koordinasi PBE-PBJK menjadi think thank dalam merumuskan kebijakan dan posisi Kemenkes dalam liberalisasi perdagangan internasional (barang dan jasa kesehatan) melalui *World Trade Organization (WTO)*, *ASEAN Free Trade Area*, *ASEAN Plus Mitra Wicara* dan *Kerjasama Bilateral Comprehensive Economic Partnership* seperti *Indonesia-Jepang (IJEPA)*, *Indonesia-Australia (IA CEPA)*, *Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA)*, dll.

AKSES KESEHATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI

Indonesia saat ini merupakan negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari Indonesia berketerampilan rendah dan bekerja di sektor informal, yang terbatas pada pekerjaan yang kotor, sulit dan berbahaya yang juga dikenal sebagai pekerjaan "3D" - Dirty, Difficult and Dangerous. Hingga akhir tahun 2008, Pemerintah RI memperkirakan bahwa ada sekitar 4,3 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, namun demikian jumlah



Sekjen bersama delegasi Indonesia kunjungan ke The Christie School of Oncology London

sebenarnya lebih tinggi. Para PMI ini terkonsentrasi di kawasan Asia Tenggara dan Timur serta Timur Tengah, khususnya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Dubai dan Abu Dhabi.

Ada beberapa hak yang harus dimiliki PMI, antara lain: hak bekerja, hak mendapatkan penghasilan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Terkait pelayanan kesehatan, terkadang PMI tidak mendapatkan haknya di negara tempat bekerja. Untuk itu, penting bagi seorang PMI untuk membekali pengetahuan dasar tentang kesehatan dalam bekerja. Hal ini juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri agar hidup secara sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Sekretaris Jenderal mengambil langkah untuk melakukan kegiatan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat Indonesia, termasuk para PMI

di luar negeri. Dengan memberikan sosialisasi kesehatan kepada PMI di luar negeri, maka tujuan GERMAS dapat tercapai, yaitu agar PMI di luar negeri berperilaku sehat, sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap kesehatan PMI, meningkatkan produktivitas masyarakat, terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan berkurangnya biaya yang dikeluarkan PMI untuk berobat di negara tempatnya bekerja.

"WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri seperti di Korea Selatan dan Hongkong banyak meminta agar ada layanan dasar kesehatan yang dibuka oleh pemerintah Indonesia. Sebab mereka sangat membutuhkan. Jadi ide Pak Untung bagus juga untuk ditindaklanjuti. Kementerian lain tidak ada yang melakukan seperti ini," pungkas Acep.

Dalam kesempatan melakukan sosialisasi kesehatan bagi PMI di luar negeri, juga dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral antar negara, sekaligus untuk mengimplementasikan perjanjian kerja sama (MoU) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi PMI, maka pengiriman obat-obatan dan vaksin dilakukan dengan menggunakan *diplomatic bag* melalui Kementerian Luar Negeri sesuai mekanisme prosedur yang berlaku. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri sehingga menjadikan image Kementerian Kesehatan yang baik yang lebih luas menyentuh ke masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

TANTANGAN DIPLOMASI KESEHATAN

Merujuk pada keberhasilan Indonesia dalam memperoleh akses benefit *sharing vaksin* pada tahun 2011, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pemimpin dalam mengubah sistem kesehatan global yang lebih adil dan setara. Isu kesehatan global tidak hanya berkutat pada isu penyakit menular, tetapi juga pada angka kematian ibu dan anak di tingkat global yang masih jauh dari target Sustainable Development Goals dan penyakit tidak menular yang mengancam kesehatan global juga semakin menyita perhatian.

Resistensi anti mikroba menjadi masalah yang makin mengemuka, dimana komunitas internasional masih hanya fokus pada isu-isu umum.

Indonesia perlu memelopori kolaborasi internasional untuk bersama-sama dengan negara lain meningkatkan kapasitas kesiapan nasional dalam menghadapi pandemik. Dalam hal ini, isu kesehatan perlu diintegrasikan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga sinergi antara instansi pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri perlu lebih diintensifkan.

Peran strategis Indonesia terlihat dari kontribusi Bio Farma yang saat ini menjadi penyuplai 2/3 vaksin polio global. Hambatan dalam pengembangan teknologi vaksin yang berkaitan dengan pembatasan hak paten tetap harus menjadi fokus diplomasi kesehatan Indonesia. Terlebih saat ini produksi vaksin dunia masih didominasi oleh perusahaan multinasional dari negara maju.

Indonesia perlu menjajaki hal baru, misalnya promosi diplomasi ekonomi di bidang kesehatan. Bio Farma saat ini telah menjadi center of excellence dalam produksi vaksin bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam hal ini, anggota OKI dan negara-negara berkembang dapat menjadi pasar potensial produksi vaksin Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman untuk menjadi pemasok vaksin global. Akan tetapi, untuk mempromosikan produk vaksin Indonesia pada pasar global, Indonesia perlu mendorong keberlanjutan produksi, yang perlu direncanakan secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan non-state actors dalam mengatasi masalah kesehatan nasional maupun global. Indonesia perlu memperjuangkan peluang memperbanyak jumlah WNI yang bekerja di lembaga-lembaga internasional di bidang kesehatan, baik dalam kerangka PBB (WHO) maupun NGO internasional.

Pada akhirnya, Acep atas nama Biro Kerja Sama Luar Negeri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas peran Pak Untung dalam diplomasi kesehatan dan berharap saat Pak Untung memasuki masa pensiun, teruslah berkarya dan mengabdikan kepada negara dalam bentuk lain. "Masih banyak ide-ide besarnya yang harus dikembangkan untuk kemajuan Kementerian Kesehatan di masa datang," harapnya.

TERUS
MEMOTIVASI
SUPAYA KAMI
LEBIH BERDAYA

KEMENKES RI

drg Widyawati MKM

KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN



JULI 2017 silam, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila F Moeloek SpM (K) ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Kepala Negara meminta laporan seputar masalah kesehatan dan pencapaian yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan.

Banyak hal yang kemudian dilaporkan Prof Nila. Mulai dari program Nusantara Sehat yang berhasil mengirim tenaga medis muda ke seluruh penjuru Nusantara, hingga perkembangan pelayanan kesehatan di pedalaman.

Salah satu yang diingat Prof Nila saat itu : "Saya melapor bahwa di Papua sudah ada dokter yang mampu melakukan operasi jantung. Sebelumnya tidak ada satupun yang bisa melakukannya," tutur dokter spesialis mata itu.

Tentu saja Presiden gembira. Namun, Joko Widodo tidak mengeluarkan pujian berlebih. Kepala Negara justru meminta Prof Nila untuk tidak menyembunyikan banyak informasi keberhasilan itu. "Itu dikeluarkan *dong*. Dikomunikasikan ke masyarakat," ungkap Prof Nila menirukan keinginan Jokowi.

Tanggapan serupa juga dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kala Menteri Kesehatan melaporkan bahwa organisasi kesehatan PBB, WHO, menilai sektor kesehatan di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Itu terlihat dari akses pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil yang terus meningkat. Hal-hal seperti itu, kata Presiden, harus diungkapkan ke publik, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri.

Berangkat dari peristiwa itu, Menteri Kesehatan menyadari kementeriannya kurang menerapkan komunikasi publik yang baik.

"Persepsi saya waktu itu pemerintahan Pak Jokowi sangat fokus ke persoalan-persoalan ekonomi. Setelah itu, saya berpikir bahwa apa yang diinginkan Pak Presiden betul," tandas Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini.

Sepulang dari Istana Kepresidenan, Prof Nila berembuk dengan Sekretaris



Kunjungan Kerja Sekjen Kemenkes ke Provinsi Kalimantan Barat.

Jenderal Kementerian Kesehatan dr Untung Suseno Sutardjo M.Kes. Topiknya tidak jauh dari keinginan Presiden, lebih memberdayakan dan mempertajam fungsi kehumasan.

"Saya sepakat dengan Ibu Menteri bahwa kami banyak bekerja, tapi malu untuk memberitahukan hal itu kepada publik. Karena itu, kami sepakat untuk meningkatkan citra Kementerian Kesehatan," tutur Sekjen Untung.

Bukan persoalan mudah. Untuk mengurus soal komunikasi publik, kehumasan ini, sebenarnya Kementerian Kesehatan telah memiliki Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

Ke depan, untuk lebih berdaya, Biro ini akan mendapat lebih banyak tugas. Tidak sekadar menyiarkan berita dan program yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan.



Unit ini tidak hanya bertindak sebagai humas. Mereka lebih dari humas, karena *membranding*, membentuk citra Kementerian Kesehatan, yang sigap, bersih, dan bekerja -

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Pak Untung menyatakan sebagai unit kehumasan, Biro Komunikasi harus bisa lantang menyatakan bahwa banyak kebaikan sudah dilakukan Kementerian Kesehatan. Namun, tentu saja, keinginan itu harus dibungkus rapi, tidak *baper*, tidak *ndeso*.

"Unit ini tidak hanya bertindak sebagai humas. Mereka lebih dari humas, karena *membranding*, membentuk citra Kementerian Kesehatan, yang sigap, bersih dan bekerja," tandas Untung.

Biro ini, lanjutnya, juga harus bisa menganalisis masalah yang terjadi di lapangan, terkait soal kesehatan masyarakat. Para petugas di dalamnya juga harus mampu menginventarisasi potensi masalah, sebelum meledak menjadi peristiwa yang tidak sedap.

"Dulu, kita pusing kalau ada masalah. Berpikir lambat, sehingga untuk mengangkat citra lembaga sulit dilakukan. Kini, perubahan sudah banyak terjadi," jelas Pak Sekjen.

NEGOSIATOR KEREN

SAAT beban yang tidak mudah itu harus dilakukan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan melakukan sejumlah perombakan. Mei 2018 lalu, Menteri Kesehatan melantik 13 pimpinan tinggi pratama.

Di antara mereka, ada nama drg Widyawati MKM yang didapuk untuk memimpin Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. "Beban berat, tapi Pak Untung selalu membesarkan hati saya," ungkap Widyawati menyebut atasannya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo.

Drg Wiwid, sapaan akrabnya, sebenarnya bukan orang baru di biro ini. Sejak 2016 lalu, ia memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat. Namun, sebagai kabag, ia tidak sering berkomunikasi dengan Sekjen. Baru setelah menjabat kepala biro, ia jadi mengenal sosok atasannya itu.

"Pak Untung, seorang negosiator yang keren. Benar-benar keren, sehingga pernah saya tidak kuat menahan untuk tidak mengucapkannya langsung kepada beliau," tutur dokter gigi lulusan Universitas Trisaksi ini.

Pernah satu kali, Wiwid mendampingi Untung menghadiri sebuah pertemuan. Saat itu, perempuan ini sangat terkesan dengan gaya diplomasi yang dilakukan Pak Untung.

"Saat keluar ruangan, saya berusaha mengejar bapak. Setelah terkejar, saya bilang bapak keren deh. Pak Untung tidak menimpali, hanya tertawa lebar," kenang Widyawati.

Ia mengaku pantas memuji Untung. Pasalnya, dokter lulusan Universitas Indonesia itu selalu mampu memberikan solusi dengan cepat dan masuk akal.

"Bapak itu tipe melindungi anak-anaknya. Beliau selalu memberikan solusi hal-hal sederhana yang tidak terpikirkan oleh kita. Solusinya mudah, tapi

entah kenapa itu tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin kita memikirkannya terlalu muluk. Padahal dalam pemikiran bapak, banyak hal-hal yang mudah dilakukan," ungkap Wiwid.

Pemegang gelar Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia ini mengakui banyak belajar dari Sekjen Untung. Bagaikan seorang guru, Pak Untung banyak mengajari Widyawati untuk menghadapi dan menyikapi isu-isu yang berkembang di media massa.

"Selain saya belajar pada Pak Oscar, Pak Untung itu juga guru saya. Beliau mengajari metode-metode baru. Saya diajarin mana yang boleh diambil, mana yang enggak boleh diambil dan sebagainya. Termasuk kapan kita lapor, dan kapan kita kerjakan sendiri," jelasnya.

Drg Oscar Primadi MPH ialah Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Pria kelahiran Pontianak ini pernah menjabat Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, saat Widyawati menjadi kepala bagian.

Selain kedua seniornya itu, tidak jarang perempuan asal Jawa itu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan Prof Nila F Moeloek. "Ada sejumlah isu dan kebijakan yang berkembang di media massa yang harus segera disikapi. Ketika saya melapor ke Ibu, beliau juga tidak segan memberi arahan. Yang terbaru, soal pro kontra imunisasi Ibu minta disetop dulu. Ganti dengan isu penanganan pascagempa," jelasnya.

Setelah banyak belajar dari para pejabat eselon 1 itu, dalam banyak isu kesehatan yang muncul di masyarakat, kadang Widyawati tidak merasa perlu lagi meminta nasihat mereka. Ia bisa langsung memutuskan dan membuat solusi masalah yang berkembang.

Menjadi orang yang paling bertanggungjawab di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Widyawati mengemban tugas harus bisa menaikkan citra Kementerian Kesehatan. Penanganan dan pelayanan kesehatan harus semakin bagus di mata masyarakat. "Biro Komunikasi itu halaman depannya Kementerian Kesehatan. Wajah depannya kementerian, jadi tugas kami harus menaikkan citra positif untuk kementerian," tandas Widyawati.



JANGAN NGELES

DUA hari setelah Widyawati dilantik sebagai kepala biro, media massa di Indonesia ramai memberitakan soal ada kasus terkait kode etik dan disiplin dokter. Praktik penyembuhan stroke yang ia lakukan disoal Ikatan Dokter Indonesia. Kementerian Kesehatan tidak bisa lepas tangan. Sekjen Untung meminta Widyawati segera mengolah data dan menyikapi isu tersebut dari sudut pandang Kementerian Kesehatan.

Cukup pelik. Karena itu, Widyawati membutuhkan waktu agak lama untuk menyiapkan rilis sebagai konsumsi publik. "Saya waktu itu masih belajar untuk menghadapi isu-isu yang berkembang di media massa," ujar Wiwid.

Sekjen Untung menegur Widyawati karena menilai rilis yang disiapkan terlalu lama. "Saya bilang maaf Pak. Saya orang baru yang masih belajar."



Namun, sang Bapak ternyata tidak mau membiarkan Widyawati terlena dengan alasan itu. "Halah... Jangan *ngeles*. Ayo kerjakan cepat. Jangan sampai terlambat," kenang Wiwid menirukan Untung, sambil tertawa.

Meski banyak tersenyum, bahkan tertawa, dalam beberapa kesempatan Widyawati juga merasakan Untung Suseno bisa marah dan kesal. Kemarahan itu muncul saat anak buahnya bekerja tidak sesuai harapan. Namun itu tidak pernah jadi masalah besar buat Widyawati. "Bapak itu baik. Kalau beliau marah ya wajar karena kita salah. Kalau marah ya anak-anaknya dipanggil, kemudian dikasih tahu begini lo," paparnya.

Bagi banyak staf di Kementerian Kesehatan, mereka pasti sepakat bahwa Sekjen Untung merupakan seorang pekerja keras, teliti dan selalu mengawal semua ide-ide anak buahnya untuk diwujudkan. Salah satunya adalah keinginannya mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu.

Saat ini memang Kemenkes belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan satu pintu, namun sudah banyak perbaikan menuju pelayanan satu pintu. Dulu pelayanan perizinan membutuhkan waktu lama, kini bisa dipersingkat

dan dipermudah dalam pengurusan. "Itu karena Pak Sekjen mengawal terus. Selalu ditanyakan mana itu kok belum terwujud. Mana itu, kapan, terus menerus," kata Widyawati.

Satu lagi yang dibebankan Pak Untung untuk segera diwujudkan oleh Biro Komunikasi ialah terwujudnya digitalisasi perpustakaan atau *e-library*. Keinginan Sekjen sudah diutarakan berkali-kali kepada Widyawati.

"Tapi kami belum bisa mewujudkan karena perpustakaan di Kementerian Kesehatan belum satu tahun beroperasi setelah renovasi. Jadi belum ada reovasi baru. Kami tetap berusaha untuk mewujudkan *e-library* ini," tandasnya.

RADIO KESEHATAN

KENANGAN indah itu terjadi pada Jumat, 23 Februari 2018. Kala itu, Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila F Moeloek SpM (K) meresmikan mengudaranya Radio Kesehatan dan ruang pers Naranta.

Kedua fasilitas itu diharapkan dapat memperluas informasi kesehatan ke pelosok negeri. "Ini langkah maju yang dilakukan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat," tutur Menteri.

Kementerian Kesehatan, lanjut Ibu Menteri, perlu sekali memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat mengingat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih rendah. Hanya sekitar 15%-20% masyarakat di Indonesia yang sadar akan kesehatan.

Dalam *talk show* se usai meresmikan radio itu, Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, sepakat radio bisa menjadi tempat berkomunikasi dan menebar informasi sampai ke ujung negeri. "Info-info seputar kesehatan jika disampaikan secara baik, sistematis dan terencana akan mampu mengubah perilaku masyarakat. Kita butuh itu untuk membentuk perilaku hidup bersih, hidup sehat dan menghindarkan anak cucu kita dari pengaruh narkoba," tandas Ibu Menteri.

Menteri mengaku sudah pernah bekerja sama dengan Radio Republik

Indonesia (RRI). Luar biasa, karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui soal kesehatan.

Menteri Kesehatan selama acara berlangsung terus mengembangkan senyum. Dia tidak sendiri. Tangan kanannya, Sekretaris Jenderal Untung Suseno Sutardjo juga terus tersenyum.

"Kementerian Kesehatan akan meminta semua kepala dinas kesehatan di daerah untuk membuat acara dan program. Mereka bisa menyosialisasikannya lewat radio ini," tutur Untung.

Radio Kesehatan itu dinamai Siaran Radio Kesehatan (SRK). Berita kesehatan disiarkan secara streaming yang menjangkau ke pelosok negeri, bahkan luar negeri.

Terkait ruang pers Naranta, dibangun untuk memberikan ruangan yang menunjang kerja para jurnalis. Di ruangan inilah, mereka diharapkan bisa ikut memberitakan informasi kesehatan untuk kepentingan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Ruang Pers Naranta dioperasikan dengan 5 fungsi, yakni sebagai ruang kerja pers, konferensi pers, menggelar *talk show*, *taping*, dan temu media. Nama Naranta diambil dari bahasa sansekerta yang artinya suara gemerincing. Itu berarti semua informasi yang keluar dari kantor Kementerian Kesehatan diharapkan akan berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan Indonesia.

Kini, kedua fasilitas itu menjadi tanggung jawab besar Widyawati. Dari keduanya, dengan pengelolaan yang profesional dan baik, Widyawati bisa berharap kabar baik dunia kesehatan bisa tersiar, mengubah banyak orang, dan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang sehat.



**CARE (CLEAN,
ACTION,
RESPONSIBLE,
EMPATHY)
SERVICE**

dr. Desak Made Wismarini, MKM
KABIRO UMUM KEMENKES



KEMENKES RI

BARU dua tahun Desak Made Wismarini menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi Made, pos baru yang ditempatinya membawa banyak wawasan dan pengalaman berharga. Di Biro Umum ada empat bagian yang menjadi tanggungjawab Made, yakni pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol. Kemudian pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan gaji dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

"Tugas di bagian Biro Umum ini bagaimana mengemas dan memegang peranan penting, serta memiliki kedudukan sama dengan biro-biro lainnya. Sesuai nomenklatur, Biro Umum ini harus bisa memberikan rasa nyaman, aman dan sehat para pimpinannya, sehingga dalam menjalankan aktivitas bisa nyaman dan lancar. Kita harus memberikan layanan prima dan komitmen luar biasa di dalam maupun luar negeri," ujar Made.

Salah satu hal cukup krusial yang ditangani Biro Umum adalah pengelolaan urusan gaji. "Layanan prima ini selain di bagian Tata Usaha. Di situ kami bertugas bagaimana memback up anggaran besar yakni gaji PNS Setjen dan CPNS Kementerian, serta gaji dan insentif pegawai dengan penugasan khusus hampir 90% anggaran itu ada di bagian gaji dan TU.

Biro Umum bertanggungjawab untuk mengawal dan mengelola 90% anggaran dalam bentuk belanja pegawai dan juga untuk anggaran menteri dan sekjen. "Sekjen meminta agar pengelolaan anggaran bisa efektif dan akuntabel. Sekjen juga memonitor anggaran-anggaran ini untuk ibu menteri. Badan Pemeriksa Keuangan juga rutin mengaudit setiap tahunnya," papar Made.

Hal lain yang juga menjadi tanggungjawab Biro Umum adalah pelaksanaan kearsipan dan administrasi. "Kami setuju kalau pak Sekjen ini seorang *master chef* karena dia penanggungjawab nomor satu untuk dukungan manajemen. Salah satunya adalah dokumentasi surat menyurat dan arsip. Baik itu *soft file* maupun *hard file*," jelasnya.

Diakui Made, bahwa urusan kearsipan ini merupakan pengalaman terbaru.

Pak Sekjen pemimpin era RB,
selalu gigih mengajak,
'Out Of The BOX'.

Dan selama ini umumnya orang hanya memandang sebelah mata tentang kearsipan ini. Namun sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia kearsipan, Sekjen memahami betul arti penting kearsipan ini.

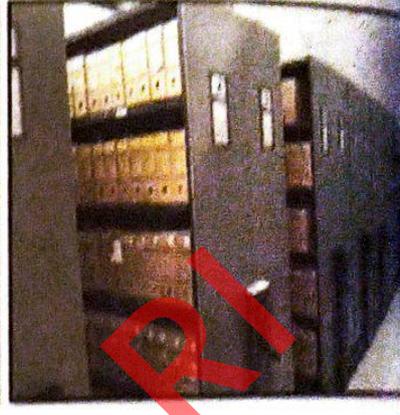
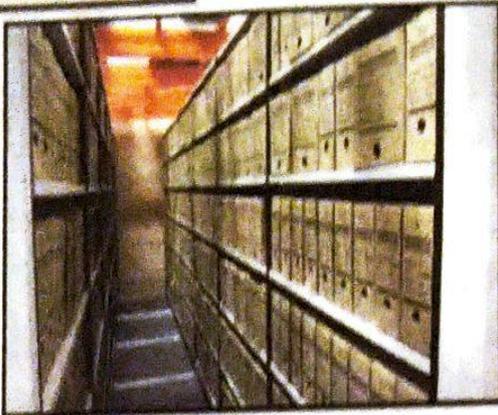
Apabila dalam dua tahun sebelumnya kearsipan dan dokumentasi Kementerian Kesehatan ada di peringkat tiga, pada tahun lalu Sekjen meminta harus nomor satu. "Bu Made, saya inginnya nomor satu. Pokoknya harus nomor satu ya," kata Made menirukan perintah Sekjen.

Untuk menempati posisi pertama memang harus ada kerja keras. Made pun sempat tidak yakin apakah bisa menjadi nomor satu di kelembagaan pemerintah di bidang kearsipan dan dokumentasi ini. Untuk itulah tim yang membidangi kearsipan dan dokumentasi ini belajar di beberapa lembaga.

"Kami serius melakukan ini karena Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa negara yang maju punya arsip yang bagus. Kami ini bertanggungjawab di seluruh unit utama. Ada 219 satuan kerja di seluruh Indonesia yang harus ditangani melalui Biro Umum ini. Nah di sinilah kerja tim dan masuk dalam sistem dalam waktu berjenjang agar bisa menjadi nomor satu," ungkap Made.

Biro Umum kemudian membuat peta jalan kearsipan. "Kearsipan ini mau dibawa kemana? Maka kami melakukan studi tiru. Meniru sesuai kemampuan, kemauan dan keadaan setempat. Kami melakukan studi tiru ke ANRI. Bagaimana ANRI menyiapkan standar minimal kearsipan dan melayani mulai

Records Center Kementerian Kesehatan



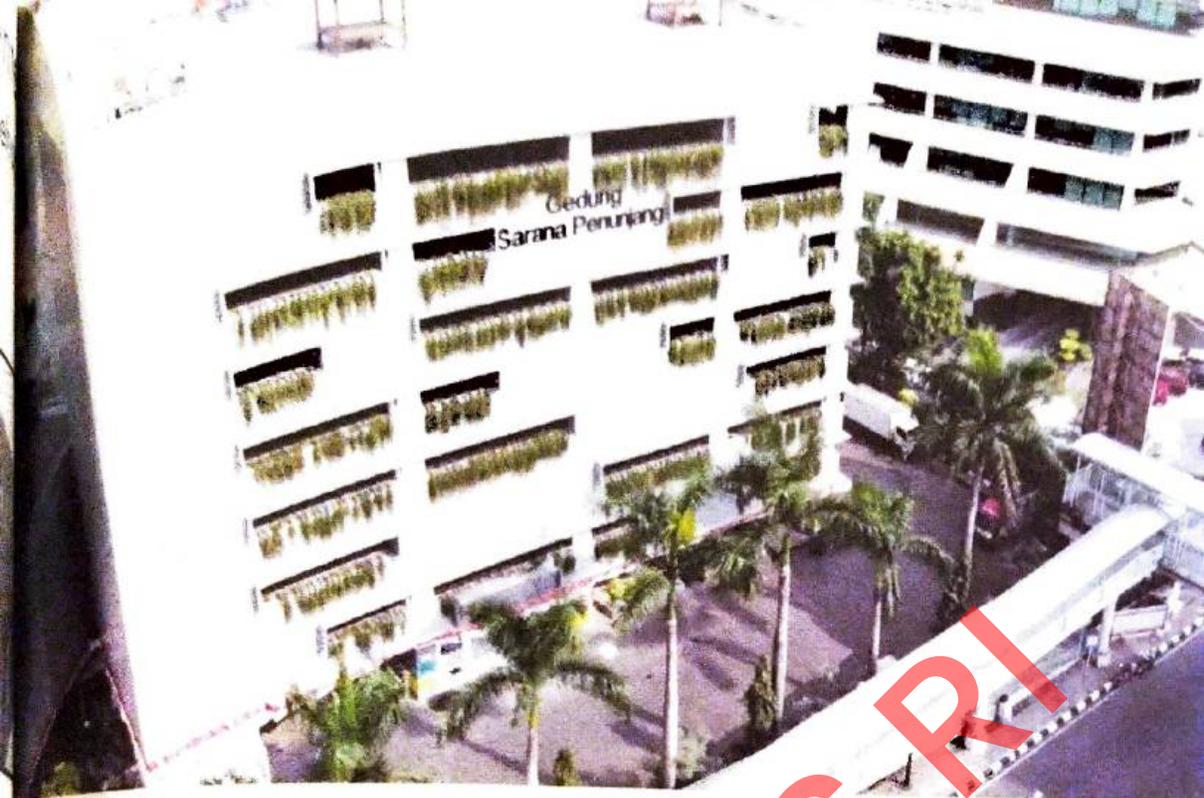
dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan lembaga lainnya. Kemudian tim Biro Umum Kementerian Kesehatan ini melakukan studi tiru di Bank Indonesia dengan fokus pada layanan publiknya. "Di sana juga terkait pengelolaan keuangan. Di Bank Indonesia, penanggungjawab kearsipan setara dengan eselon II," jelasnya.

Studi tiru berlanjut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biro Umum Kementerian Kesehatan belajar mencontoh bagaimana setiap pulang kerja harus *zero arsip*. Semua arsip harus masuk ke *filling cabinet* di *central file*.

Dan terakhir studi tiru dilakukan di PT KAI. Di sana penanggungjawab kearsipan adalah eselon II. BUMN sangat berkomitmen terhadap arsip karena saat ini tanpa ada arsip dan dokumen yang sah dan asli, sebuah perkara di pengadilan bisa kalah.

Dari banyaknya studi tiru ini berbuah manis. Pada 2017, sistem kearsipan yang ditangani Biro Umum Kementerian Kesehatan meraih juara pertama dengan nilai tertinggi.

"Komitmen Sekjen luar biasa soal verbal surat. Apalagi menangani 219



satuan kerja tidaklah mudah. Beliau itu keras dan tegas. Kami pun akhirnya mengundang Kepala ANRI untuk menjadi pembicara utama sekaligus pencaangan gerakan sadar arsip. Sekaligus acara ini diperkuat dengan regulasi," tambahnya. Selanjutnya slogan "Bersama Kita BUGAR" atau "Budayakan Gerakan Arsip Tertib" dicanangkan sebagai upaya untuk lebih memasyarakatkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Kementerian Kesehatan.

Tugas lain yang juga menjadi tanggungjawab Biro Umum adalah menyediakan bus jemputan yang layak. Sekjen menginginkan agar karyawan nyaman dan aman dalam perjalanan berangkat dan pulang ke kantor. Untuk itulah disediakan 20 bus baru, sekaligus mendukung keselamatan berkendara di jalan dan mengurangi polusi.

Bagian Rumah Tangga juga menjadi perhatian Sekjen. Ia selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai di bagian Kerumahtanggaan untuk selalu mengontrol ruang kantor, apakah listrik sudah mati, pemeliharaan gedung, dan kondisi air di kamar mandi. "Jadi sebelum pulang, kami mengecek seluruh gedung apakah ada kran air bocor. Apakah listrik sudah mati dan sebagainya untuk mencegah kebakaran maupun kebocoran air," jelas Made.



Kemudian tiap Jumat diadakan olahraga bersama. Sekjen selalu berjalan keliling kantor Kemenkes sebanyak tiga putaran sekitar pukul 06.30-07.00. Saat jalan sehat, Sekjen selalu mengecek kondisi di sekitar kompleks kantor. Hal-hal kecil menjadi perhatian Sekjen bila sedang berkeliling kantor sambil berolahraga.

Kemudian untuk layanan makanan bagi pegawai, maka tersedia kantin sehat di *basement*. Kantin tersebut menjadi kantin percontohan lembaga/direktorat. Kantin tersebut diawasi oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan. Makanan yang disajikan harus memenuhi gizi, tinggi serat, tidak ada lalat, kecoa maupun tikus.

Keberadaan kantin ini juga menjadi ajang promosi kesehatan sekaligus kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. Dapur dan area tempat mencuci piring diharuskan selalu bersih, tidak licin dan memenuhi kriteria keselamatan kerja. Setiap tiga bulan sekali kebersihan kantin sehat dievaluasi oleh Dharma Wanita Kementerian Kesehatan selaku pengelola.



"Ini komitmen Pak Sekjen dalam memperhatikan para karyawannya. Rencananya kantin sehat ini juga diberdayakan untuk menyediakan makanan rapat, sehingga kita tidak perlu ke luar kantor," terangnya. Hal lain yang menjadi perhatian beliau adalah masalah parkir. Untuk para tamu, parkir disediakan di halaman. Sedangkan untuk pegawai, parkir disediakan di *basement*.

Di kompleks Kementerian Kesehatan juga tersedia tiga bank BUMN yakni BNI, BRI dan Mandiri. Ketiga bank ini menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mengelola anggaran yang ada di Sekjen. "Beliau juga komitmen terhadap kawasan tanpa rokok. Saat ini banyak ruangan yang sedang direnovasi. Para tokangnya ada yang merokok. Kami selalu keliling untuk mengingatkan agar mereka tidak merokok selama bekerja merenovasi ruangan," tegasnya.

Di era Sekjen Untung ini, terjadi perubahan logo Kementerian Kesehatan sejak 2016. Logo terbaru itu menggantikan logo Bhakti Husada. Logo itu menunjukkan jati diri institusi dan memberikan kesegaran.

Kemudian inovasi lainnya adalah gerakan kantor berbudaya hijau dan sehat atau kantor berhias. Pada tahun lalu Biro Umum menjadi juaranya. Kantor Berhias ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan



untuk menilai internal biro mana saja yang inovatif. Penilaian setahun sekali menyangkut budaya kerja, kepedulian Aparatur Sipil Negara yang peduli lingkungan dan lainnya. "Termasuk inovasi air AC dimanfaatkan untuk menyiram halaman dan tanaman. Sehingga kami bisa berhemat membayar PDAM dan listrik."

Bagi Made, komunikasi dengan atasannya tersebut sangat baik. "Komunikasi dengan Pak Sekjen cukup baik. Selain beliau merespons cepat, juga selalu ada solusi. Kalau saya melaporkan lewat whatsapp, beliau langsung membalas dengan cepat. Jadi memang bapak juga maunya cepat, kami pun ikut terpacu melaksanakan perintahnya dengan cepat dan tepat sasaran," pungkasnya.

ASIAN GAMES
2018

6/153/2
KUNGA
NILAI

HATAM
DF



KEMENKES RI

**PUSDATIN
HARUS JADI
LOKOMOTIF
KEMENTERIAN
KESEHATAN**

KEMENTERIAN RI

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN



BARU dua tahun menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan, Didik Budijanto sudah merasakan banyak hal yang harus cepat dilaksanakan.

"Saya pribadi melihat Pak Sekjen jeli dan peduli dengan data. Data-data ini menjadi *feeding* kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan," kata Didik.

Kejelian dan kepedulian Sekjen terhadap data juga terlihat dari pidato-pidato yang diungkapkan saat membuka rapat kerja.

Didik mengungkapkan saat pertemuan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sistem Informasi Kesehatan Nasional pada 2016 menyampaikan bahwa masa depan Kementerian Kesehatan ada di pundak Pusat Data dan Informasi. Sebab dengan struktur organisasi yang dibangun seperti segitiga sama kaki sudah sangat pas untuk Pusdatin sebagai ujung tombak data dan informasi. Dua kaki yang menyokong adalah pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan teknologi informasi. "Jadi dengan konsep itu saat ini kami ingin betul mendapatkan data yang valid," terang Didik.

Melalui Peraturan Pemerintah No 6/2015 tentang sumber data Kementerian Kesehatan bersumber dari laporan rutin dari bawah ke atas yakni laporan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas hingga unit utama di Kementerian Kesehatan. Dan kedua adalah sumber data *survey* komunitas. Kedua sumber ini harus saling menopang.

Laporan rutin itu sifatnya per minggu dan per bulan. Sedangkan riset bisa dua sampai tiga tahun. "Sekjen mengamini hal itu. Dan ada *goal* ke depan yang sedang kami rancang adalah satu data kesehatan. Bagaimana membuat kebijakan dengan bersumber pada satu data kesehatan," jelasnya.

Didik mencontohkan cakupan imunisasi dasar lengkap. Berdasarkan riset cakupannya mencapai 67%. Sementara di laporan dari puskesmas hingga pusat sudah mencakup 95%. "Perbedaan data ini umum terjadi. Untuk bisa satu data, kita lakukan integrasi, standardisasi dan akuntabilitas. Kemudian diolah menjadi sebuah kebijakan."

“
Dari kedua sumber data tersebut, sering terjadi perbedaan yang signifikan.

”

Sekjen sangat mendukung rencana satu data kesehatan ini. Dukungan ini juga terlihat dari rencana keluarnya Permenkes tentang satu data kesehatan.

Dukungan lainnya dari Sekjen yakni saat *video conference capacity building* di Anyer beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya Sekjen mengatakan bahwa Pusdatin bukan lagi sebagai gerbong tapi lokomotif. “Jadi sebagai lokomotif tugasnya menarik semua gerbong. *Mindsetnya* yang harus diubah.”

Sejak beberapa waktu lalu, data yang masuk ke Pusdatin selain dalam wujud fisik juga akses. Pusdatin kini sudah bisa mengakses data-data dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan.

Saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Sekjen juga menyampaikan bahwa keinginannya agar Kementerian Kesehatan sebagai kementerian yang smart. Wujudnya adalah pembentukan *e-Office* yang dibuat Pusdatin.

Sistem ini sudah memiliki payung hukum berupa Permenkes. Di dalam *e-Office* ini terdapat tiga hal yakni rekam kehadiran berupa absen finger print. Kemudian tata persuratan dan kehadiran untuk perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Dan ketiga adalah *review* dari Irjen tentang *performance* Biro Perencanaan, Keuangan menjadi satu kesatuan terintegrasi di Pusdatin Kementerian Kesehatan. “Menteri dan Sekjen

bisa melihat laporan dari unit-unit utama. Termasuk mengetahui siapa saja pegawai yang tidak masuk, cuti, perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri, dan sebagainya."

Adapun untuk satu data kesehatan belum seluruh kabupaten/kota. Baru 45 kabupaten/kota yang mengirimkan data kesehatan di daerahnya dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk *e-Office* baru dilaksanakan di lingkup Sekjen. Alasannya kantor Kementerian Kesehatan tidak seluruhnya terpusat di Rasuna Said. Ada pula berkantor di Percetakan Negara dan Kebayoran Baru.

Gebrakan lainnya adalah perekaman 12 indikator keluarga sehat. Saat ini baru 14 juta keluarga atau sekitar 56 juta orang yang telah terekam dan terekam status kesehatan mereka. Targetnya pada 2019 seluruh warga Indonesia terekam data kesehatan. Hal itu untuk memudahkan pemetaan kondisi kesehatan Indonesia.

Saat ini kendalanya tidak semua sistem pelayanan kesehatan menggunakan sistem online, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Namun kini di puskesmas-puskesmas sudah dibangun aplikasi Sigda Generik, sebuah aplikasi sistem informasi di puskesmas. Di rumah sakit juga demikian, sehingga bisa dicek langsung oleh dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Data-data inilah nantinya menjadi sumber satu data kesehatan. Didik menambahkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin ini, diharapkan bisa segera menjadi lokomotif Kementerian Kesehatan. "Ini bentuk kepedulian pimpinan terhadap data. Maka mindset kami pun harus berubah. Pusdatin sebagai lokomotif, maka kami harus menjadi pendorong semua gerbong. Tapi saya juga lagi menginginkan perubahan *mindset* ini dengan lagu. Kalau Anda mendengarkan lagu berulang-ulang bisa memengaruhi cara berpikir," ujar Didik.

Upaya lain yang dilaksanakan adalah rapat bulanan untuk mengetahui perkembangan di masing-masing bidang.

e-office

Pada akhir perbincangan, Didik menyebutkan sosok Sekjen Untung adalah figur yang selalu mendukung, santai dan selalu mengawal semua usulan anak buah agar benar-benar bisa berhasil bagus. "Beliau juga tegas, disiplin dan tepat waktu. Beliau tidak suka bila anak buah bekerja tidak jujur dan berdampak dipanggil KPK. Pak Untung juga senang mentraktir makan enak. Makanya postur tubuh besar," kata Didik sambil tersenyum.

Apalagi kalau traktiran makannya yang bisa menaikkan kolestrol. "Saya sering diajak makan oleh beliau. Nah urusan makan ini saya harus kuat iman. Apalagi kalau diajak makan sate kambing, saya sudah siapkan Lipitor," ujarnya tertawa.

KEMENKES RI



PEMIMPIN VISIONER DAN PRAKTIS

KEMENKESRI

Pretty Multihartina, Ph.D
KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

REVISI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN Matri
BUTIR KEGIATAN

Kementerian Kesehatan

KEMENKES RI



SEBAGAI pejabat baru di lingkungan Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan, Pretty Multihartina tidak kaget dengan jabatan barunya sebagai Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan (PADK).

"Saya dilantik pada 29 Juni 2018. Ini kan organisasi baru dengan struktur baru. Tapi saya sebelumnya dari Balitbang menuju ke sini, tidak jauh berbeda karena pekerjaan ini tidak jauh dari soal analisis," kata Pretty mengawali perbincangan.

Namun yang membedakan antara pekerjaannya di Balitbang dan PADK ini, ritme kecepatan kerjanya. "Di PADK ini saya memfasilitasi Kementerian Kesehatan khususnya pimpinan, atas isu-isu yang terjadi pada waktu itu dan harus dijawab segera. Kalau di Balitbang itu pada awal kita harus menyiapkan data primer, sedangkan di PADK memberikan jawaban cepat atas keadaan," terangnya.

Untuk itu, Pretty membutuhkan data-data terkini untuk mendukung laporannya. Maka ia membutuhkan sumber dari Balitbang, Pusat Data dan Informasi, dan lainnya. "Ada kasus apa, kita coba kemukakan data-data untuk menjawab isu. Dahulu ada Pusat Kajian Pengembangan Kesehatan. Kemudian Pusat Intelegensia. Dulu pusat kajian dibentuk dengan isu terkini. Dan isu datang beraneka ragam. Banyak rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan. Ada isu apa saja ya kita harus jawab isu itu."

Pretty menjadi PNS di lingkup Kementerian Kesehatan pada 1989, dan baru mengenal Sekjen Untung Suseno Sutarjo saat ia menjabat sebagai Kepala PADK. "Kenal dekat karena tugas. Banyak arahan yang beliau berikan. PADK ini punya kaitan erat dengan hukum nasional dan financing untuk menghadapi pandemi."

REVOLUSI MENTAL

SELAIN soal isu pandemi, hal lain yang menjadi fokus PADK adalah Revolusi Mental yang diwujudkan dalam reformasi birokrasi. "Ada delapan kelompok kerja dalam reformasi birokrasi ini. Salah satunya adalah manajemen perubahan. Di situ ada tentang Revolusi Mental. Ini menjadi tanggungjawab kami," ujar Pretty.



Sekjen memberikan pengarahan pada Agen Perubahan (AoC) Kemenkes.

Manajemen perubahan yang diharapkan Sekjen adalah setiap satuan kerja (satker) harus bisa mendorong para pegawainya menciptakan inovasi. "Kami membuat kebijakannya dan tools yang bisa dipakai. Dan ini diperkuat dengan Permenkes. Terutama untuk tes dan psikotes bagi CPNS dan PNS. Selain dua tes tadi juga diadakan *Executive Brain Assesment* (EBA). Fungsi EBA ini untuk mengetahui posisi otak pegawai ini ada dimana? Apakah otak kiri yang berkembang, atau sebaliknya," jelasnya.

Menurutnya keseimbangan otak kiri dan kanan sangat diperlukan, terlebih bagi para calon pemimpin. Dengan tes EBA ini akan diketahui kemampuan pegawai itu. Pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan harus disesuaikan dengan kemampuan otak. Hal semacam itu sudah dilakukan di lingkup Kementerian Kesehatan, untuk mencari calon-calon pemimpin.

Rencananya hal semacam ini juga diterapkan kepada anak-anak sejak dini. Pretty mencontohkan uji coba pengembangan otak kiri dan kanan dilakukan di lingkungan tempat penitipan anak Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Dharma Wanita Kemenkes.

"Jadi untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri ini, perlu stimulan. Kalau

“

Bagi para pegawai yang diberangkatkan untuk diklat, maka saat selesai diklat harus memberikan laporan inovasi apa yang akan dilakukan pegawai tersebut.

tidak dirangsang, tidak punya terobosan. Tes-tes ini akan dipakai Kementerian Kesehatan untuk seleksi jabatan. Kami sempat berpikir stimulan apa yang bisa merangsang otak kiri dan otak kanan biar seimbang untuk orang dewasa. Kalau anak-anak bisa dibentuk sejak dini. Ini masih kita pikirkan,” kata Pretty.

Metode tersebut sudah ditawarkan oleh PADK ke PKK Kementerian Dalam Negeri, karena salah satu program di PKK adalah pengembangan anak usia dini yang ditampung dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

“Terobosan-terobosan itu memang diinginkan Pak Sekjen. Pimpinan saya ini juga meminta agar saya mengerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pak Sekjen ini orangnya praktis, strategis cara berpikirnya dan terstruktur. Jadi gamblang apa yang dikerjakan itu untuk apa, dan targetnya siapa dan hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

Bagi Pretty, sosok Untung Suseno Sutarjo adalah seorang visioner. “Beliau selalu membagikan gambar-gambar inovasi canggih di bidang kesehatan ke rumah kesehatan. Selalu ada pertanyaan apakah bisa dilakukan di sini. Jadi harus cari terobosan.”

Kemudian bagi para pegawai yang selalu diberangkatkan untuk diklat, maka saat selesai diklat harus bisa memberikan laporan inovasi apa yang akan



Sekjen tes fungsi alat kesehatan.

dilakukan pegawai tersebut. "Kami sudah mengubah sistem diklat untuk pegawai. Usai diklat harus ada ide-ide baru dan terobosan baru, agar tercapai semua tujuan pembangunan kesehatan secara nasional."

Apalagi Kementerian PAN dan RB ikut memantau perkembangan para pegawai-pegawai yang mengikuti diklat ini. Pretty mencontohkan bahwa inovasi dan ide-ide yang terlihat dari hasil diklat adalah efisiensi anggaran, namun layanan kesehatan tetap berjalan bagus dan meningkat. Hal itu juga tergambar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahwa kini semua persoalan yang ada di Tanah Air harus diselesaikan secara gotong royong.

Pretty mencontohkan masalah diare di daerah disebabkan tidak ada air bersih. Maka Kementerian Kesehatan fokus pada penuntasan diare, sedangkan pengadaan air bersih ditangani oleh Kementerian PUPR. "Ini sesuai arahan pimpinan bahwa sekarang ini money follow program. Jadi program mana saja yang membutuhkan peningkatan, maka anggarannya akan ditingkatkan. Diambil dari efisiensi pada pos lain. Jadi gotong royong sudah terlihat termasuk subsidi silang di bidang anggaran," pungkasnya.



MENYATUKAN TIM UNTUK MENYUKSESKAN JKN

KEMENKES RI

Dr. Kalsum Komaryani MPPM
KEPALA PUSAT JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN





Sekjen mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Sumbar.

SAAT ini mekanisme pembiayaan kesehatan nasional menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Kepala Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Kalsum Komaryani MPPM, mekanisme pembiayaan kesehatan nasional ini sekarang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Melalui program JKN masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa menenemui hambatan finansial yang berarti.

Di Kementerian Kesehatan terdapat satuan kerja bernama Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan. Menurut Yani sapaan akrab Kalsum Komaryani, Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan Pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan. "Untuk jaminan kesehatan berupa jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan merupakan program prioritas. Ini program baru dan banyak inovasinya yang harus dikembangkan dan diimplementasikan," kata Yani.



Menkes dan Sekjen mengunjungi pasien dalam rangka penguatan JKN.

Menurutnya sebelumnya masyarakat belum mengenal betul mekanisme jaminan kesehatan, kecuali masyarakat yang sudah menerima manfaat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Askes, dan Jamsostek. "Saat ini peserta JKN sudah mencapai lebih dari 77%.

Dan layanan fasilitas kesehatan yang digunakan berkembang. Rumah sakit saja sekitar 2.300 yang ikut JKN ini, sedangkan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama lebih dari 22 ribu puskesmas di klinik kesehatan dan dokter praktek. Artinya dengan hadirnya BPJS ini sudah mendominasi *income* faskes. Pola pembayaran yang sudah dipilih yakni kapitasi dan INA-CBG's. Ini harus dihitung dengan benar, *evidence* dengan data. Inilah yang didorong oleh Pak Sekjen kepada kami," terangnya.

Sekjen pun merekrut orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk dari rumah sakit untuk menjadi satu tim yang menangani sejumlah pekerjaan penting agar JKN bisa berjalan sesuai target Pemerintah. "Tadinya orang-orang tersebar, kini bisa menyatu dalam satu tim di sini. Ini kalau bukan Pak Sekjen enggak bisa menjadi satu di sini. Tim ini merupakan tim tarif. Ini semua sentuhan Pak Sekjen," ungkapnya.

Untuk mekanisme pembayaran INA-CBG's, Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan masih meminjam grouper dari universitas PBB, United Nations University. Adapun ahlinya orang Malaysia. "Pak Sekjen mendorong agar kita bisa punya sendiri. Ada perjanjian kerja sama dengan Malaysia. Sudah dua tahun ini tim ini bekerja. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Dan tahun depan piloting. Mudah-mudahan pada 2020 sudah mandiri. Untuk saat ini masih kerja sama dengan ahli dari Malaysia itu."

Selain tarif, hal lain yang menjadi perhatian Sekjen adalah penilaian teknologi kesehatan atau *health technology assessment* (HTA). Mekanisme HTA ini harus dilakukan dalam menjalankan jaminan kesehatan. Negara maju pun menjalankan hal tersebut dan memiliki tim untuk HTA ini. "Pak Sekjen yang mendorong kami untuk segera membentuk tim. Bahkan Pak Sekjen ke Inggris untuk belajar bagaimana tim HTA di sana. Inggris adalah negara terbaik dalam HTA. Di sana namanya NICE. Kemudian Bangkok juga bagus untuk HTA ini. Di Indonesia namanya KPTK (Komite Penilaian Teknologi Kesehatan). Kita harus cepat-cepat jalannya dan belajar kemana-mana. Tim kami ini dari perguruan tinggi, rumah sakit dan ahli lainnya."

Setiap tahun tim ini membuat kajian ilmiah untuk evaluasi klinis dan evaluasi ekonomi efisiensi. "Hasilnya dipakai untuk menyusun kebijakan mafaat JKN," jelas Yani.

"Kemudian tugas lain ditangani Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan adalah menyusun belanja kesehatan nasional atau national health account (NHA)."

Untuk belanja kesehatan nasional ini dikumpulkan dari realisasi anggaran kesehatan dari pemerintah pusat, daerah juga belanja kesehatan pihak swasta. Saat ini Kemenkes bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Indonesia. "Pak Sekjen mendesak agar tim Kemenkes meningkat kapasitasnya. Saat ini kami sudah memahami pada penyusunan belanja kesehatan. Saat ini sudah ada kelembagaan, makin bagus. Ada surat keputusan Menkes tentang Tim NHA."

Pak Sekjen itu tegas, berani, disiplin, dan selalu mendorong anak buahnya bisa bekerja cepat. Ada masalah langsung direspons cepat. Ada langkah solusi.

Adapun tarif ini dipakai oleh BPJS untuk membayar ke rumah sakit. "Kalau kita *enggak* membuatnya maka *enggak bisa* untuk membayar. Ya memang manfaat ke masyarakat *enggak* langsung. Masyarakat berobat langsung bisa pulang. Pelayanan yang diberikan faskes dibayari oleh BPJS. Ini tarif yang digunakan adalah tarif hari yang ada di sini," kata Yani.

Dalam hubungan pekerjaan, Yani terkesan dengan cara kerja Sekjen dalam mendorong anak buahnya untuk bekerja tepat waktu, jujur, profesional, dan cepat. "Pak Sekjen itu tegas, berani, disiplin, dan selalu mendorong anak buahnya bisa bekerja cepat. Ada masalah langsung direspons cepat. Ada langkah solusi. Karena bapak mendorong kami harus bekerja jujur, ya kami menjadikannya sebagai panutan. Kami merasa kehilangan," pungkas Yani.

KEKUATAN PAK UNTUNG, DIA TIDAK MAU BERBISNIS

Sebagai Sekjen sosok Untung Suseno juga sangat cocok bagi tugas-tugas yang harus diemban Pusat Krisis Kesehatan. Kecepatan dan ketepatan keputusan yang ia buat membuat Pusat ini mampu bergerak cepat, mengatasi krisis.

ACHMAD YURIANTO
KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN



DUA minggu setelah hingar bingar perayaan tahun baru 2014 usai, Achmad Yurianto memasuki fase lain dalam kehidupannya. Selasa pagi, 14 Januari, dokter berpangkat Kolonel TNI Angkatan Darat, itu, harus mengemban tugas baru di Kementerian Kesehatan.

Ia mendapat tanggung jawab lebih besar, yakni mengurus Pusat Krisis Kesehatan. Di tempat baru ini, dokter lulusan Universitas Airlangga itu dipercaya menjadi nakhodanya. "Di TNI, pekerjaan saya ialah membawa rumah sakit lapangan ke banyak lokasi bencana dan krisis. Saya tukangnya," ungkap Yurianto.

Saat itu, Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, MPH membutuhkan sosok ideal untuk mengawal Pusat Krisis Kesehatan. Ia meminta kepada Panglima TNI, saat itu, Jenderal Moeldoko untuk memberikan seorang dokter tentara dengan pengalaman lapangan menanggulangi beragam masalah kebencanaan.

Telunjuk sang jenderal pun mengarah ke Yurianto. Sebagai serdadu, ia tak kuasa menolak.

Saat pelantikan, pria yang sudah berdinasi di TNI-AD selama 28 tahun ini, sempat bersapa dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), Untung Suseno Sutarjo. Pembicaraan awal itu tidak terlalu intens. Namun, siapa nyana, masih di tahun yang sama, Kepala BPPSDMK itu mendapat kepercayaan menyandang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Lembaran baru hubungan kedua pejabat ini mulai terbentuk. "Struktur dan tugas Pusat Krisis Kesehatan langsung di bawah menteri. Tapi, dalam soal administrasi, kami berada di bawah kesekjenan, sama seperti pusat lainnya," aku Yurianto.

Kondisi itu bukan berarti ada dualisme kebijakan di Kementerian Kesehatan. Keberadaan sekretaris jenderal justru sangat mempercepat kerja birokrasi. "Saat membutuhkan keputusan dari pimpinan, saya selalu melapor ke Pak Sekjen sebelum ke Ibu Menteri. Jika ternyata masalah bisa selesai di Pak Sekjen, ya sudah, saya tidak perlu lapor lagi ke Menteri, karena pasti juga sudah dilaporkan Pak Sekjen ke Menteri," tutur Yurianto.



Sekjen mengunjungi pasien korban gempa di Lombok.

Dalam kasus krisis akibat bencana di Lombok, Yurianto melapor ke sekjen, mulai dari kejadian hingga upaya yang harus dilakukan. Untung berpikir dan membuat keputusan tepat. "Kami diminta harus segera bergerak. Ia membebaskan Pusat Krisis mengerahkan sumber daya terdekat yang mampu memberikan pertolongan," jelasnya.

Untung juga tidak membiarkan tim Pusat Krisis Kesehatan bekerja sendiri. Ia beberapa kali turun sendiri ke Lombok. Nusa Tenggara Barat, tutur Yurianto, yang punya kedekatan tersendiri di hati dan pikiran Untung. Maklum saja, karena dalam struktur penugasan pejabat di Kementerian Kesehatan, Sekjen mendapat kepercayaan melakukan pembinaan wilayah di provinsi itu. "Istilahnya, ada kedekatan emosional NTB dan Pak Untung," tandas Yurianto.

KEPEDULIAN MASYARAKAT

CIKAL bakal Pusat Krisis Kesehatan ialah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 360/1991, tertanggal 24 Juni 1991. Dengan SK itu, Menkes membentuk Kelompok Kerja Tetap Departemen Kesehatan. Tujuannya, kelompok ini mengatasi sejumlah permasalahan kesehatan akibat penyakit potensial wabah, dan kejadian bencana yang berdampak terhadap kesehatan.

Dalam perjalanan, Departemen Kesehatan membentuk unit fungsional untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan akibat bencana, berbentuk pusat pengendalian operasi. Pada 7 Juni 1995, Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Pusat Penanggulangan Krisis Akibat Bencana atau *Crisis Center*.

Perubahan nama kembali terjadi pada 2010 dengan nama Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Sempat berganti pimpinan dari Mudjiharto ke Sri Henni Setiawati, serta Oscar Primardi sebagai Pelaksana Tugas, Achmad Yurianto menjadi orang keempat yang dipercaya menjadi kepala, mulai Januari 2014.

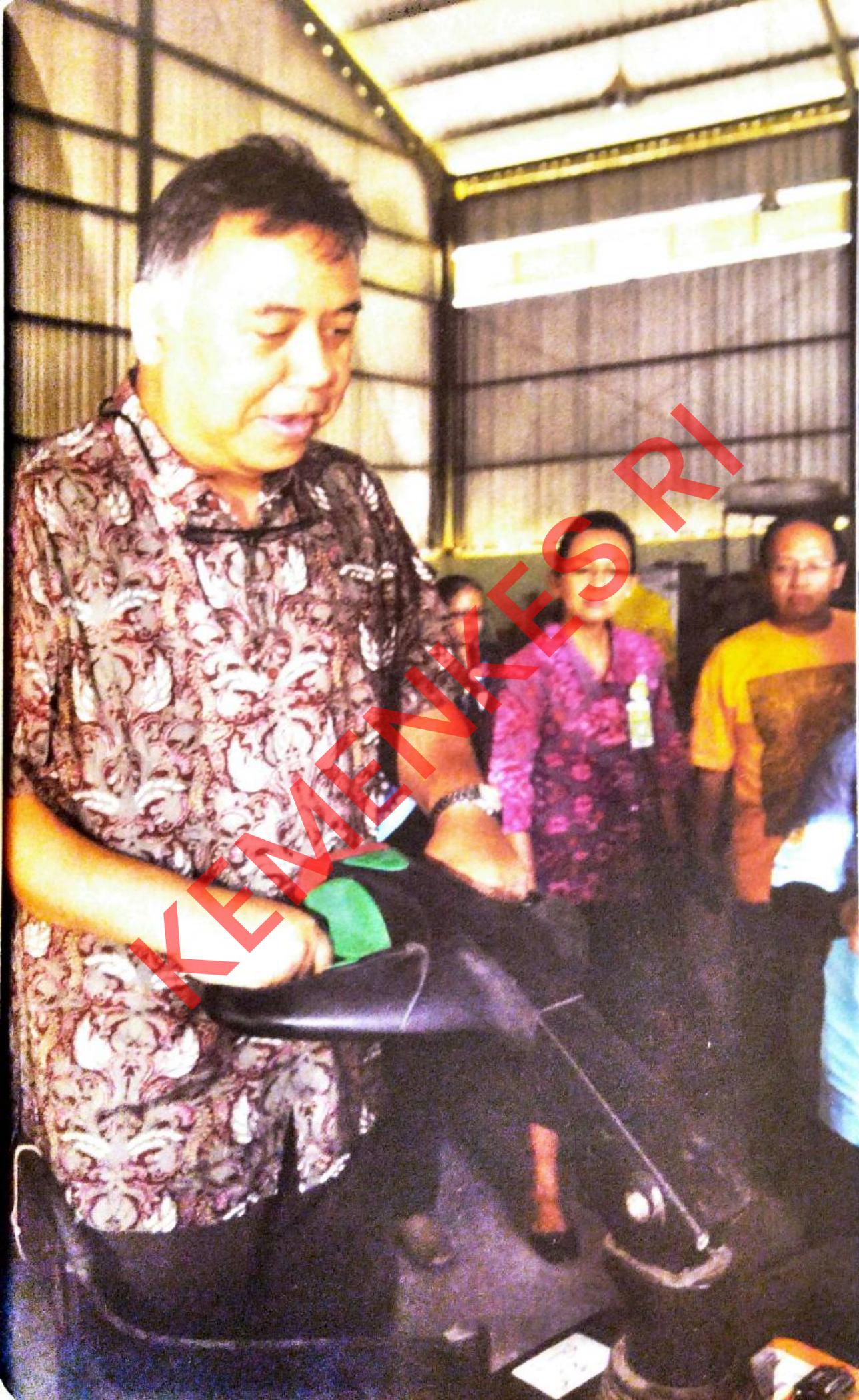
Setahun kemudian, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan No 64/2015, untuk melakukan restrukturisasi dan perubahan nomenklatur organisasi menjadi Pusat Krisis Kesehatan. "Tugas kami ialah menyusun kebijakan yang harus diambil Menteri Kesehatan, jika krisis terjadi," tutur Achmad Yurianto.

Krisis kesehatan di banyak tempat terjadi karena dua faktor. Yang pertama didahului bencana, dan yang kedua tanpa bencana. Yurianto mencontohkan krisis yang tidak didahului oleh bencana ialah kasus kekurangan gizi dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua, yang mencuat Januari 2018. Sebanyak 59 anak-anak dan balita menjadi korbannya.

Dalam kasus di Kabupaten Nduga, menurut Yurianto, mitigasi kesehatan harus dilakukan. Vaksinasi campak harus dilakukan, harus berhasil dan tidak ada alasan lain. Namun, kondisi di lapangan berbeda dengan keinginan di atas kertas. Asmat dan Nduga bukan daerah yang mudah dijangkau. Transportasi ke Nduga sulit, tanpa jalan darat, sehingga harus dilakukan dengan pesawat terbang. Pergi ke Asmat, akses satu-satunya ialah melewati sungai.

"Di Nduga, untuk melakukan satu kegiatan, kebutuhan biayanya mencapai Rp3,8 miliar. Inilah yang harus saya laporkan ke Ibu Menteri dan Pak Sekjen. Saya selalu memberi penegasan, program itu harus tetap jalan, karena jika tidak akan menjadi potensi masalah. Bisa jadi krisis," tegas Yurianto.

Dalam sejumlah kasus, dia mengaku merasa beruntung bisa bekerja sama





Sekjen meninjau dapur umum untuk korban gempa di Lombok

dengan Menteri dan Sekjen yang mampu bertindak cepat. "Di Kementerian Kesehatan, semua keputusan atas krisis tidak selalu harus jadi peraturan. Kebijakan yang ditempuh tidak selalu tertulis, bisa petunjuk saja dari Ibu Menteri dan Pak Sekjen. Selalu ada penyelesaian di rapat terbatas," ungkapnya.

Sementara terkait krisis akibat bencana, pemerintah ternyata tidak harus bekerja sendiri. Di Lombok, misalnya, tidak lama setelah gempa, Pusat Krisis Kesehatan menggerakkan potensi komunitas yang ada di masyarakat lewat media sosial. Hasilnya, dalam waktu hanya tiga hari, 2.000 relawan kesehatan terkumpul. Di antara mereka ada 37 ahli bedah tulang, 15 ahli anastesi.

Yang masih terpatri dalam benak Yuriyanto hingga saat ini ialah permintaan pendek dari Untung Suseno Sutarjo. "Saat kami melapor ke Pak Sekjen, beliau memberi arahan kami tidak bekerja sendiri, kami harus mengerahkan potensi masyarakat untuk memastikan kapasitas Indonesia untuk itu besar sekali. Tugas kami mengelaborasi dan mengoordinasikannya. Itu tugas Pusat Krisis," tutur Yuriyanto mengutip petunjuk Untung.

Bencana di Lombok bukan yang pertama. Bukti bahwa potensi masyarakat sangat besar dalam kejadian bencana juga terlihat di Pidie Jaya, Aceh. Daerah ini digetarkan oleh gempa bumi dengan kekuatan 6,5 skala richter, pada Desember 2016 silam. "Dalam tempo satu jam, Pusat Krisis Kesehatan telah mengoordinasikan 63 ambulans untuk mengangkut korban dan 142 ahli bedah di lokasi kejadian. Daerah sekitar, yakni Bireun, Sigli, Bener Meriah dan Aceh Utara bergerak tanpa komando ke Pidie Jaya," kisah Yurianto.

Alhasil dalam waktu 4 hari, mereka sudah bisa melakukan 183 tindakan operasi tulang. Dalam waktu dua pekan tidak ada lagi kasus emergensi terkait trauma. "Luar biasa Aceh."

VISIONER DAN TEGAS

SELALU berhubungan, berkoordinasi dan mengambil keputusan bersama, dalam sejumlah aksi, Achmad Yurianto mengakui Untung Suseno Sutarjo merupakan sosok yang punya visi jauh ke depan. Dalam urusan dengan Pusat Krisis Kesehatan, kebijakannya sangat mendukung lembaga ini untuk bertindak taktis tapi cepat.

Dalam fenomena kebencanaan, lanjut Yurianto, pemegang kebijakan dan pelaksana di lapangan tidak boleh berpikir biasa, namun juga tidak boleh berlaku sembarang, tergesa, atau dalam bahasa Jawa grudak-gruduk. "Pak Untung paham betul soal itu. Mungkin juga karena pengalamannya, karena dia merupakan salah satu dewan pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana."

Kebijakan Sekjen Kementerian Kesehatan yang suportif, membuat Yurianto cepat beradaptasi sebagai orang baru. "Meski tidak berasal dari Kementerian Kesehatan, saya tidak shock ketika mendapat tugas menjadi Kepala Pusat Krisis Kesehatan."

Seperti postur tubuhnya yang tinggi besar dan suara bariton, Untung yang dikenal Yurianto merupakan orang yang sangat tegas. Hitam ya hitam, putih ya putih.

Pun Untung tidak pernah bermain-main dengan anggaran. Dia tidak mengenal bisnis dalam pekerjaannya.

"Sejak awal mengenal beliau, ini yang membuat saya sangat respek terhadapnya. Sama seperti tentara yang mengabdikan, Pak Untung juga sudah melakukannya," tandas Yuriyanto.

Yang lebih berarti dibanding semua itu ialah cara berpikir Untung yang visioner dan terus membuat perubahan. Dia tidak hanya berpikir yang terjadi hari ini, tapi juga jangka panjang.

Dalam melihat Pusat Krisis Kesehatan, ujar Yuriyanto, Untung tidak memandangnya sebagai institusi yang berdiri sendiri, *superbodi*. Ia berpikir pusat ini merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan, yang di dalamnya juga bertugas Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, sejumlah ditjen lain, serta Badan.

"Karena itu, ketika menanggulangi masalah krisis, saya dan 36 anak buah, meski harus mengelola 514 kabupaten dan kota, masih bisa bersikap tenang. Sekjen sudah menggaris bawahi bahwa direktur-direktur bisa ikut dikerahkan. Itu yang membuat saya tidak ragu dalam bertindak," lanjutnya.

Kebrilianan seorang Untung juga terlihat dalam pengelolaan *road safety* even. Dalam urusan arus mudik Lebaran, salah satunya. Dulu, untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman para pemudik, soal kerja Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Saat Untung menjabat, ia melihat arus mudik merupakan masa darurat. Kementerian Kesehatan tidak bekerja sendiri, karena banyak lintas sektor yang terlibat, di antaranya rumah sakit, pra rumah sakit, ambulans, polisi dan layanan informasi kedarurat medik 119.

Untung pun memutuskan mengalihkan koordinasi penanganan arus mudik ke Ditjen Pelayanan Kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan juga masuk dalam tim. "Sekjen menangani masalah kesehatan secara integral, tidak lagi sektoral. Urusan Kementerian Kesehatan merupakan urusan bersama," tegas Yuriyanto.



Sekjen meninjau ketersediaan obat korban gempa Lombok.

MENGAWAL KESEHATAN TAMU ALLAH

Kualitas pelayanan kesehatan haji setiap tahun terus diperbaiki. Jumlah jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pun bisa terus dikurangi.

Dr dr Eka Jusup Singka M.Sc
KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI
KEMENTERIAN KESEHATAN





Sekjen berikan semangat kepada tim TKHI Indonesia.

RAPAT siang itu, 2016 silam, dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes. Pertemuan yang digelar menjelang masa persiapan penyelenggaraan haji tersebut dihadiri Kepala Pusat Kesehatan Haji Mukhtaruddin Mansyur.

Beliau tidak sendiri. Seluruh kepala bidang ikut membawa data dan melaporkan persiapan yang sudah dilakukan.

Di antara mereka ada Dr dr Eka Jusup Singka MSc, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Pusat Kesehatan Haji. "Meski sudah mengenalnya, dari pertemuan itu, saya menyimpulkan perhatian Pak Untung terhadap masalah haji sangat besar," tutur Eka Jusup.

Dengan gayanya yang khas, tenang tapi tegas, Untung bertanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji, apa yang baru dari penyelenggaraan haji 2016. Mukhtaruddin pun menunjuk Eka Jusup untuk menjawabnya.

"Saat itulah, saya mengusulkan agar syarat istithaah kesehatan haji diberlakukan untuk semua calon jemaah, mulai dari tingkat kabupaten

dan kota. Beragam pertimbangan saya sampaikan," cerita dokter lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar ini.

Tidak diduga, setelah mendengar penjelasan yang detil itu, Untung menganggukkan kepala. Dengan suara baritonnya, orang kedua di Kementerian Kesehatan itu menyatakan setuju.

"Ya oke kalau memang harus begitu," kisah Eka menirukan pernyataan Sekjen Untung.

Saat itulah, Eka mulai mendapat gambaran siapa sosok beliau. "Pak Untung tidak suka bertele-tele, tidak mau banyak teori. Ia lebih suka anak buahnya bekerja dan mewujudkan ide-ide terbaik mereka."

Penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa ditangani satu kementerian sendiri. Selain Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji, Kementerian Kesehatan juga dilibatkan untuk melayani kesehatan jemaah haji.

Kedua kementerian bisa bersinergi berkat komunikasi yang baik antara Kementerian Kesehatan yang dimotori Sekjen Untung Suseno dengan para petinggi di Kementerian Agama. Salah satu terobosan demi perbaikan penyelenggaraan haji ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Saat baru diterbitkan, peraturan itu sempat ramai diperbincangkan. Namun, setelah dua tahun berjalan, banyak pihak mengakui aturan itu sangat baik.

Setahun kemudian, pada Senin, 10 April 2017, Eka Jusup Singka melanjutkan tongkat estafet Mukhtaruddin Mansyur. Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji, ia juga terus mendapat dorongan untuk berinovasi dari Sekjen Kemenkes Untung Suseno.

Tahun ini, Pusat Kesehatan Haji mulai melakukan terobosan lain, yakni menggulirkan penggunaan kartu kesehatan haji elektronik, yang dilengkapi dengan *barcode*. "Tahun lalu saya uji coba untuk jemaah haji asal Jawa Barat. Tahun ini saya ingin uji coba di Jawa Tengah," ujar Eka Jusup.

Lagi-lagi sekjen Untung memberikan dukungan besar untuk terobosan itu. Hanya saja, Pak Untung meminta tidak hanya mencoba kartu kesehatan haji elektronik itu di Pulau Jawa saja.

"Kenapa hanya di Jawa saja. Kartu kesehatan haji elektronik bisa dicoba dan diberlakukan di seluruh embarkasi," desak Untung.

Menata pelayanan kesehatan haji seperti tidak ada habisnya. Di masa kepemimpinan Eka Jusup, Pusat Kesehatan Haji memindahkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang semula berada di Al Khalidiyyah ke Aziziyah yang lebih besar. Peralatan yang disediakan juga lebih dilengkapi.

Rencananya Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah juga akan dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Kemudian di Jeddah juga ada wisma kesehatan haji.

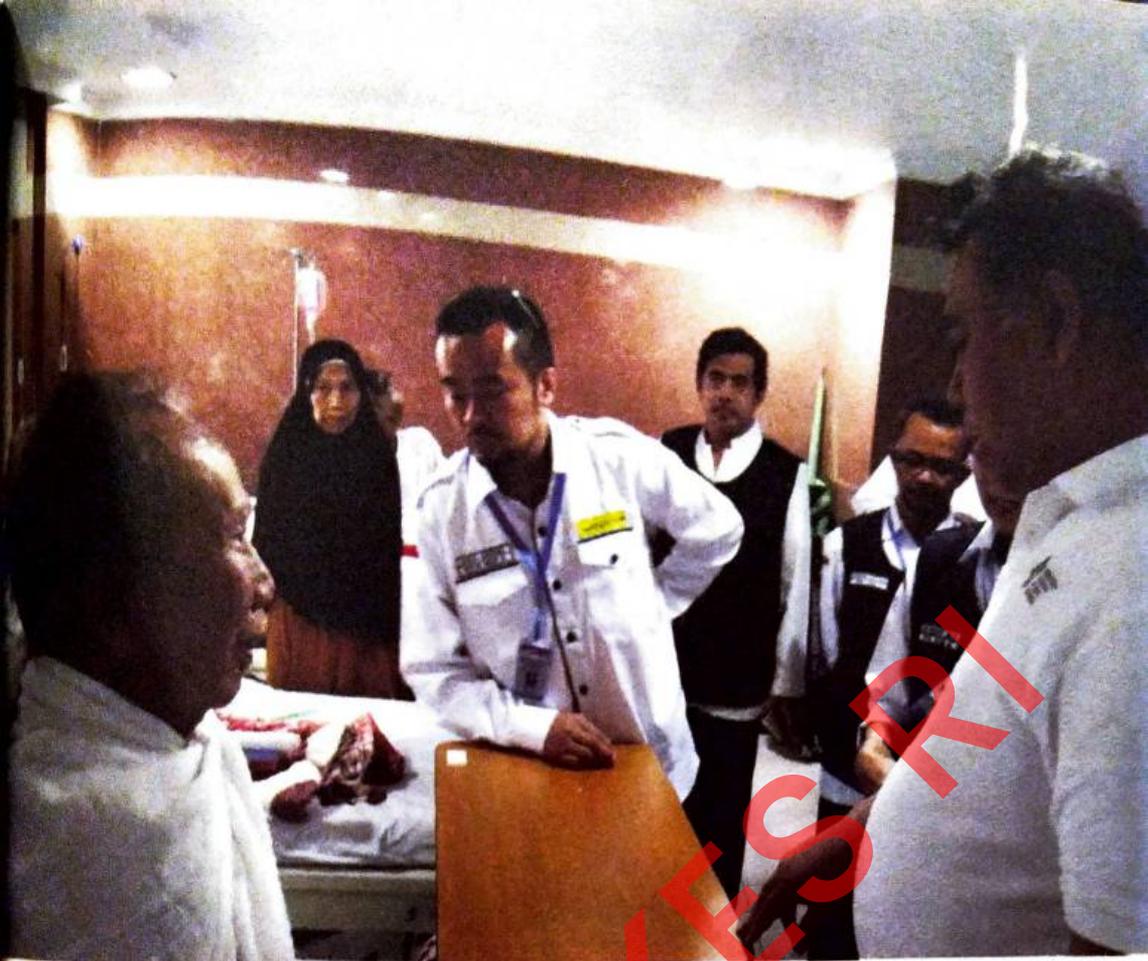
"Itu semua usulan kami dan diterima Pak Sekjen. Menurut saya ini semua revolusi karena banyaknya perubahan-perubahan dalam pelayanan kesehatan haji," kata master lulusan University of York, England, ini.

Dalam banyak kesempatan, Untung tidak hanya bertindak sebagai atasan. Ia juga bisa berlaku layaknya seorang bapak.

Eka Jusup merasakannya saat ia harus menjelaskan kepada Majelis Ulama Indonesia soal vaksin meningitis yang wajib dilakukan para calon jemaah haji. Tak disangka, di tengah perjalanan menuju MUI, Untung menyusul.

"Komunikasi yang kami bangun dengan MUI berjalan sangat baik. Hasilnya, sampai sekarang tidak ada penolakan terhadap kewajiban vaksinasi tersebut," tambahnya.

Kepedulian Sekjen Kementerian Kesehatan terhadap persoalan haji juga terlihat saat Eka mengusulkan perekrutan petugas kesehatan haji harus dilakukan lebih awal. Pertimbangannya tentu saja agar persiapannya bisa lebih matang dan maksimal.



Sekjen berdialog dengan jamaah Haji Indonesia di tanah suci.

Pak Untung sepakat. Dia pun tidak ragu-ragu menggelontorkan anggaran pendukung sebesar Rp500 miliar dari APBN.

"Setiap tahun, anggaran untuk pelayanan kesehatan haji terus naik. Saya melihatnya itu sebagai bentuk kepedulian Pak Sekjen terhadap persoalan haji," tandas Eka.

KARTU KESEHATAN JEMAAH HAJI

KARTU Kesehatan Jemaah Haji (KKJH) merupakan catatan medis kondisi kesehatan para jemaah haji. Kartu itu terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes).

KKJH tidak saja memuat data umum jemaah haji yang dapat dibawa dalam bentuk ID card alias kartu identitas. Ia juga merupakan catatan medis sang jemaah haji. Pada KKJH juga terdapat *International Certificate Vaccination* (ICV) sebagai tanda seseorang sudah mendapat suntikan vaksinasi meningitis.

Pentingnya KKJH juga dirasakan, karena di dalamnya juga termuat tanda bahwa sang jemaah termasuk katagori Risti (risiko tinggi) atau tidak. Bagi Jemaah haji dengan Risti maka terdapat warna oranye kartunya.

"KKJH benar-benar efektif, memuat data yang lengkap jika dibandingkan dengan Buku Kesehatan Jemaah Haji yang memiliki data statis," ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Dr dr Eka Jusuf Singka MSc.

KKJH memuat banyak data, sedangkan BKJH tidak akan sanggup memuat data mobile dan dinamis seperti kartu itu. Dengan KKJH juga membuat anggaran lebih efisien.

Gelang penanda Risti menjadi satu warna, yaitu oranye. Keputusan terhadap satu warna merupakan terobosan baru yang memiliki beberapa manfaat. Gelang ini lebih memudahkan semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap jemaah haji Risti.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam hal intervensi promosi-preventif dan juga pengobatan terhadap semua jemaah haji Risti. Selain itu, dengan gelang satu warna akan lebih menjaga stabilitas psikologis Jemaah haji.

Perubahan dari BKJH ke KKJH dan perubahan warna gelang risti terjadi di masa Untung sebagai sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Di zaman Untung pula telah dilaksanakan integrasi Siskohatkes dengan Siskohat Kemenag. Langkah itu membuat pola penyelenggaraan kesehatan haji dapat terlaksana lebih baik mulai dari tingkat kabupaten dan kota. Apalagi didukung dengan penggunaan KKJH, maka semua jemaah haji lebih patuh memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Data Siskohatkes yang tersambung ke Siskohat Kemenag membuat kepatuhan jemaah terhadap pemeriksaan dan pembinaan kesehatan semakin tinggi. Hasilnya, angka pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji semakin meningkat.

Pada periode Untung pula, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung secara penuh pelaksanaan istithaah kesehatan Jemaah haji. Hal ini tertuang



Sekjen memberikan arahan kepada delegasi tim Haji Indonesia.

dalam hasil Ijtima Nasional MUI di Banjarbaru, 2018.

Dalam ijtima tersebut, MUI menyatakan betapa pentingnya kesehatan dalam berhaji, dan Ulil Amri dapat mencegah calon Jemaah haji berangkat ke Saudi karena alasan kesehatannya.

TURUNKAN JUMLAH KEMATIAN

PELAYANAN kesehatan haji dilakukan sejak jemaah haji masih berada di Tanah Air hingga mereka tiba di Tanah Suci. Target besarnya, selama melaksanakan ibadah haji, mereka dalam kondisi sehat.

Kementerian Kesehatan mengklaim pelayanan kesehatan jemaah haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikasinya, jumlah kematian jemaah yang terus menurun.

Pada 2016 lalu, jumlah jemaah haji dari Indonesia mencapai sekitar 160 ribu orang. Tahun ini, jumlahnya lebih dari 200 ribu orang.



Sekjen berdialog dengan petugas kesehatan Haji Indonesia.

Menurut catatan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Agama, pada 2016 jumlah jamaah wafat sebanyak 342 orang. Jumlah itu setara dengan 0,20% dari total jamaah yang diberangkatkan.

Tahun ini, tingkat kematian menurun 0,18%. Dari total 203 ribu jamaah yang berangkat, 381 di antaranya wafat di Tanah Suci.

Dari total angka tahun ini, jamaah yang wafat di Makkah mencapai 263 orang, di Madinah 73 orang, di Arafah 8 orang, dan di Mina 24.

Jika dihitung *crude death rate*-nya malah ini yang paling rendah. Penurunan signifikan angka kematian di bandingkan tahun lalu nampak di Arafah. Pada 2017, total jamaah wafat di Arafah mencapai 20 orang. Jadi perbaikan sistem dan perbaikan sarana prasarana berhasil menurunkan angka kematian.

Penyebab kematian yang paling tinggi ialah paru-paru, bukan jantung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjalankan pengawasan istita'ah.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Dr dr Eka Jusuf Singka MSc mengakui keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia



dari sektor kesehatan haji, tidak lepas dari peran Sekjen Kementerian Kesehatan dr Untung Suseno Sutarjo M.Kes. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah haji, menjadi salah satu faktornya.

Permenkes ini benar-benar telah menyita perhatian publik di Indonesia. Awalnya terjadi pro-kontra terhadap pengaturan kesehatan yang membatasi Jemaah haji tertentu untuk tidak berangkat haji karena alasan kesehatan.

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dilahirkan untuk menjadi patokan terhadap kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Namun, di lapangan, Permenkes ini telah disalahtafsirkan bahwa Kementerian Kesehatan menghalang-halangi orang berhaji, dengan beragam syarat.

Problem inilah yang sempat menggelayuti benak Eka. Saat itu, ia baru menjadi Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

Suatu hari, seusai salat Jumat, Eka merenung. "Saya ini satu-satunya Kapus Kesehatan Haji di Indonesia. Saya harus bertemu dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan direktur-direktur lainnya di Kemenag. Saya ingin membicarakan masalah ini."



Keinginannya itu ternyata juga sama dengan yang dirasakan Sekjen Kemenkes. Pulang dari Kementerian Agama, Pak Untung sudah mengontaknya. Mereka pun terlibat diskusi.

"Pak Untung itu suka sekali ide-ide yang disampaikan anak buahnya. Kalau idenya masuk akal, beliau pasti mendukung dan dikawal sampai benar-benar terwujud," tambah Eka.

Munculnya syarat istithaah ini kuncinya pada Al Quran. Syarat berhaji ada lima yakni beragama Islam, berakal sehat, dewasa (*baligh*), merdeka dan mampu. Untuk mampu ini yang dimaksud sebagai syarat istithaah. Bila secara fisik tidak mampu karena sakit, orang tersebut bisa mewakilkan kepada orang yang mampu untuk mengerjakan haji.

Di periode Sekjen Untung, terdapat peningkatan komitmen politik penyelenggara Haji dalam mendukung Istithaah kesehatan, yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 4001 Tahun 2018, yang isinya mendukung pelaksanaan istithaah kesehatan jemaah haji. Status kesehatan menjadi salah satu syarat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).



DIGANJAR PENGHARGAAN

SETAHUN lalu, pada 2017, dialog panjang terjadi antara Eka Jusup Singka dan Untung Suseno Sutardjo. Tidak langsung, karena Eka sedang berada di Arab Saudi dan Untung di Indonesia.

Kala itu, semua petugas haji sudah kembali ke Tanah air. Masa operasional Klinik Kesehatan Haji di Indonesia hanya tinggal empat hari lagi.

Hanya saja, masih ada 66 jemaah haji yang dirawat di klinik. Kabar itu sampai ke telinga Untung. Ia pun menelpon Eka.

"66 orang yang masih dirawat itu mau kamu apain?" tanya suara berat dari seberang sana.

Eka menjawab mereka tetap akan diobati sampai sembuh. "Saya ingin zero. Semua disembuhkan," tegasnya.

"Bagaimana caranya?" sang Sekjen balik bertanya.

Alhasil, keteguhan Eka didukung Untung. Saat klinik harus ditutup, upaya tim

kesehatan membuahkan hasil, dan sebagian jemaah yang sakit bisa sembuh. Mereka bisa pulang ke Indonesia.

Sebagian jemaah memang tidak bisa pulang dan dikirim ke rumah sakit milik pemerintah Arab Saudi. Bahkan ada yang wafat.

Kali ini, Pak Untung meringankan kaki. Ia terbang dari Jakarta ke Arab Saudi. Sekjen langsung mengecek sendiri kondisi para pasien yang belum bisa pulang.

"Pantas ya. Kondisi mereka sudah parah. Allah sudah memberi petunjuk kepada saya," ujar Untung kepada Eka.

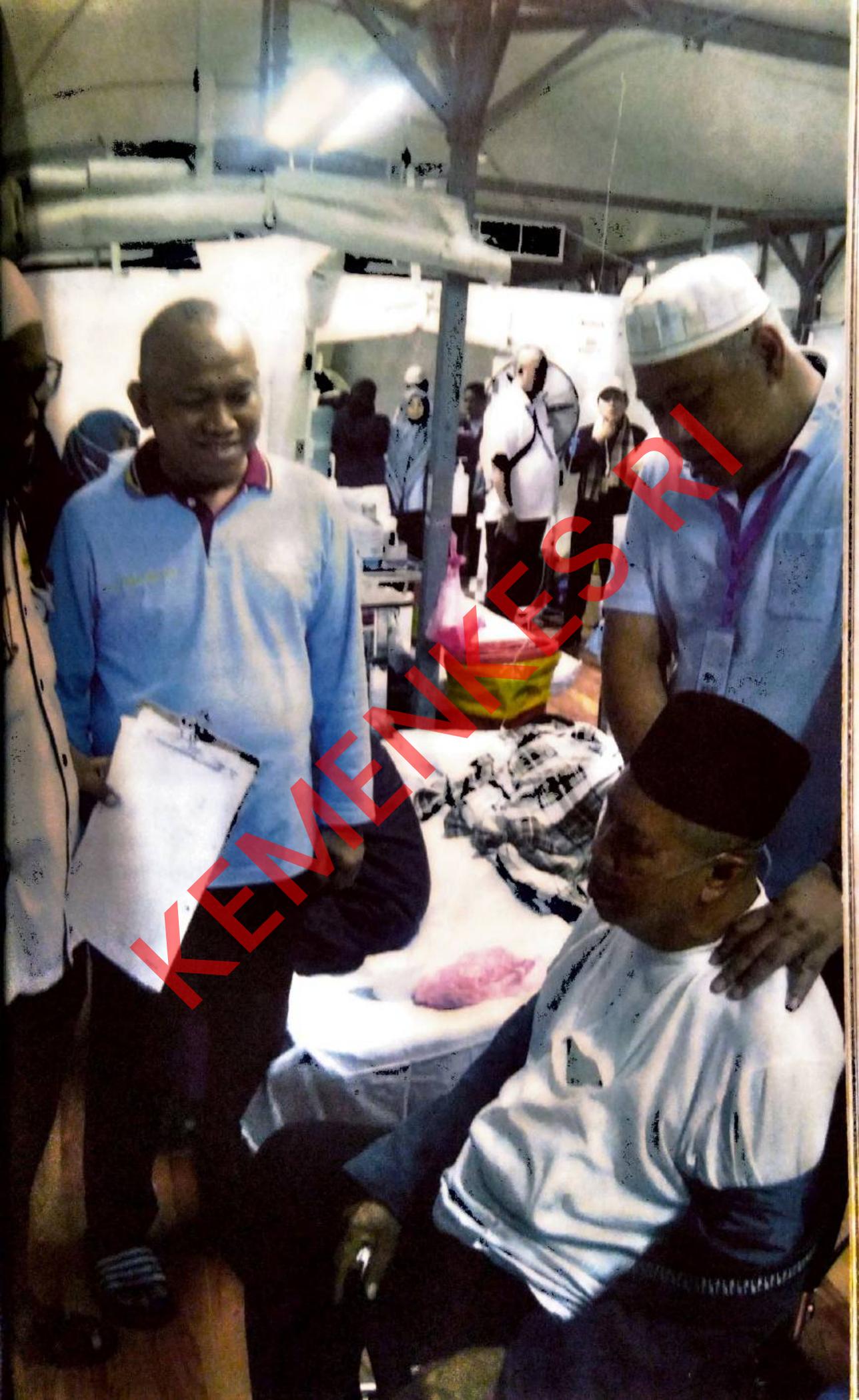
Atas kejadian itu, Eka pun berpikir bahwa meski inovasi terus dilakukan Pusat Kesehatan Haji, namun kendala masih terus ada. Salah satunya, soal komitmen Kementerian Agama tentang kesehatan haji. "Belum semua jemaah memenuhi syarat istithaah ini," ungkap Eka.

Dia berjanji akan terus berjuang agar komitmen soal istithaah ini bisa terwujud.

Setiba di Tanah Air, komunikasi terus dijalin cukup antara Sekjen Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama. Hasilnya, sejak 2018, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama memberlakukan secara tegas syarat istithaah untuk jemaah haji.

Kerja keras dan kerja cerdas, aparat pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi jemaah haji terbayar lunas sejak 2016 lalu dan berlanjut hingga tahun ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan penghargaan Ambassador Health Awareness of Hajj untuk Kementerian Kesehatan RI.

Pemerintah Arab Saudi mengklaim Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan haji secara komprehensif dan terbaik di dunia. "Saya waktu itu dipanggil untuk menerima penghargaan. Saya tolak karena saya maunya penghargaan ini untuk Menteri. Keesokan harinya Pemerintah Arab Saudi menyerahkan hadiah berupa piala untuk Ibu Menteri," ungkapnya.



Di dalam negeri, hasil rapat evaluasi tim asistensi menyimpulkan bahwa hasil pelayanan kesehatan memuaskan. Para petugas bersemangat dan semua bekerja. "Pak Sekjen menyebut saya seorang pekerja," ujarnya sambil tersenyum bahagia.

Dalam banyak kesempatan, Sekjen selalu mengingatkan bahwa eselon II itu pekerja. Harus kerja bukan cuma duduk-duduk di belakang meja.

Ia pun selalu berpesan kepada para petugas kesehatan haji agar sigap, handal, amanah, respektif dan inovatif.

Dari beragam pengalaman, komunikasi dan interaksi dengan dua atasannya, yakni Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal, Eka mengakui mereka bijaksana dan penuh perhatian. "Semua petugas kesehatan haji mengaku merasakan hal yang sama."

Penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Kementerian Kesehatan pada saat periode Untung sebagai sekjen antara lain :

- Ambassador Health Awareness (2016)
- Ambassador Health Awareness (2017)
- Health Services for Indonesian Clinic Makkah (2017)
- Apresiasi dan pengakuan dari MoH Makkah (2018)
- Apresiasi dan penghargaan dari MoH Madinah (2018)
- Apresiasi dan penghargaan dari Komite Kantor Urusan Haji Makkah (2018)

TAK SEGAN MENEGUR DAN MEMBERI MASUKAN

EKA mengenal Untung sejak 2010. Saat itu, Untung masih menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan.

Namun tidak lama, karena pada tahun yang sama, Eka pindah ke Pusat Kesehatan Haji selama dua tahun, 2010-2012. Nasib mempertemukan Eka dengan Untung lagi, ketika ia dipindah ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

"Pak Untung jadi atasan saya. Di BPPSDMK, saya lebih dalam mengenal beliau," kenang Eka.

Tidak hanya pujian. Sebagai anak buah, Eka juga sering ditegur jika memang dibutuhkan.

Satu kali, Eka pernah ditegur gara-gara tempat duduk pada saat morning briefing. Ia duduk di deretan eselon empat.

"Saya sebetulnya sengaja duduk di situ karena ingin bicara lebih dekat dengan Pak Untung untuk meminta izin. Saya akan menghadiri acara mewakili kepala pusat," ujarnya.

Namun, belum berbicara, Sekjen sudah menegurnya. "Kamu kenapa duduk di situ. Apa ingin diturunkan ke eselon empat," cerita Eka sambil tersenyum mengingat kejadian itu.

Dari banyak pertemuan, rapat dan kerja bareng, Eka mengenal lebih dekat sosok dan pribadi Untung. Sang guru yang juga atasannya itu kerap memberi masukan. Mulai dari cara memimpin rapat, hingga tidak boleh telat datang untuk rapat.

Semua teguran dan nasihat Untung, tutur Eka, sifatnya positif. Ia pun berharap pengganti Sekjen Untung juga memiliki pemikiran atau gaya kepemimpinan yang sama. "Selama ini ide-ide dari *bottom up* selalu dia dukung selama masuk akal. Beliau selalu mengawal hingga benar-benar diwujudkan di masyarakat. Saya tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan atasan saya itu," pungkas Doktor dalam Bidang Agama dan Kesehatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.

KAMI DI SEBERANG, TAPI KAMI JUGA DIPERHATIKAN

Meski otonom, Korwil Kedokteran
Indonesia juga merasakan semangat
untung-fuse, dan kerja bersama

KEMENKES RI



KEMENKES RI



Sekjen memimpin rapat di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Pada tanggal 29 April 2005, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI didirikan sebagai badan otonom, mandiri, non struktural, independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Namun dalam praktiknya, badan otonom ini tidak bisa terlepas dari Kementerian Kesehatan terkait dengan fasilitasi kegiatan dan anggaran KKI.

Kondisi tersebut membuat Sekretaris KKI Dr. dr. Gema Asiani, M. Kes berinteraksi dengan seorang dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Lewat sosok inilah ia berkoordinasi soal anggaran juga upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Sekretariat KKI. "Pak Sekjen sangat antusias untuk mendukung pendanaan bagi KKI. Kami tidak pernah merasa ada hambatan selama berkoordinasi dengan Beliau", ungkap Gema.

Sesuai tanggung jawabnya, Untung tidak hanya melepas dana begitu saja. Diapun selalu memantau apa yang sudah dilakukan KKI sesuai fungsinya. Bentuk perhatiannya juga terlihat dari tindakannya yang mau mendengar dan peduli. "Apa yang belum, tapi harus dilakukan KKI?. Apa yang Kementerian kesehatan siapkan untuk mendukungnya?".

Selain dukungan untuk Ketua dan Anggota KKI yang berjumlah 17 orang serta Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang berjumlah 11 orang, Untung juga mendorong para staf KKI untuk meningkatkan kapasitas diri. "Pak Untung meminta kami meningkatkan kualitas staf dengan mengikuti berbagai pelatihan. Supaya lebih memahami tugas dan mengikuti perkembangan zaman", tutur mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan ini.

Perjumpaan antara Sekjen dengan Sekretariat KKI serta Satker lain dibawah Setjen rutin dilakukan. Morning briefing digelar setiap minggu. Saat itulah Sekjen tidak segan bertanya tentang target dan kinerja KKI. "Sudah tercapaiah? Jika belum apa kendalanya", tanya Sekjen. "Pak Untung pengawal anggaran yang baik. Ia selalu bertanya realisasi belanja kami. Kalau ada kegiatan yang belum dilaksanakan, ia membuka diri untuk sama-sama menemukan solusinya", sambung perempuan kelahiran Plaju, Palembang ini.

Secara terbuka, Untung mengungkapkan prinsipnya dalam bekerja, bahwa apa yang sudah direncanakan harus terlaksana. Karena itu, beliau akan terus mengawal sehingga tujuan dan perencanaan dapat tercapai, supaya yang mandek bisa terurai. "Pokoknya Pak Sekjen mau semua yang ada dibawah tanggung jawabnya bisa berjalan. Jika ada hambatan, dicari pemecahannya bersama".

Gema mengakui personalitas Untung Suseno terhitung lengkap. Di balik ketegasan, keseriusan dan keteguhannya dalam bekerja, beliau juga mempunyai sisi manis, humanis. "Itulah Pak Untung, orangnya tegas, cakap, lugas. Tapi dibalik itu ada kelembutan, hatinya baik dan perhatian", puji Pemegang gelar Doktor dengan disertasi soal Kualitas Udara dan Kesehatan Pernafasan ini.

Pengalaman menangani beragam masalah kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah, Gema Asiani mendapat kepercayaan menjabat Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia sejak Senin, 10 April 2017 lalu. Mantan kepala Dinas kesehatan Kota Palembang Sumatera Selatan itu dilantik Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek bersama tiga pejabat eselon II lainnya. "Seperti yang diinginkan Ibu Menteri, KKI ini harus ikut berperan dalam mendorong dunia kesehatan dan pendidikan kedokteran yang lebih maju dan profesional. Karena itu, setelah satu setengah tahun bertugas di KKI, saya terus memacu diri untuk melakukan peningkatan kinerja", tutur Gema.

Konsil Kedokteran Indonesia, ungkap doktor lulusan Universitas Sriwijaya Palembang ini, bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Dokter dan dokter gigi harus mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat untuk mereka dapat mengantongi Surat Izin Praktik (SIP).

KKI juga bersentuhan dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang ada di seluruh Indonesia. Tugasnya yaitu mengesahkan standar pendidikan dan kompetensi profesi dokter dan dokter gigi. Selain itu KKI juga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masing-masing.

Di KKI, terdapat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. "Bentuk pengaduan yang dilayangkan ke MKDKI bervariasi, mulai dari dokter yang membuat kecewa pasien, dokter yang tidak punya izin praktik, hingga tindakan dokter yang tidak sesuai prosedur. Keputusan MKDKI berupa dinyatakan tidak bersalah atau bersalah. Jika terbukti bersalah maka bentuk pemberian sanksi disiplin yaitu peringatan tertulis; rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP); dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Dalam urusan penerbitan STR, KKI juga terus melakukan upaya perbaikan. Dalam 3 tahun terakhir, prosedur permohonan STR telah dilakukan secara

“ Sekretaris Jenderal mendukung pelaksanaan registrasi online dokter dan dokter gigi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

online. Dokter atau dokter gigi cukup melakukan registrasi secara online tanpa harus datang ke KKI. Dengan registrasi online, lanjut Gema, waktu penerbitan STR bisa diperpendek dari sebelumnya paling lama 14 hari kerja dapat menjadi 7-10 hari kerja. Biaya penerbitan STR sebesar Rp. 300.000,- yang dibayarkan kepada Negara melalui aplikasi Simponi. Sekretaris Jenderal mendukung pelaksanaan registrasi online dokter dan dokter gigi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dengan prosedur yang lebih efektif, tahun ini KKI telah menerbitkan sebanyak 26 ribu STR untuk dokter dan dokter gigi baru. Jumlah tersebut sudah melebihi target yang dipatok sebanyak 20 ribu STR. Tahun lalu target KKI menerbitkan 35 ribu STR dan terlaksana. "Kami mendapat tanggung jawab dan target semua dokter di Indonesia harus teregistrasi", lanjut Gema.

Terkait penyelesaian pengaduan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, tahun 2017 KKI ditargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 39 kasus. Tahun ini targetnya 41 kasus dan telah terselesaikan sebanyak 42 kasus. "Hal ini sudah melebihi target kinerja yang telah ditentukan", ungkap Gema. KKI akan terus berupaya memperbaiki kinerja dan berinovasi dalam tata cara dan waktu penyelesaian pengaduan. Kami bertekad setiap pengaduan bisa kami selesaikan dalam waktu satu bulan. Mesti untuk itu harus ada upaya investigasi ke tempat kejadian dan beberapa kali persidangan", jelasnya.

“

Dalam urusan penertiban STR, KKI juga terus melakukan upaya perbaikan. Dalam 3 tahun terakhir, prosedur permohonan STR telah dilakukan secara online.

KEMENKES RI

BAB VI

KEMENKES RI

“

Saya kenal Pak Untung saat menjadi Ketua Komisi IX. Ini sesuatu yang baru bagi saya berkenalan dengan sebuah institusi yang besar seperti Kementerian Kesehatan. Bahkan dengar-dengar dulu institusi ini ada yang menyeramkan.

Dede Yusuf Macan Effendi ST, MIP
Ketua Komisi IX DPR RI

**APA KATA
MEREKA**

**KEMENTERIAN
KESRI**



HUBUNGAN MENCAIR BERKAT KOMUNIKASI SEKJEN

Dede Yusuf Macan Effendi ST, MIP
KETUA KOMISI IX DPR RI

KEMENKES RI

KOMISI IX DPR RI selama ini dikenal sebagai mitra kerja Kementerian Kesehatan. Hubungan kedua lembaga ini cukup bagus dan komunikatif. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi tentang hubungan Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan. Jalinan komunikasi itu tidak lepas dari peran Sekjen Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo.

"Saya kenal Pak Untung saat menjadi ketua Komisi IX. Ini sesuatu yang baru bagi saya berkenalan dengan sebuah institusi yang besar seperti Kementerian Kesehatan. Bahkan dengar-dengar dulu institusi ini ada sesuatu yang menyeramkan," kata Dede sambil tersenyum.

Menurut Dede, saat bertemu dengan Sekjen Untung, kesan pertama adalah lelaki bertubuh besar dan tinggi. "Wah bakal serem juga nih," kata Dede saat melihat pertama kali dengan Untung Suseno Sutarjo. Namun dalam perjalanan kerja, Dede merasakan Sekjen Kementerian Kesehatan itu memiliki selera humor. "Kelihatannya serius ya, tapi beliau orangnya ramah, senang *guyonan*," kata aktor film ini.

Sebagai Ketua Komisi IX, tugas Dede Yusuf adalah mendeskripsikan harapan rakyat yang disuarakan lewat DPR RI dengan Pemerintah. "Kami membangun harapan bisa jadi satu tujuan untuk mencapai target-target pencapaian. Jadi keputusan yang kami ambil ini sama-sama didukung. Biasanya kami dengan Sekjen dan Menteri Kesehatan juga berdiskusi mencari titik temu untuk skala prioritas," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dalam diskusi-diskusi tersebut, Sekjen Untung sangat aktif. "Beliau sangat mendengarkan masukan-masukan dari Komisi IX. Dengan tetap satu koridor ketentuan capaian pemerintah. Jadi menurut saya beruntung Kementerian Kesehatan memiliki Sekjen seperti beliau. Orangnya adaptif dan tidak kaku," puji mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

Dede juga punya kesan bahwa selama ini bila berhadapan dengan berbagai institusi, yang muncul adalah sifat ego sektoral. Namun dengan Kementerian Kesehatan, ego sektoral itu tidak muncul. "Kami cair, sangat cair. Sehingga hal-hal berat dihadapi pemerintah bisa kita selesaikan."

“ Kami membangun harapan bisa jadi satu tujuan untuk mencapai target-target pencapaian. Jadi keputusan yang kami ambil ini sama-sama didukung.

Demikian juga saat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan membuat program-program kemitraan seperti Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) bisa terimplementasi dengan baik. Kemudian program-program yang mendekatkan Kementerian Kesehatan dengan masyarakat seperti sosialisasi promotif dan preventif, belakangan ini mendapat respons positif dari masyarakat.

“Apalagi Kementerian Kesehatan ini mendapat alokasi APBN cukup besar. Dulu ada pameo bahwa di institusi ini masing-masing punya kerajaan sendiri-sendiri. Sekarang sudah cair. Semua terintegrasi,” jelas Dede.

Hal itu juga tidak lepas dari peran Sekjen Untung untuk mencairkannya. “Jadi bisa cair. Sebelumnya kan hubungan DPR dengan Kementerian Kesehatan seperti anjing dan kucing. Tapi sekarang hubungan itu cair. Pencapaiannya juga sudah bagus. Ibu Menkes juga pro aktif dengan terus membuka dialog,” pungkasnya.





PEKERJAAN RUMAH SETELAH PENSIUN

Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH (LKPP)

KEMENKES RI

“

Saya dan dia berharap tetap bisa menyemangati para junior untuk mewujudkan e-katalog sektor ini. Ini akan menjadi *legacy* kami berdua.

AGUS Prabowo mengenal Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo belum lama, sekitar 2015. Pertemuan itu memang terkait dengan masalah pekerjaan. “Jadi Pak Untung ini menjadi jembatan antara Kementerian Kesehatan dengan LKPP. Jembatan untuk *men-deliver* e-katalog obat dan alat kesehatan,” kata Agus Prabowo.

Proses e-katalog obat dan alat kesehatan ini sudah berproses sejak 2015 hingga sekarang. “Nantinya seluruh rumah sakit di Indonesia bila melakukan pengadaan barang terutama obat dan alat kesehatan, tidak perlu lagi lelang. Rumah sakit tinggal melihat e-katalog dan bisa *di-browsing*. Ini lebih cepat dan lebih mudah, serta *accountable*. Jadi kami ini sama-sama memiliki pembahasan e-katalog ini,” tambahnya.

Namun pada 2018 ini, baik Agus Prabowo maupun Untung Suseno Sutarjo sama-sama memasuki masa pensiun. Sementara pekerjaan e-katalog belum selesai. “Kami ini sama-sama pensiun pada tahun ini. Sementara e-katalog belum selesai. Selama ini pengerjaan e-katalog dilakukan oleh LKPP. Namun ke depan kami serahkan kepada Kementerian Kesehatan yang mengerjakannya. Namanya adalah e-katalog sektor. Bila sudah selesai e-katalog sektor ini, hasilnya ditayangkan di LKPP,” papar Agus Prabowo.

Meskipun sudah pensiun, sebaiknya Untung Suseno Sutarjo tetap meneruskan penyelesaian e-katalog sektor ini. "Sama-sama pensiun, saya dan dia berharap tetap bisa menyemangati para junior untuk mewujudkan e-katalog sektor ini. Ini akan menjadi *legacy* kami berdua. E-katalog ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami setelah pensiun," ujarnya sambil tersenyum.

E-katalog ini cukup kompleks isinya karena pengadaan obat dan alat kesehatan banyak jenisnya. Bahkan cara produksi, distribusi berbeda. "Ya sangat ruwet dan akan berlaku secara nasional. Ini juga untuk menghindari persoalan-persoalan hukum."

Agus membenarkan bahwa pengadaan barang berupa obat dan alat kesehatan rawan dengan konflik. Misalnya sengketa merek atau ada perusahaan farmasi yang tidak bisa memenuhi produksi yang sudah disepakati. "Alasannya obat habis, distribusi tidak lancar dan sebagainya. Dengan e-katalog ini lebih akuntabel. Ini juga didukung oleh Pak Untung yang aktif berkomunikasi dengan kami," tegas Agus.

Pada kesempatan itu Agus Prabowo mengenang pertemuan pertama kali dengan Untung Suseno Sutarjo saat di Korea Selatan. Keduanya bertemu di KBRI Seoul. "Kami sama-sama ketemu di Kedutaan. Walau tidak satu bidang, kami sama-sama memiliki tujuan sama. Kami mengajak para investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Indonesia. Saya dengan jaringan saya, beliau juga demikian," pungkasnya.



PEKERJA KERAS DAN PENUH KOMITMEN

Dr. Harry Azhar Azis, MA
KETUA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

KERJA SAMA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Kementerian Kesehatan khususnya melibatkan Sekretariat Jendral, sudah beberapa kali. Ketua BPK, Harry Azhar Azis menyebutkan sesuai tugas dan fungsi BPK, kerja sama yang dilakukan adalah mengundang Sesjen Kementerian Kesehatan sebagai narasumber untuk memberikan paparan kepada seluruh Tim Pemeriksa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Hal ini kami lakukan agar tim pemeriksa JKN yang berasal dari Auditorat VI A dan perwakilan BPK di wilayah barat maupun timur, mendapatkan pemahaman yang cukup dari Kementerian Kesehatan. Mengapa memanggil Sesjen ini, terkait dengan proses bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam program JKM," kata Harry.

Kemudian BPK juga diundang untuk melakukan kuliah umum yang dilaksanakan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kuliah umum ini dilaksanakan di beberapa Poltekkes yang tersebar di seluruh Indonesia. *Audiensnya* adalah para pejabat di Kementerian Kesehatan, Manajemen Poltekkes, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dengan tema Tata Kelola Keuangan Negara serta peran dan kontribusi Poltekkes dalam mencapai program pemerintah bidang kesehatan.

Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan terkait seminar/*workshop* optimalisasi tindak lanjut output dari suatu pemeriksaan BPK juga berjalan dengan baik atas penyelesaian atas tindak lanjut atau rekomendasi BPK. "Auditorat Utama Keuangan Negara VI bersama Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Sekjen dan Irjen sangat peduli terhadap penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi," terangnya.

Penyelesaian tindak lanjut melalui pemantauan, seminar ataupun *workshop*. Sehingga dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menghambat proses penyelesaian tindak lanjut tersebut.

Selama ini koordinasi baik BPK dengan Sekjen Kementerian Kesehatan sudah cukup baik. Hal itu dicerminkan dengan komitmen kuat dari Sekjen Untung Suseno Sutarjo untuk mendukung dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPK yang melibatkan seluruh satuan kerja eselon I yang ada di Kementerian Kesehatan. "Salah satu poin yang mendukung fungsi koordinasi yang beliau lakukan adalah dengan adanya *strong leadership* dari beliau," ujar Harry.

Selain itu Untung Suseno Sutarjo juga menunjukkan nilai-nilai profesionalisme kerja. "Pak Untung itu pekerja keras, disiplin dan didukung dengan komitmen dan kompetensi. Hal tersebut dapat menjadi daya ungkit dalam mengakselerasi capaian program Kementerian Kesehatan," tegasnya.

Harry melihat sosok Untung Suseno Sutarjo adalah seorang *good leader*. Untung adalah sosok yang mumpuni, dan mampu mengendalikan internal di lingkup Kementerian Kesehatan. "Saya anggap Pak Untung mampu menjadi *good leader*."

Pak Untung itu pekerja keras, disiplin dan didukung dengan komitmen dan kompetensi. Hal tersebut dapat menjadi daya ungkit dalam mengakselerasi capaian program Kementerian Kesehatan.

Sedangkan secara personal, Harry melihat Untung Suseno Sutarjo merupakan pekerja keras dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perbaikan. "Bila ada permasalahan, beliau tidak berupaya mencari alasan-alasan. Namun beliau segera melakukan perbaikan. Hal ini hendaknya dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh pejabat berikutnya."

Di akhir wawancara, Harry memberikan pesan terakhir untuk Sekjen Untung Suseno Sutarjo secara khusus. "Dalam menghadapi masa purna bhakti, agar meletakkan pondasi yang kuat untuk penerus-penerus beliau. Melalui sistem dan mekanisme kerja yang berorientasi pada hasil. Agar pencapaian program pemerintah yang diemban oleh Kementerian Kesehatan dapat dicapai," pesan Harry.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan pencapaian program JKN yang melibatkan banyak pihak, baik instansi pemerintah dan swasta maupun pusat dan daerah.



STUNTING YANG MEMPERSATUkan DUA ANAK MANUSIA

Dr. Ir. Subandi Sardjoko M.Sc

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN
KEBUDAYAAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DATA yang dirilis Global Nutrition Report pada 2014 memperlihatkan deretan angka yang memprihatinkan. Di dunia, laporan itu menyebutkan, kekurangan gizi menyebabkan 159 juta anak di dunia mengalami stunting.

Indonesia tidak lepas dari masalah itu, karena 9 juta di antara anak-anak itu berada di Tanah Air. Pun masalah ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yang dilantik pada tahun yang sama.

Dalam banyak forum, di banyak tempat dan saat bertemu anak-anak, Kepala Negara selalu menyentil masalah stunting ini. "Sepantasnya, tidak ada anak yang kekurangan gizi di negara yang berpendapatan menengah," ujar Presiden, berkali-kali.



Stunting menjadi pemersatu mereka. Selain menyusun program bersama tim, mereka juga berkoordinasi dalam penganggarannya. Kami bersama mengawal stunting.

Masalah stunting, terutama pencegahan dan penanganannya, yang membuat dua punggawa di dua kementerian bertemu. Mereka ialah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo dan sejawatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Subandi Sardjoko.

"Pada 2014, Pak Untung dilantik sebagai sekjen dan setahun kemudian giliran saya menjadi deputi. Karena tugas yang sama, kami sering berkoordinasi," tutur Subandi.

Di lembaga mereka, kedua pria ini bertugas atas perencanaan. Ketika Subandi harus merencanakan masalah kesehatan, maka sosok Untung-lah yang bisa dia ajak berbicara panjang dan lebar.

Stunting menjadi pemersatu mereka. Selain menyusun program bersama tim, mereka juga berkoordinasi dalam penganggarannya. "Kami bersama mengawal stunting," papar sarjana IPB Bogor ini.

Setiap tahun, keduanya pasti bertemu untuk menyusun UU Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mereka juga bertalian saat menyiapkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

"Kerja sama kami lebih intens, saat Ibu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meminta

kami menyiapkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas). Untuk menyusun draft rencana aksi, Bappenas harus bekerja sama dengan Sekjen Kementerian Kesehatan dan para dirjen terkait," lanjut doktor ekonomi sumber daya dari Kyoto University, Jepang, ini.

Subandi memiliki kesan baik dan positif terhadap Untung. Sejak bertemu, saat melihat pria dengan postur tubuh yang tinggi besar itu, dia menduga Untung pasti orang yang tegas. Dugaan itu tidak salah. "Selain ketegasannya, kesan saya dia orang yang selalu positif thinking terhadap lawan bicaranya. Pak Untung gampang diajak ngobrol." Namun, selain sifat-sifat pribadi itu, yang penting bagi Subandi, Untung cakap melakukan koordinasi di internal Kementerian Kesehatan. Karena itu, saat keduanya mewakili lembaga masing-masing, perundingan dan perencanaan berjalan lancar, karena penyiapan data yang baik.

Dalam beberapa pertemuan, Subandi mengakui ada beberapa usulan program yang memang harus dipending, karena butuh koordinasi. "Pak Untung bisa berkoordinasi lebih cepat. Ia seringkali tepat mengalokasikan anggaran untuk target yang benar."

Saat bekerja sama dalam program menurunkan angka kematian ibu, program ini juga masih berjalan terus hingga saat ini, Subandi menilai kepribadian Untung sangat mendukung kerjanya. Saat berjanji untuk ketemuan, dia selalu hadir tepat pada waktunya.

"Meski tidak sering, kami juga pernah jalan bareng ke luar kota. Pernah meluncurkan bersama salah satu rumah sakit di Kota Ambon. Saat itulah saya lebih banyak mengerti Pak Untung yang kalem, tapi tegas, tidak banyak bicara, tapi mampu berkoordinasi dengan baik," papar pria yang bekerja di Bappenas sejak 1986 ini.

Saat mendengar Untung hendak mengakhiri pengabdian panjangnya di Kementerian Kesehatan, Subandi sejenak termenung. "Pak Sekjen punya pengalaman panjang, banyak ragam pekerjaan pernah dijalannya. Saya berharap dia tetap mengontribusikan pengalaman dan pengetahuannya untuk pembangunan kesehatan di masa mendatang. Pak Untung, PR kita masih banyak, kami tetap butuh sharing pengalaman dari Anda," tandasnya.

PENUTUP

Banyak aspek menarik yang dapat diperoleh dari perjalanan hidup seseorang yang memilih dunia kesehatan sebagai tumpuan karirnya. Bermula sebagai seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Barat di pertengahan dekade 1980-an, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. melanjutkan perjalanan hidupnya menjadi seorang ASN di Kementerian Kesehatan.

Terlatih sebagai seorang dokter yang bekerja di wilayah sulit yang penuh tantangan dan kesulitan, dr. Untung memiliki banyak gagasan dan terobosan kala meniti karir di Kementerian Kesehatan. Keandalannya itulah yang kemudian mengantarkannya ke puncak karir hingga menduduki jabatan Sekretaris Jenderal sejak 2014.

Dalam karirnya di Kementerian Kesehatan dr. Untung mengarungi dua zaman yang berbeda: masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pengalamannya yang mampu menyelami kondisi sosial sekitar membuat dr. Untung dapat memahami tantangan dan tuntutan baru dari sebuah zaman. Oleh karenanya, dr. Untung kerap menggagas ide baru dan menelorkan terobosan di lingkungan kerjanya dalam menjawab soal-soal kekinian.

Namun, berbagai pembenahan dan pembaruan yang dilakukannya di Kementerian Kesehatan bukannya tanpa tantangan. Namun, berkat kesabarannya menyelesaikan masalah, beberapa kesulitan dapat dilampauinya. Tidak berlebihan kiranya jika salah seorang yuniornya di Kementerian Kesehatan mengkategorikan dr. Untung sebagai *problem solver*—suatu tipe yang mungkin saja terhitung langka di jajaran birokrasi negara pada umumnya.



KEMENKES RI

KEMENKES RI

KARIRNYA di Kementerian Kesehatan dimulai dari bawah. Pada 1990, pria muda bernama Untung Suseno Sutarjo yang sudah mengenyam pengalaman di salah satu puskesmas di Kalimantan Barat, memulai kerja dari nol. Dia menerima banyak tugas, mulai dari mengangkat komputer, menerima telepon, dan mengetik penugasan.

Ketekunan, kejelian, dan jiwa inovatif Master Kesehatan dari Universitas Gadjah Mada ini membawa Untung ke puncak tertinggi karir seorang birokrat, yakni sebagai Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Hari pertama setelah dilantik sebagai Sekjen, Untung sadar, banyak perubahan yang harus dilakukan. Dia melihat banyak sumbatan baik program, administrasi, mau pun lingkungan. Maka, perubahan pun dilakukan. Perjalanan karir yang dimulai dari bawah, kedisiplinan, ketekunan, kejelian, perhatian besar, dan pikiran yang selalu terbuka untuk menerima inovasi, membuat Untung menjadi Master Chef handal di Kementerian Kesehatan.

Prof Dr Nila F Moeloek SpM (K), Menteri Kesehatan

"Saya tidak pernah kecewa dengan kinerjanya. Pilihannya untuk menjadi birokrat di Kementerian Kesehatan sangat mulia, tidak lebih rendah dari pilihan seorang dokter untuk menjadi spesialis atau dokter yang bekerja di puskesmas."

Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI

"Dulu ada pameo bahwa Kementerian Kesehatan yang mendapat alokasi dana besar membuat masing-masing bidang punya kerajaan sendiri. Sekarang sudah cair. Kami bisa berdiskusi dan bekerjasama mencapai target-target pemerintah. Semua Terintegrasi. Beruntung Kementerian Kesehatan punya Sekjen seperti Untung Suseno Sutarjo."

Dr Harry Azhar Aziz, MA, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

"Pak Untung itu pekerja keras, disiplin, dan didukung dengan komitmen serta kompetensi. Hal tersebut menjadi daya ungkit dalam mengakselerasi capaian proram Kementerian Kesehatan."